



LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS

TAHUN 2021



**TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT
(TPIP)**



LAPORAN **PELAKSANAAN TUGAS** **TAHUN 2021**

TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT
(TPIP)

Daftar Isi



Bab I

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN INFLASI TAHUN 2021

16

1.1.	Inflasi Inti	19
1.2.	Inflasi Volatile Food	22
1.3.	Inflasi Administered Prices	23
1.4.	Inflasi Regional	24

26

Bab II

KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2021

2.1.	Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi 2021	28
2.1.1.	Kebijakan Bank Indonesia	28
2.1.2.	Kebijakan Fiskal	29
2.1.3.	Kebijakan Pangan	29
2.1.4.	Kebijakan Energi	30
2.1.5.	Kebijakan Konektivitas	31
2.1.6.	Kebijakan Ketenagakerjaan	33
2.2.	Program Kerja TPIP Tahun 2021	34
2.2.1.	Keterjangkauan Harga	34
2.2.2.	Ketersediaan Pasokan	36
2.2.3.	Kelancaran Distribusi	42
2.2.4.	Komunikasi Efektif	46



Bab III

56

PRAKIRAAN INFLASI 2022

Bab IV

62

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2022

4.1.	Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2022	64
4.1.1.	Kebijakan Bank Indonesia	64
4.1.2.	Kebijakan Fiskal	64
4.1.3.	Kebijakan Pangan	65
4.1.4.	Kebijakan Energi	66
4.1.5.	Kebijakan Konektivitas	66
4.1.6.	Kebijakan Ketenagakerjaan	67
4.2.	Program Kerja TPIP Tahun 2022	67
4.2.1.	Keterjangkauan Harga	67
4.2.2.	Ketersediaan Pasokan	69
4.2.3.	Kelancaran Distribusi	72
4.2.4.	Komunikasi Efektif	75



Daftar Grafik

Grafik 1.1.	Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi	18	Grafik 1.13.	Pertumbuhan Jasa Mamin dan Inflasi VF	22
Grafik 1.2.	Inflasi IHK Spasial	18	Grafik 1.14.	Pasokan di Pasar Induk Kramat Jati	22
Grafik 1.3.	Inflasi Inti <i>Food</i> dan <i>Non-Food</i> (Tahunan)	19	Grafik 1.15.	Disparitas Inflasi VF	23
Grafik 1.4.	Inflasi Inti Barang dan Jasa (Tahunan)	19	Grafik 1.16.	Disparitas Inflasi Cabai Merah	23
Grafik 1.5.	Inflasi Inti <i>Food</i> , <i>Non-Food</i> Barang dan Jasa (Tahunan)	20	Grafik 1.17.	Perkembangan Inflasi AP	24
Grafik 1.6.	Inflasi Inti <i>Traded</i> dan <i>Non-Traded</i> (Tahunan)	20	Grafik 1.18.	Sumbangan Inflasi AP	24
Grafik 1.7.	Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi	20	Grafik 2.1.	Sebaran penyaluran KPSH Bulanan Tahun 2018-2021	34
Grafik 1.8.	Ekspektasi Inflasi <i>Consensus Forecast</i>	20	Grafik 2.2.	Perkembangan CBP Tahun 2019-2021	39
Grafik 1.9.	Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (Tahunan)	21	Grafik 2.3.	Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID Award 2021	48
Grafik 1.10.	Nilai Tukar, Inflasi Emas Perhiasan, dan Inflasi Emas Global (Bulanan)	21	Grafik 3.1.	Proyeksi Harga Komoditas Global	58
Grafik 1.11.	Perkembangan Rezim Inflasi VF	22	Grafik 3.2.	Ekspektasi Inflasi	58
Grafik 1.12.	Sumbangan Inflasi Komoditas VF	22	Grafik 3.3.	Perkembangan Mobilitas Masyarakat	58

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Transmisi Kenaikan Harga Komoditas Global terhadap Inflasi Domestik Selama 2021	21	Gambar 2.5.	Perkembangan PIHPS Nasional	51
Gambar 1.2.	Peta Inflasi Daerah	25	Gambar 4.1.	Perkembangan Mandatori Biodiesel Indonesia	71
Gambar 2.1.	Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan tahun 2021	32	Gambar 4.2.	Kerangka Pikir Kegiatan FDP Melalui PMT/ TTIC/TMT/TTI dan/ atau Pelaku UMKM Pangan Tahun 2022	73
Gambar 2.2.	Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam Upaya Penurunan Disparitas Harga	33	Gambar 4.3.	Kegiatan FDP Antar Wilayah Tahun 2022	73
Gambar 2.3.	Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Kegiatan FDP Melalui PMT/TTIC/TMT/TTI Tahun 2021	45	Gambar 4.4.	Peta Sebaran 18 Pulau Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T)	74
Gambar 2.4.	Kinerja Pemasaran Online PMT/ TTIC Tahun 2021	45	Gambar 4.5.	Peta Konektivitas	75

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Transaksi Resi Gudang per-Komoditi Tahun 2021	40	Tabel 2.5.	Keterkaitan Program/Kegiatan KL Dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024	53
Tabel 2.2.	Rincian Fasilitas Distribusi Pangan 2021	44	Tabel 3.1.	Asumsi Ekonomi Global dan Domestik	58
Tabel 2.3.	Pemenang TPID Award 2021	49			
Tabel 2.4.	Nominasi TPID Award 2021	49			

Ringkasan **Eksekutif**



1. Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi 2021

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2021 terpantau rendah dan stabil. Inflasi IHK 2021 tercatat rendah sebesar 1,87% (yoy), namun mengalami peningkatan dibandingkan inflasi 2020 yang sebesar 1,68% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan inflasi kelompok *Administered Price* (AP), di tengah perlambatan inflasi kelompok inti dan *Volatile Food* (VF). Inflasi inti tercatat sebesar 1,56% (yoy) pada 2021, menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,60% (yoy). Demikian pula dengan inflasi VF 2021 yang mencatatkan inflasi sebesar 3,20% (yoy), menurun dari tahun 2020 yang sebesar 3,62% (yoy). Realisasi inflasi kelompok VF tersebut sesuai dengan target laju inflasi VF yang ditetapkan pada *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2021 yaitu sebesar $4,0\% \pm 1,0\%$. Adapun inflasi AP mengalami inflasi sebesar 1,79% (yoy), atau meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,25% (yoy).

Masih berlangsungnya pandemi COVID-19 telah menurunkan daya beli dan permintaan masyarakat sehingga berdampak pada capaian inflasi yang rendah, di tengah kebijakan Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan. Penyebaran COVID-19 berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berimplikasi pada penurunan daya beli secara *broad-based* dan simultan. Masih rendahnya daya beli masyarakat tersebut tercermin dari capaian inflasi inti yang rendah dibandingkan historisnya. Penurunan mobilitas masyarakat menyebabkan pelemahan permintaan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi, yang berimbas pada masih relatif rendahnya inflasi kelompok AP. Sementara itu, inflasi kelompok VF dapat terjaga sejalan dengan minimalnya gangguan produksi walau terdapat gangguan cuaca La-Nina, serta upaya kuat Pemerintah dalam memastikan kecukupan pasokan di seluruh daerah dan meminimalisir gangguan distribusi. Dari sisi eksternal, pergerakan harga komoditas global yang meningkat tajam ditransmisikan secara terbatas ke harga domestik, ditopang oleh kebijakan Pemerintah yang mempertahankan stabilitas harga energi domestik. Selain itu, nilai tukar Rupiah yang terjaga sesuai nilai fundamentalnya turut mendukung pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2021

Upaya pengendalian inflasi 2021 dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dan fiskal maupun koordinasi dan komunikasi kebijakan untuk memastikan stabilitas harga di tengah daya beli masyarakat yang terbatas akibat pandemi COVID 19 yang masih berlangsung. Dari sisi kebijakan moneter, bauran kebijakan selama 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus moneter dan dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sisi kebijakan fiskal, penerapan kebijakan dilakukan dengan mengalokasikan belanja subsidi, baik energi maupun non energi, yang semakin efektif dan efisien melalui perbaikan ketepatan sasaran dalam rangka menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan pangan Pemerintah dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga di sepanjang rantai pasok komoditas pangan pokok. Adapun kebijakan energi diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional walaupun di tengah tren kenaikan harga komoditas global. Kebijakan konektivitas diperkuat dengan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional yang terus diakselerasi oleh Pemerintah. Sementara itu, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Bauran kebijakan moneter yang akomodatif pada 2021 diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melanjutkan stimulus moneter dengan kebijakan suku bunga rendah hingga menjadi 3,50%, terendah sepanjang sejarah, dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan untuk memperkuat *stance* kebijakan moneter akomodatif. Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah didukung berlanjutnya aliran masuk modal asing. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung upaya Pemerintah dan berpartisipasi dalam pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 terkait pandemi Covid-19 melalui pembelian SBN secara langsung (*private placement*) sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 (KB III). Di samping kebijakan moneter, Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) aktif berperan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjaga stabilitas harga komoditas penyumbang

inflasi daerah. Untuk meningkatkan produktivitas dan pasokan, KPwDN mendukung pengembangan, peningkatan kualitas, dan perluasan adopsi digital UMKM pangan di daerah. Selain itu, KPwDN juga terus mendorong sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kelancaran distribusi khususnya dari daerah surplus ke daerah defisit pangan. Selanjutnya, sebagai upaya komunikasi yang efektif, KPwDN secara reguler melakukan *capacity building* untuk meningkatkan kehandalan TPID, melakukan fasilitasi pemantauan harga pangan strategis di daerah, serta aktif berperan memberikan *strategic advisory* kepada Pemerintah Daerah terkait inflasi dan upaya pengendaliannya.

Penerapan kebijakan fiskal dilakukan dengan mengalokasikan belanja subsidi yang semakin efektif dan efisien melalui perbaikan ketepatan sasaran dalam rangka menjaga keterjangkauan harga. Subsidi energi dialokasikan dalam bentuk pemberian subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik golongan tarif tertentu. Adapun subsidi non energi dialokasikan untuk pupuk, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bantuan uang muka perumahan, dan subsidi selisih bunga kredit perumahan. Sementara itu, belanja bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk lebih tepat sasaran dan produktif untuk penduduk yang terdampak pandemi. Selain pemberian perlindungan sosial langsung, Pemerintah bekerja sama dengan pemberi kerja, khususnya sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk membantu ketahanan usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan pangan Pemerintah dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga di sepanjang rantai pasok komoditas pangan pokok. Di sisi hulu, dilakukan penyerapan pangan pokok, yaitu beras, untuk menjaga harga petani maupun untuk kecukupan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Di sisi hilir, dilaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM). Kebijakan stabilisasi harga pangan juga dilakukan untuk komoditas jagung dengan penyediaan pasokan dan distribusi jagung untuk pakan ternak kepada Koperasi Peternak Sasaran (KPS). Selain berbagai kebijakan pengelolaan pangan pokok tersebut, kebijakan pangan lain yang terus diperkuat adalah meningkatkan akses pembiayaan melalui kredit program serta perlindungan usaha pertanian dalam bentuk asuransi pertanian dan ternak.

Kebijakan energi nasional 2021 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meskipun harga komoditas global mulai menunjukkan tren peningkatan sejak awal

2021, harga komoditas energi domestik tetap dijaga untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Pemerintah memberikan stimulus, terutama pada sektor ketenagalistrikan, melalui diskon tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta industri. Kinerja sektor energi tercatat lebih baik di tahun 2021 untuk mendukung ketersediaan pasokan energi nasional dengan realisasi investasi mencapai 28,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 26,3 miliar dolar AS, dengan realisasi terbesar berada di subsektor minyak dan gas bumi.

Kebijakan konektivitas transportasi masih menjadi prioritas dan perlu diperkuat untuk mendorong berkurangnya disparitas harga antarwilayah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional yang terus diakselerasi oleh Pemerintah. Pada tahun 2021, Pemerintah terus melanjutkan pembangunan bendungan baru dan lanjutan, jaringan irigasi, jalan, jalur kereta api, dan jembatan. Di samping itu, Pemerintah juga konsisten melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur sampai ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) terutama dengan menyelenggarakan program tol laut yang disinergikan dengan program jembatan udara. Implementasi peningkatan konektivitas didorong melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan memanfaatkan pendanaan kreatif, baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun alternatif pendanaan lainnya.

Pada tahun 2021 kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan desain "semi-bantuan sosial" untuk pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan untuk membantu biaya hidup dan mencari pekerjaan dengan menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah juga melanjutkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah/gaji (BSU) untuk pekerja berpenghasilan rendah. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong penetapan upah minimum disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja melalui struktur dan skala upah yang jelas.

3. Program Kerja TPIP Tahun 2021

Program Kerja TPIP tahun 2021 diarahkan untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas inflasi dalam kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Penguatan program Keterjangkauan Harga dilaksanakan dengan menjaga stabilitas harga, termasuk upaya untuk menekan biaya distribusi pasokan bahan pangan strategis. Pemerintah tetap konsisten dalam melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk menjaga kestabilan harga beras di masyarakat yang selama tahun 2021 telah disalurkan oleh Perum BULOG sebanyak 768 ribu ton beras. Perum BULOG juga mendapatkan penugasan untuk menyalurkan program Bantuan Beras masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) tahun 2021 kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta menyalurkan jagung sebanyak 30.000 ton kepada koperasi peternak. Upaya untuk mendukung keterjangkauan harga juga dilakukan oleh Bank Indonesia dengan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar sehingga berhasil menurunkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah selama tahun 2021.

Program Kerja TPIP untuk meningkatkan Ketersediaan Pasokan juga terus diperkuat selama tahun 2021. Upaya penguatan ketersediaan pasokan tersebut dilakukan melalui berbagai program yaitu peningkatan ketersediaan pasokan melalui program *food estate*, peningkatan produksi pangan antarwaktu dan perluasan area tanam, perencanaan dan realisasi impor pangan tepat waktu, peningkatan pasokan daging ayam, dan penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Di samping itu, dalam kerangka ketersediaan pasokan juga dilakukan program penyediaan infrastruktur pascapanen komoditas selain beras, penggunaan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menjaga kepastian harga jual dan akses pembiayaan petani, optimalisasi pemanfaatan sarana alsintan untuk budidaya dan penanganan pascapanen, penguatan industri pengolahan produk hortikultura, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

TPIP terus memperkuat pelaksanaan program kerja Kelancaran Distribusi untuk menekan disparitas inflasi antarwilayah. Upaya penguatan program kerja Kelancaran Distribusi tahun 2021 dilakukan dengan penguatan kerjasama perdagangan antardaerah (KAD), penguatan program tol laut untuk efisiensi distribusi pangan, optimalisasi pemanfaatan pasar induk beras melalui kajian bersama lintas K/L, fasilitasi distribusi pangan antarprovinsi dari wilayah surplus ke wilayah defisit, dan pembangunan ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi. Penguatan kerjasama perdagangan antardaerah dilakukan dengan penguatan asesmen *pre-matchmaking* dalam pemilihan kandidat pelaku usaha pelaksana KAD. Penguatan program tol laut dilakukan dengan menambah trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal serta jumlah muatan. Sementara itu, penguatan distribusi pangan

dilakukan melalui pemanfaatan outlet penjualan langsung (*offline*), *semi online*, maupun *full online*. Adapun ekosistem pertanian berbasis teknologi informasi diperkuat dengan fasilitasi antara UMKM klaster pangan binaan dan *platform* pertanian *digital*.

Program kerja Komunikasi Efektif terus dilakukan sepanjang tahun 2021 dengan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar ekspektasi inflasi tetap terjaga. Upaya penguatan program kerja komunikasi efektif selama tahun 2021 dilakukan dengan memperkuat kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi, penentuan dan penetapan sasaran inflasi 2022-2024, penyusunan *Roadmap* Pengendalian Inflasi 2022-2024, penguatan dan penyelenggaraan koordinasi (Rakornas dan Rakorpusda), dan perbaikan kualitas data. Eratnya koordinasi antarinstansi di pusat maupun daerah mendukung terjaganya ekspektasi inflasi dalam rentang sasaran. Rakornas Pengendalian Inflasi untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, dengan mengambil tema "Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga". Sejumlah program kerja terkait perbaikan data juga telah dilaksanakan seperti sinkronisasi data pangan, perluasan data pasokan pangan strategis dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan penyusunan panduan *tagging* inflasi dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Prospek Inflasi Tahun 2022

Inflasi 2022 diproyeksikan meningkat di tengah proses pemulihan ekonomi global dan domestik, serta risiko kenaikan harga komoditas akibat meningkatnya tensi geopolitik dari perang Rusia-Ukraina dan gangguan pasokan global. Prakiraan meningkatnya tekanan inflasi didorong oleh seluruh kelompok disagregasinya, yaitu kelompok inti, *volatile food*, maupun *administered prices*. Belanjutnya pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19 diperkirakan mendorong peningkatan permintaan, yang berimplikasi pada berlanjutnya kenaikan harga komoditas global ke depan. Di samping itu, terdapat tekanan harga komoditas global, baik energi, pangan, maupun lainnya, yang diakibatkan dari risiko geopolitik perang Rusia-Ukraina yang berpotensi mendorong inflasi domestik Indonesia melalui produk-produk berbasis impor. Namun demikian, pergerakan nilai tukar Rupiah yang diperkirakan terjaga sesuai nilai fundamentalnya diharapkan dapat meminimalkan tekanan eksternal terhadap inflasi domestik. Dari sisi domestik, perbaikan mobilitas masyarakat sejalan dengan berlanjutnya realisasi program vaksinasi diperkirakan

akan meningkatkan permintaan sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terutama peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, diperkirakan juga mendorong kenaikan inflasi di tengah ekspektasi inflasi yang berada dalam tren meningkat.

5. Kebijakan Pengendalian Inflasi 2022

Upaya pengendalian inflasi dalam jangka menengah menghadapi berbagai tantangan baik dari pemulihan ekonomi domestik dan konsolidasi fiskal, maupun dari global akibat tekanan harga komoditas dan normalisasi kebijakan moneter global. Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan bersinergi dan menjadi bagian dari bauran kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), baik dalam aspek pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*). Di tengah era digitalisasi ekonomi dan keuangan yang semakin berkembang khususnya selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta dilakukan secara *end-to-end*. Berbagai kebijakan tersebut akan direncanakan dan dilakukan secara hati-hati serta terukur sebagai upaya menjaga inflasi dalam rentang sasaran $3,0\% \pm 1\%$.

Strategi kebijakan fiskal Pemerintah di 2022 terus diarahkan pada upaya mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui instrumen APBN, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk terus menjaga daya beli masyarakat secara umum di masa pemulihan ekonomi serta berperan sebagai shock absorber, terutama untuk meredam dampak rambatan akibat kenaikan harga komoditas global, terutama transmisinya pada kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Pada 2022, pemberian bantuan sosial dan subsidi akan semakin diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Sementara itu, kebijakan subsidi tahun 2022 juga diarahkan untuk lebih tepat sasaran, terintegrasi dan mendukung UMKM, petani, serta layanan transportasi publik sehingga dapat terus mendukung upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan. Sementara itu, dari sisi

ketenagakerjaan, kebijakan pada 2022 terus diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja. Dalam kaitan ini, Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja dan implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai sarana perlindungan pendapatan bagi pekerja yang memasuki usia pensiun (56 tahun) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan amanat UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kebijakan Pangan tahun 2022 semakin diperkuat untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan implementasi kebijakan impor yang terukur. Berbagai penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui: (i) pembentukan Badan Pangan Nasional (*National Food Agency*) yang akan mengintegrasikan dan mengoordinir upaya perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan; (ii) penguatan peran Bulog melalui penugasan pengadaan dan penyaluran kedelai bagi pengrajin tahu dan tempe, pengadaan dan penyaluran jagung untuk tetap menjaga harga bagi petani sekaligus menyediakan jagung yang sesuai harga acuan kepada peternak mandiri; serta (iii) pengembangan *food estate* lebih lanjut di berbagai wilayah dan penguatan cadangan pangan (beras, jagung, dan kedelai) guna mencapai ketahanan dan kemandirian pangan domestik dalam jangka panjang. Selain itu, penguatan kebijakan dan mekanisme impor juga dilakukan melalui upaya diversifikasi negara asal impor melalui penajagan kerja sama impor dengan beberapa negara.

6. Program Kerja TPIP Tahun 2022

Program kerja pengendalian inflasi 2022 dalam kerangka 4K tetap difokuskan untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi domestik. Dalam menjaga keterjangkauan harga, berbagai program kerja dilakukan dalam rangka stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Upaya stabilisasi harga terus dilakukan, baik pada tingkat produsen maupun konsumen, melalui kebijakan penetapan harga pangan strategis yang menyeimbangkan biaya faktor produksi dengan daya beli masyarakat, kegiatan pengawasan harga dan kecukupan stok secara berkala, optimalisasi kegiatan KPSH beras, upaya menjaga harga pembelian kedelai bagi pengrajin tahu tempe, serta harga jagung bagi petani dan peternak mandiri. Menjaga daya beli masyarakat menjadi faktor pertimbangan utama dalam pengelolaan risiko *administered prices* ke depan, di tengah meningkatnya tekanan eksternal, reformasi fiskal dan transformasi subsidi, serta upaya menjaga stabilitas

nilai tukar Rupiah. Sementara itu, upaya mengelola sisi permintaan senantiasa dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan internal perekonomian terutama dalam mengantisipasi tekanan inflasi ke depan seiring akselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.

Penguatan program kerja ketersediaan pasokan diharapkan dapat mengatasi tantangan struktural fluktuasi pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka optimalisasi produksi domestik komoditas pangan, antara lain berupa perluasan adopsi teknologi *internet of things* (IOT) untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pengembangan kawasan *food estate* lebih lanjut, serta pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai. Sementara itu, penguatan kebijakan dan mekanisme impor untuk memenuhi kekurangan produksi pangan strategis dalam negeri dilakukan melalui diversifikasi negara asal impor dan perencanaan impor yang lebih baik. Selanjutnya, penguatan kelembagaan petani, peningkatan indeks akseptabilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, serta optimalisasi pemanfaatan mekanisme SRG dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan mendukung ketersediaan pasokan.

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, upaya peningkatan infrastruktur konektivitas, kerja sama perdagangan antardaerah (KAD), serta fasilitasi distribusi pangan terus dilakukan untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Peningkatan kuantitas dan kualitas konektivitas antarwilayah terus didorong,

terutama dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur darat, laut maupun udara, termasuk melalui akselerasi pembangunan di Kawasan Indonesia Timur (KIT) maupun hingga ke wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Upaya perluasan KAD dilakukan melalui peningkatan jumlah kerjasama, jenis komoditas ataupun volume yang ditransaksikan. Sementara itu, kegiatan fasilitasi distribusi pangan terus berlanjut terutama kepada pemasok ataupun pelaku UMKM dengan memanfaatkan jaringan Pasar Mitra Tani/ Toko Tani Indonesia Center di 34 Provinsi.

Komunikasi efektif dalam rangka pengendalian inflasi terutama diarahkan untuk menjaga ekspektasi inflasi agar sesuai rentang sasaran.

Diperlukan penyediaan data informasi yang berkualitas serta terintegrasi baik dari pusat dan daerah, serta perbaikan kualitas data untuk mendukung asesmen dan perumusan kebijakan, termasuk untuk mengurangi risiko spekulasi akibat adanya *assymetric information*. Selain itu, upaya koordinasi pusat dan daerah dalam rangka harmonisasi upaya pengendalian inflasi serta mendukung kehandalan TPID juga terus diperkuat antara lain melalui kegiatan *capacity building* bagi TPID, termasuk penyelenggaraan Rakornas dan Rakorpusta untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kebijakan di pusat dan daerah. Pada 2022, Rakornas pengendalian inflasi akan mengangkat tema "Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga" sebagai upaya mengatasi tantangan struktural dengan terus mengoptimalkan digitalisasi untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, Pemerintah dan Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan termasuk pengendalian inflasi yang kredibel dan komunikasi yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan untuk menjaga ekspektasi inflasi sesuai rentang sasaran.

Jakarta, 30 Juni 2022

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

**Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian**



Iskandar Simorangkir
Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan
Keuangan

Bank Indonesia



Solikin M. Juhro
Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi
dan Moneter

Kementerian Keuangan



Febrio N. Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan
Fiskal

**Kementerian Dalam
Negeri**



Teguh Setyabudi
Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah

Bab I

Evaluasi Pencapaian Sasaran Inflasi Tahun 2021

Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi tahun 2020 yang sebesar 1,68% (yoy). Inflasi tahun 2021 yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, ketersediaan pasokan yang memadai, distribusi barang dan jasa yang relatif lancar, stabilitas nilai tukar yang terjaga, serta sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga ekspektasi inflasi dan kestabilan harga. Sinergi yang erat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat untuk memastikan tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil selama pandemi COVID-19. Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga inflasi berada dalam rentang sasaran, di tengah upaya untuk terus mendorong perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

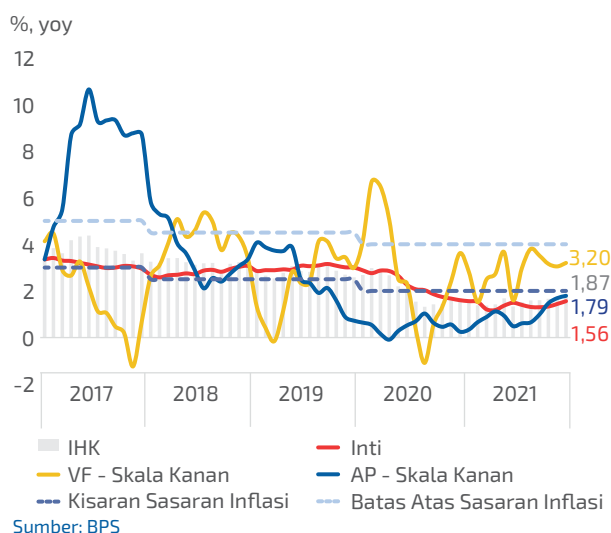


Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat terbatas dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 1,68% (yoy). Realisasi inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, ketersediaan pasokan yang memadai, distribusi barang dan jasa yang relatif lancar, stabilitas nilai tukar yang terjaga, serta sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga ekspektasi inflasi dan kestabilan harga. Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai dengan kisaran targetnya sebesar $3,0 \pm 1,0\%$ pada 2022.

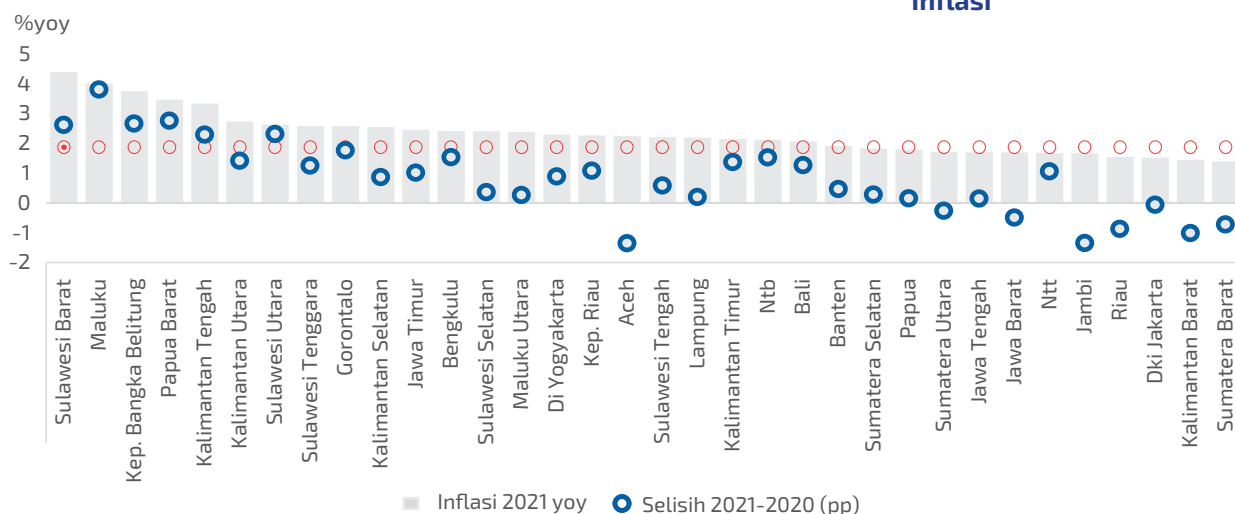
Secara spasial, inflasi IHK 2021 (yoy) di seluruh wilayah terpantau meningkat dibandingkan 2020, walau masih rendah, khususnya wilayah Jawa dan Sumatera yang berada di bawah sasaran inflasi $3,0\% \pm 1,0\%$. Wilayah Jawa kembali mencatat inflasi tahunan terendah yakni sebesar 1,75% (yoy), diikuti Sumatera (1,91% yoy), Balinusra (2,01% yoy), Kalimantan (2,26% yoy), dan Sulampua (2,56% yoy). Meskipun dalam level yang rendah, inflasi di mayoritas wilayah kecuali Sumatera terpantau meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan daerahnya, realisasi inflasi tahunan tertinggi tercatat di provinsi Sulawesi Barat (4,40% yoy), diikuti Maluku (4,01% yoy), dan Kep. Bangka Belitung (3,75% yoy).

Berdasarkan kelompok disagregasinya, inflasi kelompok Inti dan Volatile Food (VF) melambat di tengah meningkatnya inflasi kelompok Administered Price (AP). Inflasi inti tercatat sebesar 1,56% (yoy) pada 2021, menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar

1,60% (yoy) seiring belum kuatnya permintaan domestik sebagai dampak pandemi COVID-19, di tengah pengaruh tekanan harga global ke domestik yang terbatas. Selain itu, dampak lanjutan dari inflasi VF tercatat menurun dan dari inflasi AP terpantau terbatas, sehingga turut mengurangi tekanan inflasi pada kelompok inti. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia konsisten untuk selalu menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, inflasi VF pada 2021 mencatatkan inflasi sebesar 3,20% (yoy), menurun dari tahun 2020 sebesar 3,62% (yoy), ditopang ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, volatilitas inflasi VF tetap terjadi terutama disebabkan oleh gangguan cuaca di sentra produksi. Di sisi lain, kelompok AP mengalami inflasi sebesar 1,79% (yoy), meningkat



Grafik 1.1. Realisasi Inflasi IHK dan Sasaran Inflasi



Grafik 1.2. Inflasi IHK Spasial

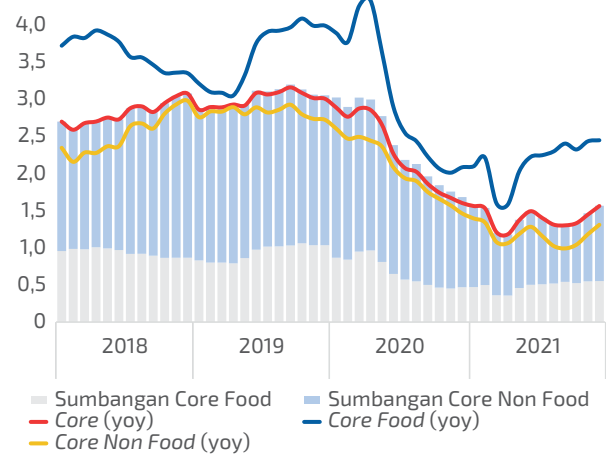
dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,25% (yoy), terutama didorong oleh perbaikan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas. Adapun inflasi aneka rokok cenderung melambat dipengaruhi oleh transmisi kenaikan tarif cukai rokok yang masih terbatas akibat daya beli masyarakat yang belum kuat. Sementara itu, inflasi komoditas energi domestik relatif stabil seiring dengan upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19 dengan meminimalkan dampak inflasi energi.

Sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun daerah terus diperkuat guna menjaga inflasi berada sesuai dengan kisaran sasarannya yaitu $3,0 \pm 1,0\%$. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis dalam pengendalian inflasi pada kegiatan *High Level Marketing* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) tanggal 11 Februari 2021 yakni: (i) Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran 3,0% - 5,0% dengan memperkuat empat pilar strategi (4K); (ii) Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021; (iii) Memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan program kerja TPIP 2021; (iv) Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan (v) Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka mendukung program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB PPKM) untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

1.1. Inflasi Inti

Realisasi inflasi inti pada tahun 2021 tercatat rendah dan menunjukkan perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Inflasi inti 2021 tercatat sebesar 1,56% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 1,60% (yoy). Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh belum kuatnya permintaan domestik sebagai dampak pandemi COVID-19, di tengah terbatasnya pengaruh tekanan harga global ke domestik. Selain itu, dampak lanjutan dari inflasi VF tercatat menurun dan dari inflasi AP terpantau terbatas sehingga mengurangi tekanan inflasi pada kelompok inti. Di sisi lain, kebijakan Bank Indonesia konsisten untuk selalu menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.

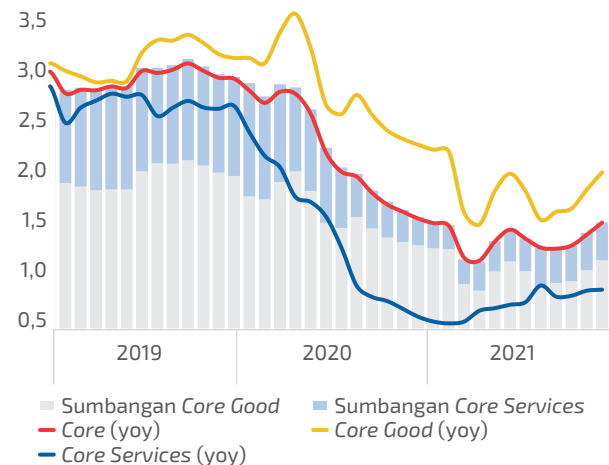
Sumb. thd Core



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3. Inflasi Inti Food dan Non-Food (Tahunan)

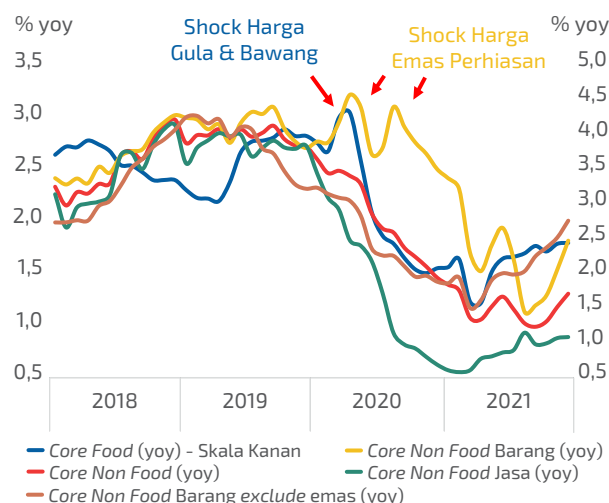
Sumb. thd Core



Sumber: BPS, diolah

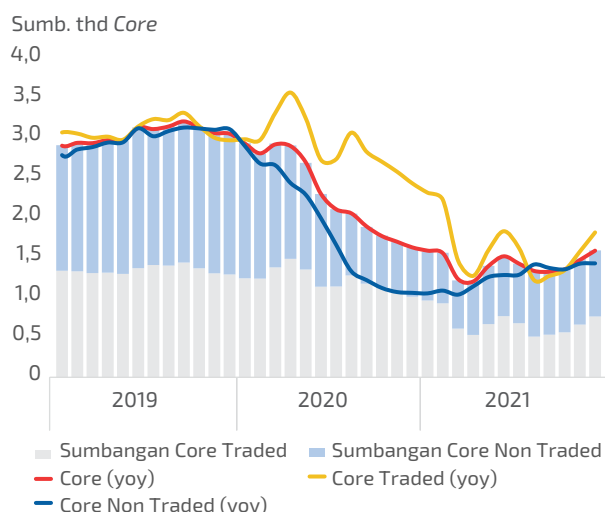
Grafik 1.4. Inflasi Inti Barang dan Jasa (Tahunan)

Belum kuatnya daya beli masyarakat berdampak pada realisasi inflasi inti yang masih rendah. PPKM level yang diterapkan oleh Pemerintah guna memperlambat penyebaran virus COVID-19 varian Delta menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat secara luas dan simultan. Pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19 tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik belum pulih sepenuhnya dan tercatat sebesar 3,69% (yoy) pada tahun 2021, meski telah meningkat dari tahun 2020 yang sebesar -2,07% (yoy). Konsumsi rumah tangga yang mempunyai pangsa yang paling dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mencatatkan pertumbuhan yang rendah sebesar 1,88% (yoy).



Sumber: BPS, diolah *inflasi 2019 menggunakan SBH 2018

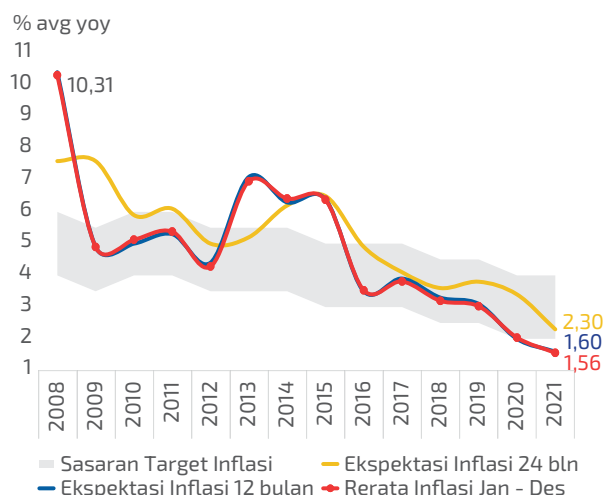
Grafik 1.5. Inflasi Inti Food, Non-Food Barang dan Jasa (Tahunan)



Sumber: BPS, diolah

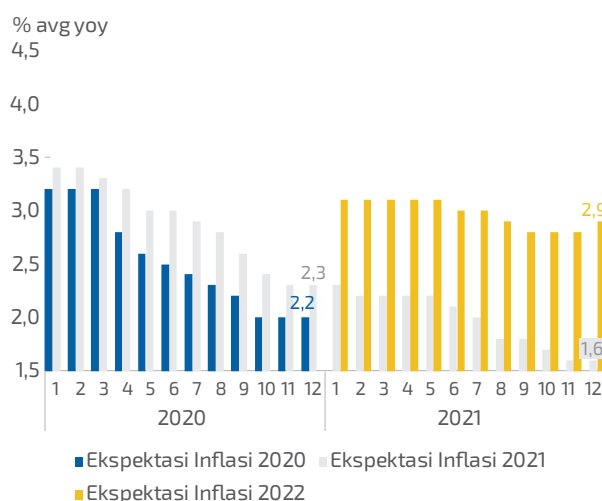
Grafik 1.6. Inflasi Inti Traded dan Non-Traded (Tahunan)

Ekspektasi inflasi domestik masih berada di bawah sasaran, sementara dampak lanjutan inflasi VF turun di tengah dampak lanjutan AP yang meningkat terbatas. Kebijakan pembatasan sosial yang masih belum sepenuhnya dicabut dan permintaan yang belum kuat menyebabkan ekspektasi masyarakat tertahan rendah. Hal ini tercermin dari hasil survei *Consensus Forecast* (CF) untuk inflasi 2021 yang dirilis pada Desember 2021 yaitu sebesar 1,60% (*average yoy*), menurun dari 2,30% (*average yoy*) dari CF inflasi 2021 yang dirilis pada Desember 2020. Upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah juga mendukung pencapaian inflasi yang rendah. Selain itu, dampak lanjutan inflasi kelompok VF tercatat menurun sehingga mengurangi tekanan inflasi pada kelompok inti, di tengah peningkatan dampak lanjutan inflasi AP walaupun masih terbatas seiring masih minimalnya transmisi tekanan harga energi global ke harga domestik. Terbatasnya dampak lanjutan dari kedua kelompok tersebut mengurangi tekanan inflasi pada kelompok inti.



Sumber: Kemenkeu dan Consensus Forecast, diolah

Grafik 1.7. Ekspektasi Inflasi dan Sasaran Inflasi

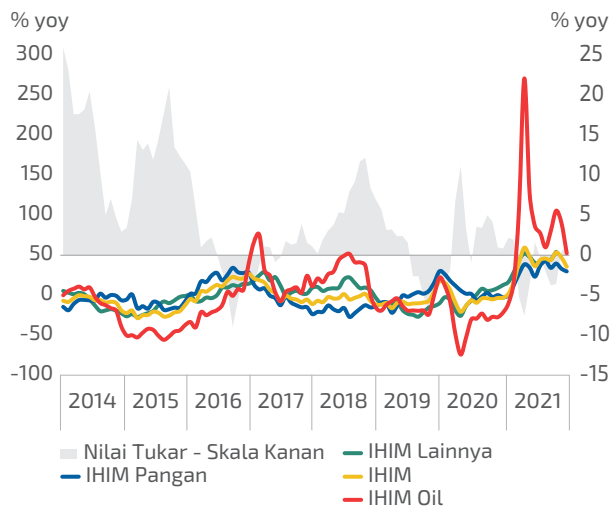


Sumber: Consensus Economics

Grafik 1.8. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast

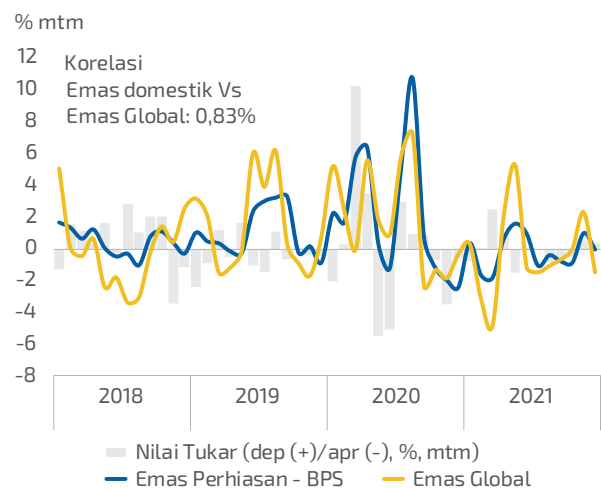
Tekanan eksternal pada 2021 terpantau meningkat, baik pada komoditas pangan, non pangan, maupun minyak dunia. Tekanan eksternal yang tinggi tercermin pada harga Indeks Harga Impor (IHIM) yang meningkat signifikan meskipun transmisinya ke harga domestik masih relatif terbatas, di tengah nilai tukar Rupiah yang terjaga sesuai dengan nilai fundamentalnya. Perekonomian global yang mulai menunjukkan perbaikan berdampak pada pulihnya permintaan sehingga menyebabkan meningkatnya harga komoditas pangan, non pangan, dan minyak dunia. Selama 2021, IHIM terpantau meningkat didorong oleh harga komoditas pangan maupun non-pangan global yang naik secara signifikan akibat permintaan global yang tinggi dan adanya gangguan pada sisi *supply*. IHIM pangan tercatat meningkat menjadi 29,48% (*avg. yoy*) pada tahun 2021, dari 4,91% (*avg. yoy*) pada tahun sebelumnya. Kenaikan IHIM pangan pada tahun 2021 didorong oleh kenaikan hampir seluruh komoditas pangan, antara lain gandum, jagung,

kedelai, gula, daging sapi, dan daging ayam. Sementara itu, IHIM nonpangan meningkat sebesar 56,83% (avg. yoy) pada tahun 2021, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang termoderasi sebesar 15,63% (avg. yoy). Kenaikan ini utamanya didorong oleh harga minyak dunia (WTI) yang meningkat 88,93% (avg. yoy) dari tahun sebelumnya. Namun demikian, inflasi emas global selama 2021 tercatat termoderasi menjadi sebesar 2,24% (yoy), dari tahun 2020 yang tumbuh sebesar 27,08% (avg. yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global yang relatif menurun pada tahun 2021, sehingga permintaan komoditas emas menjadi *safe haven aset* mengalami penurunan. Nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 relatif lebih stabil dibanding tahun 2020, meskipun ditutup terdepresiasi sebesar 1,41% (yoy), lebih tinggi dari tahun 2020 yang mengalami depresiasi sebesar 0,86% (yoy).



Sumber: Bloomberg, diolah

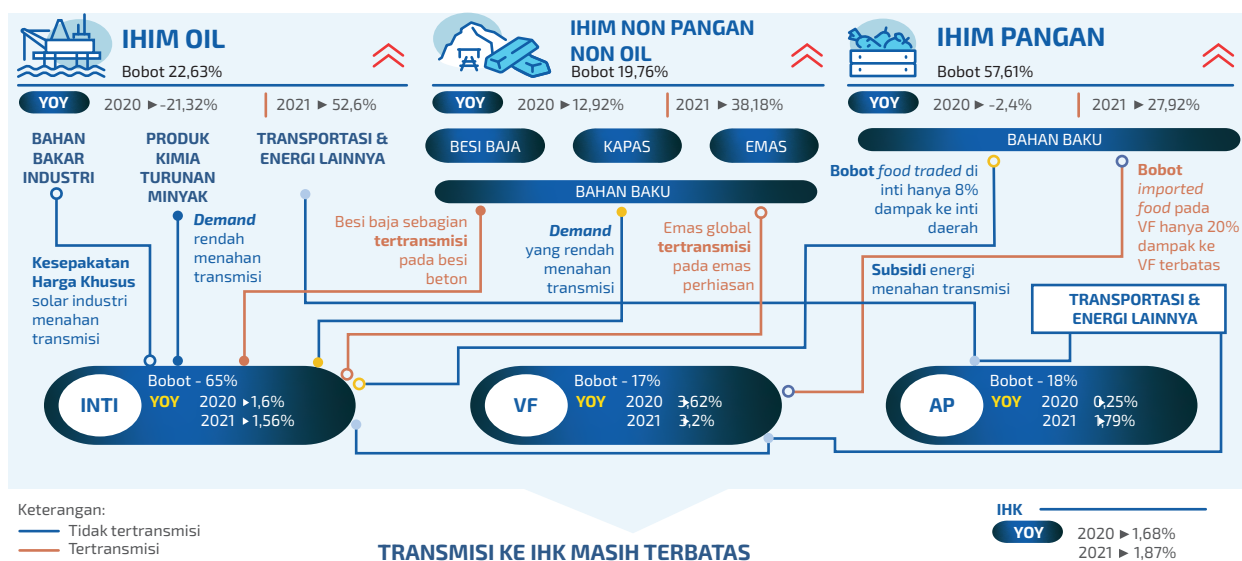
Grafik 1.9. Tekanan Eksternal – Nilai Tukar dan IHIM (Tahunan)



Sumber: BPS, Bank Indonesia

Grafik 1.10. Nilai Tukar, Inflasi Emas Perhiasan, dan Inflasi Emas Global (Bulanan)

Walaupun tekanan eksternal terpantau tinggi selama 2021, namun transmisi tekanan harga komoditas global ke harga domestik relatif terbatas. Rendahnya transmisi kenaikan harga global ke domestik tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (a) kebijakan Pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas harga energi domestik, (b) permintaan domestik yang belum kuat sehingga menahan produsen dan pedagang untuk mem-*passthrough* seluruh kenaikan harga *input* ke harga konsumen, (c) strategi produsen yang mengoptimalkan efisiensi biaya produksi di tengah kenaikan biaya *input*, dan (d) bobot serta rasio produk yang mengandung bahan impor yang tidak sebesar biaya lokal. Komoditas minyak dan turunannya memiliki peran yang sangat strategis dalam inflasi IHK mengingat porsi impor dalam biaya *inputnya* yang cukup tinggi serta bobot komoditas turunan minyak di dalam IHK yang cukup signifikan.

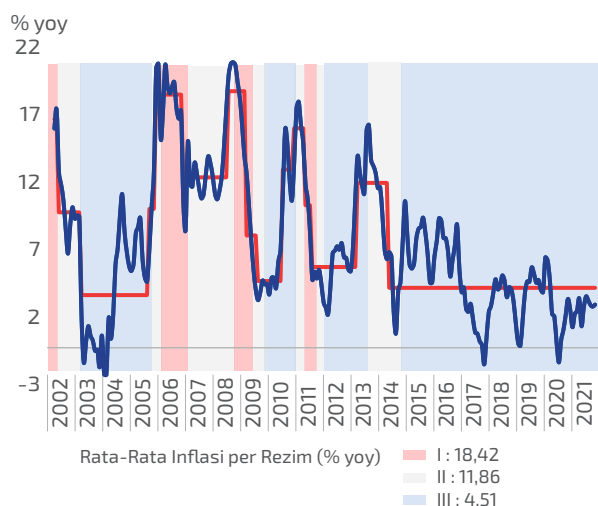


Sumber: BPS dan Bloomberg, diolah

Gambar 1.1. Transmisi Kenaikan Harga Komoditas Global terhadap Inflasi Domestik Selama 2021

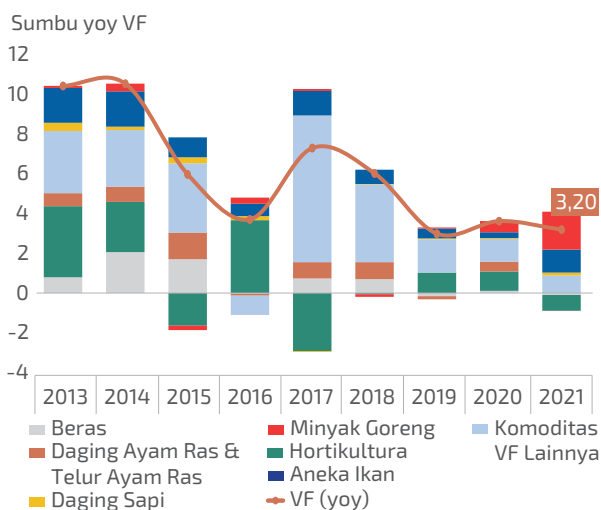
1.2. Inflasi *Volatile Food*

Capaian inflasi kelompok *Volatile Food* 2021 terjaga didukung oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah permintaan domestik yang masih terbatas. Inflasi kelompok *volatile food* pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Perkembangan ini dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan yang terjaga, didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, disparitas harga antarwaktu masih menjadi tantangan, khususnya di awal dan akhir tahun, terutama disebabkan oleh gangguan cuaca di sentra produksi yang memengaruhi jumlah produksi serta distribusinya.



Sumber: BPS, diolah

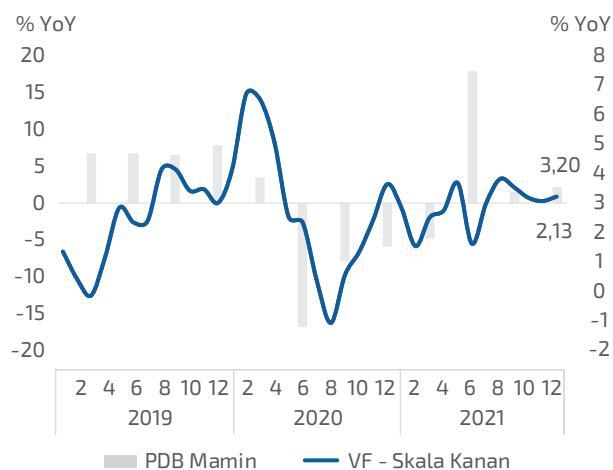
Grafik 1.11. Perkembangan Rezim Inflasi VF



Sumber: BPS, diolah

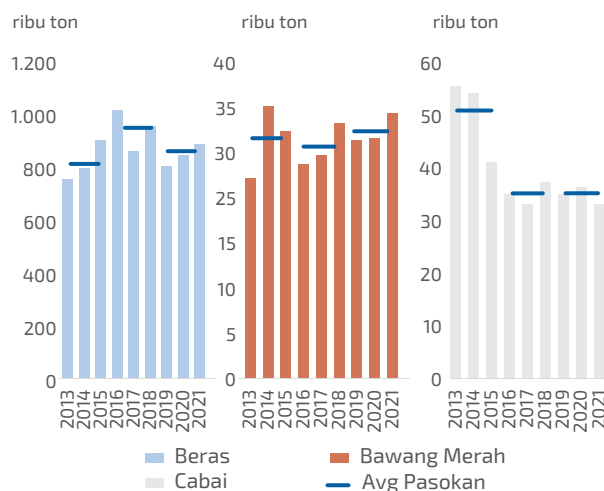
Grafik 1.12. Sumbangan inflasi Komoditas VF

Permintaan menunjukkan pemulihan seiring dengan pelonggaran bertahap aturan PPKM, meski relatif masih terbatas. Permintaan terpantau meningkat temporer khususnya pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur panjang, namun secara umum masih terbatas karena aturan PPKM yang masih ketat. Pemulihan permintaan terkonfirmasi dari indeks belanja yang dihimpun oleh Mandiri Institute, tercermin dari indeks nilai belanja dan indeks frekuensi belanja yang menunjukkan peningkatan, yakni masing-masing menjadi sebesar 132,8% dan 150,0% dari masing-masing sebesar 109,7% dan 120,1% pada tahun sebelumnya. Secara spasial, indeks belanja terpantau meningkat di hampir seluruh wilayah, termasuk di Balinusra meskipun dalam level yang rendah dibandingkan wilayah lainnya (59,5%). Di sisi lain, jumlah pasokan relatif stabil sehingga turut menahan laju inflasi VF, didukung oleh kondisi cuaca yang cukup kondusif walaupun cenderung basah, sehingga tidak terlalu mengganggu proses produksi pertanian khususnya bahan pangan.



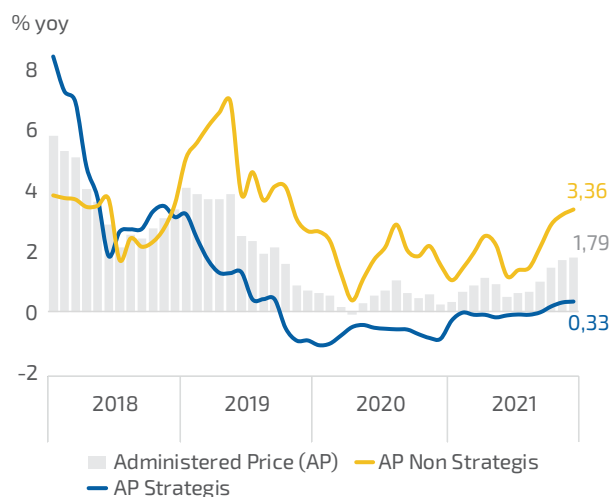
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.13. Pertumbuhan Jasa Mamin dan Inflasi VF

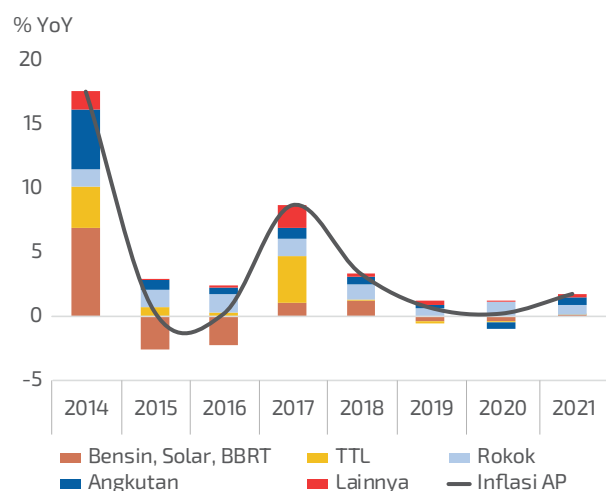


Sumber: KPwDKI

Grafik 1.14. Pasokan di Pasar Induk Kramat Jati



Grafik 1.17. Perkembangan Inflasi AP



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.18. Sumbangan Inflasi AP

Perbaikan mobilitas masyarakat pascapelonggaran PPKM mendorong kenaikan inflasi aneka angkutan, terutama angkutan udara. Pada paruh kedua tahun 2021, data kasus positif COVID-19 menunjukkan tren penurunan di hampir seluruh wilayah, yang disusul dengan kebijakan penurunan level pembatasan sosial sehingga mobilitas masyarakat perlahan mulai membaik. Minat masyarakat untuk bepergian dalam waktu singkat (*short trip*), perjalanan dinas maupun bisnis menunjukkan peningkatan, sehingga mendorong maskapai menaikkan harga tiketnya menjauhi tarif batas bawah. Peningkatan permintaan angkutan sebagai akibat kenaikan mobilitas masyarakat tercermin dari inflasi jasa angkutan udara yang mencapai sebesar 9,84% (yoy) pada Desember 2021, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami deflasi 15,36% (yoy). Kenaikan jumlah penumpang angkutan udara terutama menjelang akhir tahun antara lain didorong oleh beberapa perhelatan beberapa event besar, yaitu Pekan

Olahraga Nasional (PON) Papua pada bulan Oktober dan event *World Superbike* (WSBK) Mandalika pada bulan November. Beberapa event tersebut telah mendorong kenaikan frekuensi penerbangan penumpang dan kargo hingga lebih dari 40% dibandingkan periode normal serta periode HBKN Idulfitri maupun Nataru.

Inflasi aneka rokok melambat seiring daya beli masyarakat yang belum kuat. Capaian inflasi rokok (komposit) pada Desember 2021 tercatat sebesar 4,58% (yoy), lebih rendah dibandingkan 7,66% (yoy) pada Desember 2020. Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai rokok tahun 2021 (rerata tertimbang) yang sebesar 12,5%, atau lebih rendah dibandingkan 23,0% pada tahun 2020. Selain itu, daya beli masyarakat juga masih belum pulih sepenuhnya sehingga produsen masih mentransmisikan kenaikan cukai secara gradual dan terbatas. Produsen rokok masih fokus pada upaya menjaga *market share* dan meningkatkan penjualan dibandingkan margin yang tinggi. Namun demikian, inflasi rokok terpantau mulai meningkat terbatas menjelang akhir tahun, didorong oleh perbaikan mobilitas dan momen HBKN Nataru.

Inflasi komoditas energi masih terbatas didukung upaya Pemerintah menjaga kestabilan harga energi domestik. Komoditas energi (komposit) mengalami inflasi sebesar 0,33% (yoy) pada 2021, lebih tinggi dibandingkan deflasi 0,90% pada tahun sebelumnya. Perkembangan harga energi selama 2021 lebih dipengaruhi oleh inflasi komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Khusus BBM nonsubsidi, terdapat penyesuaian harga pada bensin nonsubsidi jenis Pertamina Turbo dan Pertamina Dex pada pertengahan September 2021, namun dampaknya terhadap inflasi relatif minimal mengingat pangsa konsumsinya yang terbatas. Sementara itu, Pemerintah juga melakukan penyesuaian harga BBRT nonsubsidi pada akhir Desember 2021, namun dampaknya belum sepenuhnya tercatat pada realisasi

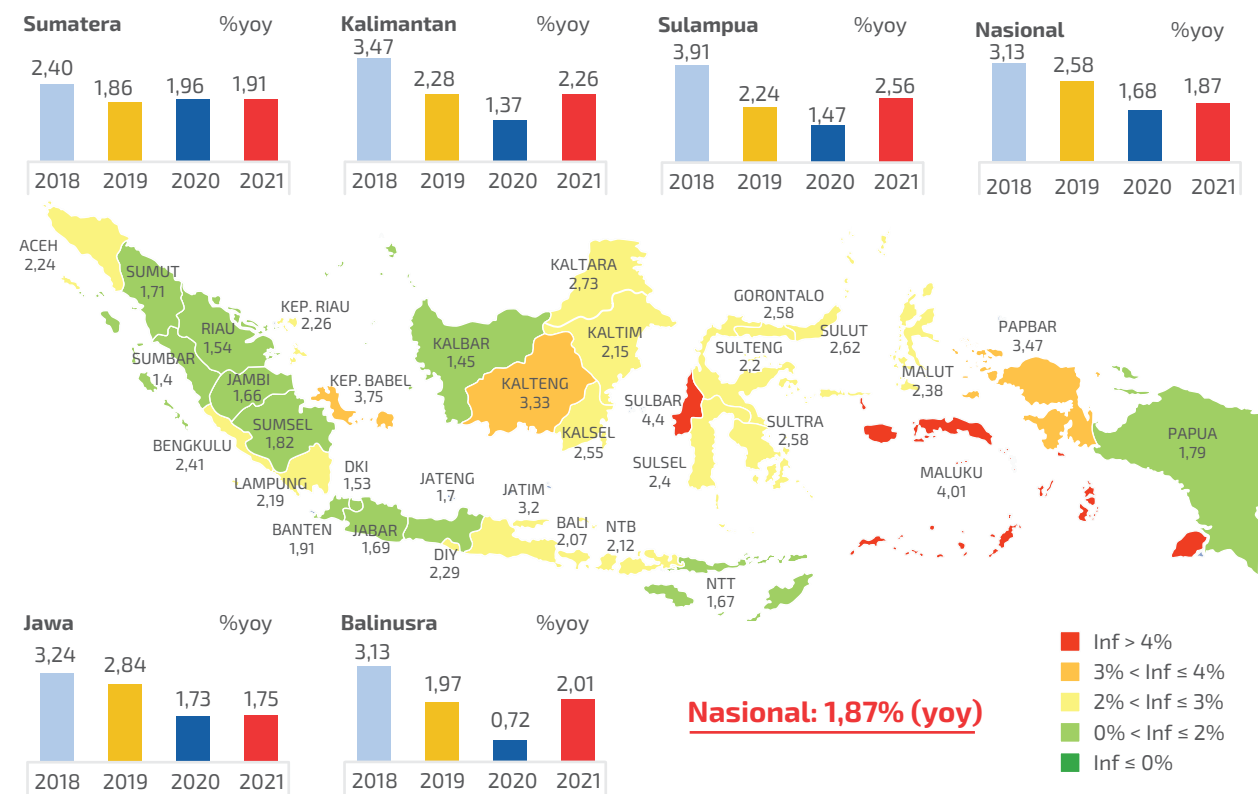
1.4. Inflasi Regional

Inflasi IHK di seluruh wilayah pada 2021 tercatat rendah dan berada di bawah sasaran inflasi 3,0%±1,0%. Wilayah Jawa kembali mencatat inflasi tahunan terendah yakni sebesar 1,75% (yoy), diikuti Sumatera (1,91% yoy), Balinusra (2,01% yoy), Kalimantan (2,26% yoy), dan Sulampua (2,56%, yoy). Meskipun masih dalam level yang rendah, namun inflasi di mayoritas wilayah kecuali Sumatera terpantau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020. Berdasarkan daerahnya, realisasi inflasi tahunan tertinggi tercatat di provinsi Sulawesi Barat (4,40%, yoy), diikuti Maluku (4,01%, yoy), dan Kep. Bangka Belitung (3,75%,

yoy). Berdasarkan disagregasinya, inflasi inti tercatat masih rendah dan khusus di wilayah Jawa dan Sulampua mengalami penurunan. Perlambatan inflasi VF terjadi di Jawa dan Sumatera, namun di Balinusra, Kalimantan, dan Sulampua tercatat meningkat di atas 3,0% (yoy). Sementara itu, inflasi AP terpantau meningkat di seluruh wilayah di Indonesia.

Secara umum, inflasi inti yang masih rendah disebabkan oleh belum kuatnya permintaan domestik sebagai dampak pandemi COVID-19, tercermin dari realisasi konsumsi rumah tangga dalam PDB di semua wilayah yang masih di bawah level pra pandemi COVID-19. Selain itu, capaian inflasi inti yang rendah juga sebagai dampak dari transmisi harga global ke domestik yang terbatas, dampak lanjutan inflasi VF yang menurun,

serta kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang konsisten menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau sesuai sasaran dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Perlambatan inflasi VF dipengaruhi oleh terjaganya ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan di daerah, didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sementara itu, inflasi AP meningkat didorong oleh perbaikan mobilitas masyarakat di daerah, transmisi kenaikan tarif cukai rokok, dan kebijakan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi domestik untuk menjaga daya beli masyarakat selama pandemi COVID-19. tercukupinya pasokan dan terjaganya distribusi berbagai bahan pangan di berbagai wilayah.



Sumber: BPS

Gambar 1.2. Peta Inflasi Daerah



Bab II

Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2021

Sesuai dengan kesepakatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada tanggal 11 Februari 2021, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 diarahkan untuk mendukung upaya menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$. Kebijakan tersebut mencakup lima langkah strategis, yaitu (i) Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran $3,0\%$ - $5,0\%$ dengan memperkuat empat pilar strategi (4K); (ii) Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021; (iii) Memperkuat sinergi antar Kementerian/ Lembaga dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka menyukseskan program kerja TPIP 2021; (iv) Memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi, serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam; dan (v) Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB PPKM) untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

2.1. Kebijakan yang Telah Diambil Terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2021

2.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Penyebaran COVID-19 varian Delta pada 2021 telah menekan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat sehingga mendorong dilakukannya sejumlah langkah kebijakan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional. Langkah cepat Pemerintah bersama berbagai elemen bangsa dan dukungan masyarakat telah mampu mengendalikan penyebaran varian Delta yang mencapai puncaknya pada Juli-Agustus 2021. Akselerasi vaksinasi yang ditempuh Pemerintah menjadi faktor penting dalam pengendalian pandemi khususnya dari serangan varian Delta. Penguatan penanganan dan pengendalian COVID-19, termasuk PPKM berbagai level secara ketat disertai dengan peningkatan kapasitas kesehatan, juga berkontribusi dalam pengendalian lebih jauh penyebaran varian Delta. Sinergi kebijakan nasional dalam akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan COVID-19 dengan pembukaan sektor-sektor prioritas menjadi *game changer* dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan menjaga berlanjutnya perbaikan perekonomian nasional. Sejalan dengan meredanya penyebaran varian Delta, mobilitas dan aktivitas ekonomi kembali meningkat sehingga mendukung proses pemulihan ekonomi.

Bank Indonesia berkomitmen mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK. Dengan mempertimbangkan perekonomian Indonesia pada 2021 yang berada di bawah lintasan optimum siklus bisnis dan siklus keuangan, Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif dengan memanfaatkan ruang pelonggaran yang ada. Di kebijakan moneter, Bank Indonesia melanjutkan stimulus moneter dengan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong proses pemulihan ekonomi. Penguatan strategi operasi moneter terus dilakukan untuk memperkuat *stance* kebijakan moneter akomodatif. Setelah menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 5 (lima) kali sejak 2020, Bank Indonesia kembali menurunkan BI7DRR pada Februari 2021 menjadi 3,50%, terendah sepanjang sejarah. Pada periode selanjutnya hingga akhir 2021, Bank Indonesia tetap mempertahankan BI7DRR sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-

langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah didukung berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, dan terjaganya pasokan valas domestik.

Bank Indonesia mendukung penuh upaya Pemerintah dan berpartisipasi dalam pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk akselerasi vaksinasi maupun penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi COVID-19. Partisipasi dilakukan dengan memperkuat peran Bank Indonesia untuk pendanaan APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian SBN secara langsung (*private placement*) sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 (KB III). Komitmen pembelian SBN tersebut sebesar Rp215 triliun untuk APBN tahun 2021 dan sebesar Rp224 triliun untuk APBN tahun 2022, dengan suku bunga rendah sebesar Bank Indonesia *Reverse Repo Rate* tenor 3 bulan. Partisipasi Bank Indonesia juga berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia. Bank Indonesia melanjutkan komitmen pembelian SBN untuk pembiayaan APBN 2021. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari: (i) pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (KB I) sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember 2022, dan (ii) *private placement* sebesar Rp215 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 sesuai KB III.

Ekspektasi inflasi terjangkar dalam kisaran sasarannya didukung kebijakan komunikasi efektif oleh Bank Indonesia. Untuk meminimalisasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan domestik, khususnya di masa penyebaran COVID-19 varian Delta, Bank Indonesia memperkuat intensitas komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri, secara terbuka baik melalui konferensi pers maupun berbagai media komunikasi lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi kebijakan dan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi agar sesuai dengan target, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil Bank Indonesia guna mempertahankan stabilitas perekonomian di masa krisis. Strategi tersebut berhasil menjaga ekspektasi inflasi tetap rendah dan terkendali.

Ekspektasi inflasi 2021 berdasarkan *Consensus Forecast*, yang merupakan ekspektasi inflasi dari sejumlah ahli ekonomi dari berbagai *investment house* terkemuka, tercatat sebesar 1,6% (*average yoy*).

2.1.2. Kebijakan Fiskal

Dalam mendukung pengendalian inflasi nasional, Pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi yang semakin efektif dan efisien melalui perbaikan ketepatan sasaran dalam rangka menjaga keterjangkauan harga. Alokasi belanja subsidi APBN 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan alokasi di 2020. Subsidi energi telah dialokasikan sebesar Rp110,5 triliun dalam bentuk pemberian subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik golongan tarif tertentu. Subsidi non-energi juga telah dialokasikan sebesar Rp64,8 triliun untuk pupuk, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi bantuan uang muka perumahan, dan subsidi selisih bunga kredit perumahan. Penyaluran subsidi pupuk dilaksanakan dengan mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas serta penyaluran Kartu Tani dan disesuaikan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK). Sementara itu, subsidi bantuan uang muka dan subsidi selisih bunga kredit perumahan diberikan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menjangkau harga rumah dan memiliki hunian sendiri.

Belanja bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk lebih tepat sasaran dan produktif untuk menjangkau penduduk, baik kelas bawah maupun menengah, yang terdampak pandemi. Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp408,8 triliun untuk perlindungan sosial pada APBN 2021. Belanja perlindungan sosial ini di antaranya disalurkan melalui Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako 18,8 juta KPM, bantuan sosial tunai 10 juta KPM, subsidi listrik 32,8 juta rumah tangga, prakerja 5,6 juta orang pekerja informal/pelaku usaha mikro dan kecil, siswa menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 20,1 juta orang, dan mahasiswa memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah 1,2 juta orang.

Selain pemberian perlindungan sosial secara langsung, Pemerintah bekerja sama dengan pemberi kerja, khususnya sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk membantu ketahanan usaha sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, Pemerintah memberikan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 12,8 juta usaha, pemberian subsidi bunga KUR untuk 7,44 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,2 juta debitur, pemberian insentif pajak berupa pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) PPh 21 untuk 87 ribu pemberi kerja, dan

DTP PPh Final UMKM untuk 134 ribu UMKM. Pemerintah juga memberikan bantuan pajak untuk korporasi berupa pembebasan PPh 22 impor, pengurangan pengangsuran PPh 25 dan pengembalian pendahuluan PPN.

2.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan pangan Pemerintah dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga di sepanjang rantai pasok komoditas pangan pokok. Pada tahun 2021, penugasan ini dilaksanakan Perum BULOG untuk komoditas beras, jagung, daging, dan gula baik dengan tambahan anggaran pemerintah maupun secara mekanisme bisnis sebagaimana pasar bekerja. Penugasan pengelolaan pangan pokok, selain menjaga stabilitas harga, juga memberikan dampak positif bagi perekonomian. Bagi produsen, pengelolaan pangan oleh Pemerintah melalui BULOG dapat menjadi jaminan harga dan pasar atas produksinya. Bagi pelaku pasar di logistik, penugasan pengelolaan pangan pokok dapat memberikan peluang pasar atas jasa logistiknya, di samping tersebar dan tersimpannya pangan dengan baik. Sementara konsumen juga diuntungkan karena bisa mendapatkan harga yang terjangkau pada pasokan yang cukup. Dengan demikian, pengelolaan pangan pokok tersebut akan menumbuhkan nilai ekonomi tersendiri di masing-masing titik mata rantai.

Pelaksanaan penugasan pengelolaan pangan kepada BULOG juga memberikan dampak psikologis kepada masyarakat berupa ketenangan beraktifitas terhadap kondisi pasar tanpa adanya lonjakan (*rush*) permintaan pangan di pasar. Dengan demikian harga pangan akan selalu terjangkau dan memperkecil potensi permainan pasokan dan harga pangan yang berdampak secara sosial dan keamanan. Pengelolaan pangan yang ditugaskan kepada Perum BULOG bukan hanya menjadi penjaga pemenuhan pangan masyarakat namun juga menjadi salah satu pendukung pertumbuhan perekonomian dan stabilitas keamanan Indonesia. Memahami pentingnya pengelolaan pangan pokok oleh Pemerintah tersebut, pengelolaan pangan merupakan hal mutlak yang wajib diberikan secara berkelanjutan demi kehadiran manfaat yang juga berkelanjutan kepada masyarakat dan Pemerintah.

Pada kebijakan pangan di sisi hulu, Perum BULOG melakukan penyerapan pangan pokok pada jumlah yang dapat menjaga harga petani maupun untuk kecukupan stok nasional. Perum BULOG menyerap gabah/beras dalam negeri untuk menjaga angka kecukupan stok CBP dan kebutuhan korporasi. Sedangkan importasi hanya dilakukan pada saat kondisi yang mendesak yaitu ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Pada tahun 2021, pengadaan komoditi beras oleh BULOG

untuk memenuhi kebutuhan nasional terutama untuk menjaga angka aman stok CBP pada level 1-1,5 juta ton, merupakan sepenuhnya hasil pengadaan dalam negeri.

Selain mengelola pangan pokok dalam kerangka penugasan Pemerintah, Perum BULOG juga melakukan pengelolaan pangan melalui penyerapan hasil produksi dan penjualan dengan mekanisme komersial korporasi. Pengelolaan pangan dengan mekanisme komersial korporasi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya harga jatuh terutama pada musim panen. Pengelolaan secara komersial korporasi disesuaikan dengan kebutuhan penjualan dan tidak untuk kebutuhan *buffer stock*. Dengan menjaga stok nasional melalui penyerapan gabah/beras petani serta menjaga penyaluran dan penjualan yang berkelanjutan, maka kegiatan korporasi Perum BULOG berperan besar dalam meningkatkan aktivitas perekonomian pangan baik di di tingkat hulu dan hilir.

Pada sisi hilir, untuk beras, Perum BULOG melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) di pasar pencatatan BPS dan pasar-pasar lainnya. Program KPSH ini menjadi andalan dalam rangka meredam fluktuasi harga beras dan inflasi. Nilai andil beras terhadap inflasi selama 2021 dapat terkendali dengan baik dengan nilai yang relatif kecil. Selain pelaksanaan KPSH, dalam upaya meringankan beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Pemerintah menetapkan Perum BULOG sebagai pelaksana penyaluran program Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) sebanyak 288.000 ton kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program BB-PPKM 2021 memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah yang sekaligus menjadi salah satu *outlet* untuk penyiapan *space* gudang dalam penyerapan gabah beras petani dalam negeri.

Di tahun 2021 kebijakan stabilisasi harga pangan tidak hanya dilakukan untuk komoditi beras tetapi pada komoditi lainnya, yaitu jagung. Upaya yang ditempuh Pemerintah yaitu menugaskan kepada Perum BULOG untuk melakukan penyediaan pasokan dan mendistribusikan jagung sebanyak 30.000 ton kepada Koperasi Peternak Sasaran (KPS). Kebutuhan penyiapan pasokan jagung berasal dari produksi jagung dalam negeri dengan harga pasar yang memberikan keuntungan bagi petani, dan menyalurkan jagung dengan harga bersubsidi guna memenuhi kebutuhan industri pakan ternak. Dampak selanjutnya adalah ketersediaan pangan pokok turunan yaitu daging ayam dan telur ayam ras yang terjaga stabilitas harganya di tingkat peternak maupun konsumen.

Pada tahun 2021, Perum BULOG juga melaksanakan pengadaan komoditi pangan yang ditugaskan untuk penyiapan pasokan melalui importasi yaitu daging kerbau. Kuota impor sebanyak 80.000 ton yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, terealisasi sebanyak 79.996 ton (99,99%). Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan importasi daging kerbau adalah waktu pengiriman daging kerbau impor yang menjadi lebih lama karena adanya kepadatan/kongesti di pelabuhan transit. Upaya yang dilakukan yaitu berkorespondensi aktif kepada *supplier* daging kerbau India agar mengatur pengiriman jadwal pengapalan tercepat yang tersedia. Penyiapan pasokan daging kerbau beku tersebut telah berhasil mendukung harga daging sapi yang relatif stabil sepanjang tahun 2021.

Selain berbagai kebijakan pengelolaan pangan pokok tersebut, salah satu kebijakan pangan lain yang terus diperkuat adalah meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Sasaran kinerja kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian yang dituangkan dalam renstra Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian 2020 – 2024 adalah meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, dengan indikator kinerja berupa tingkat pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, dengan target sebesar 56,95% pada tahun 2021. Adapun realisasi pada 2021 tercatat sebesar 70,05%, atau 123% dari targetnya, dengan rincian: (i) Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses pembiayaan melalui kredit program (minimal 1.250 orang) dan fasilitas pembiayaan (minimal 300 orang) yang tercapai 123% dari target; (ii) Jumlah pelaku usaha pertanian yang mendapatkan akses permodalan dari *private sector* (minimal 175 orang) yang tercapai sebesar 158% dari target; dan (iii) Rasio lahan pertanian dan ternak yang terlindungi asuransi pertanian terhadap total luas lahan pertanian dan jumlah ternak (minimal 13,90%) yang tercapai 100% dari target.

2.1.4. Kebijakan Energi

Kebijakan energi nasional 2021 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama dalam penentuan pengambilan kebijakan energi domestik. Meskipun harga komoditas global mulai menunjukkan tren peningkatan sejak awal 2021, harga komoditas energi domestik dijaga di tingkat yang tetap untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Harga minyak mentah jenis Brent tercatat mencapai 84 dolar AS per barel, sementara harga batu bara

tercatat mencapai 215 dolar AS per metrik di November 2021. Sebagai dampak kenaikan harga minyak mentah, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga pada LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Namun untuk LPG subsidi 3 kg, harga tidak mengalami kenaikan sebagai wujud dukungan APBN untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk menciptakan keterjangkauan harga energi, Pemerintah memberikan stimulus, terutama pada sektor ketenagalistrikan. Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah melanjutkan pemberian stimulus melalui diskon tarif listrik. Stimulus tersebut diberikan untuk pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA bersubsidi serta industri. Hingga Maret 2021, diskon tarif diberikan hingga 100 persen untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. Namun mulai April 2021, diskon listrik diberikan sebesar 50 persen untuk pelanggan 450 VA, diskon 25 persen untuk pelanggan 900 VA, dan pembebasan biaya abonemen sebesar 50 persen untuk pelanggan industri, bisnis, dan sosial. Pemberian stimulus ini awalnya direncanakan hingga Juni 2021 namun diperpanjang hingga Desember 2021 untuk terus dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Selain itu melalui mekanisme kompensasi, Pemerintah mendorong PT PLN untuk tidak menaikkan tarif listrik di tengah kenaikan harga batu bara global.

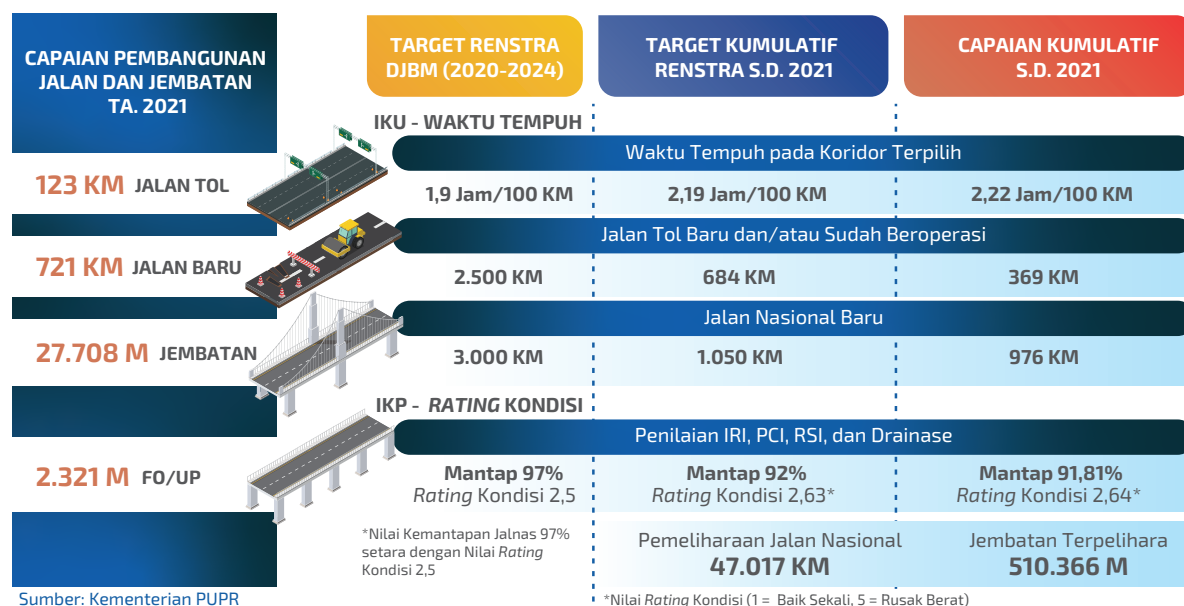
Kinerja sektor energi tercatat lebih baik di tahun 2021 untuk mendukung ketersediaan pasokan energi nasional. Realisasi investasi sektor energi di tahun 2021 mencapai 28,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 26,3 miliar dolar AS. Realisasi investasi terbesar berada di subsektor minyak dan gas bumi sebesar 15,9 dolar AS. Meskipun demikian, realisasi *lifting* minyak dan gas bumi pada 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Pemerintah berusaha memperbaiki *terms and conditions* untuk blok *existing* dan meningkatkan minat investasi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 199 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, pembangunan jargas (jaringan gas kota) terus dilanjutkan, sehingga pada 2021, 799.000 rumah tangga telah tersambung jargas. Pada 2021, lokasi BBM satu harga juga tercatat kumulatif sebanyak 331 lokasi, yaitu terdapat penambahan sebanyak 78 lokasi di 2021, terbanyak di Kawasan Maluku dan Papua. Di sisi ketenagalistrikan, kapasitas pembangkit listrik terpasang juga terus meningkat, baik melalui pembangkit

listrik konvensional maupun energi baru terbarukan (EBT). Rasio elektrifikasi nasional tahun 2021 mencapai 99,45 persen dan diharapkan akan mencapai 100 persen di tahun 2022.

2.1.5. Kebijakan Konektivitas

Konektivitas transportasi masih menjadi prioritas dan perlu terus diperkuat untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah. Penyelesaian pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional terus diakselerasi oleh Pemerintah demi mendorong tercapainya pemerataan dan kelancaran konektivitas. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mempermudah pelaksanaan transformasi ekonomi, mengingat ketersediaan infrastruktur konektivitas akan dapat menghubungkan antartitik pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu kunci untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat melemah akibat pandemi COVID-19. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur menjadi motor penggerak ekonomi dari sisi permintaan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi, perbaikan arus barang dan jasa sehingga tercipta efisiensi ekonomi.

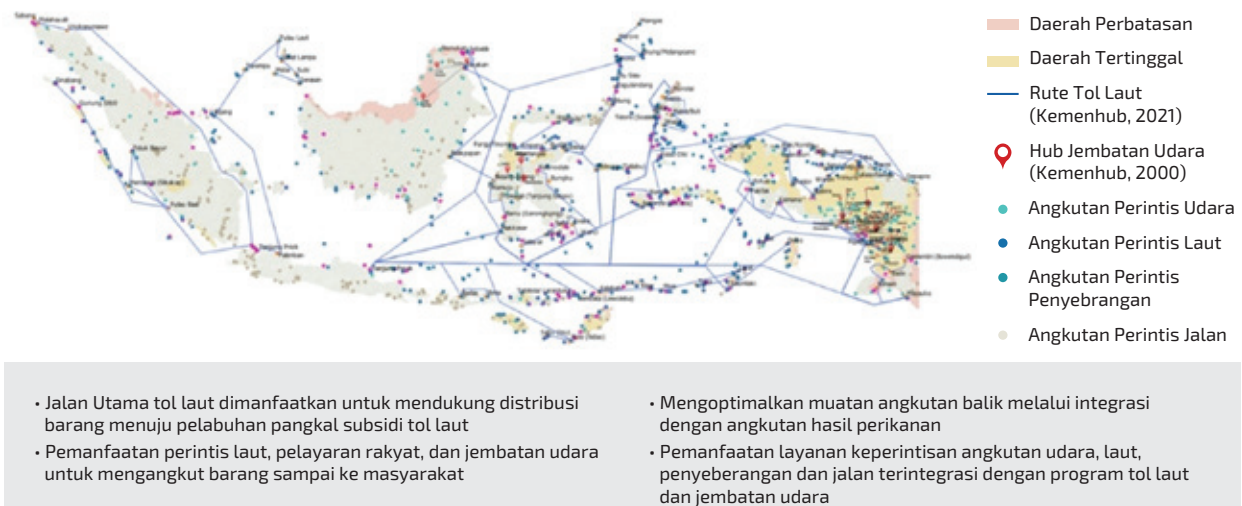
Peningkatan kuantitas serta kualitas konektivitas terus diupayakan oleh Pemerintah guna mendukung kelancaran distribusi. Pemerintah telah melakukan pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah telah melakukan pembangunan bendungan dengan perkembangan 79% dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan; jaringan irigasi dengan progres pembangunan 89% dari target 600 km serta rehabilitasi 87% dari target 3.900 km; jalan dengan progres pembangunan 87% dari target 869,01 km serta preservasi 91% dari target 64.176,44 km; jalur kereta api dengan progress 75% dari target 216,84 km; serta jembatan dengan progres pembangunan 88% dari target 31.470,48 m serta preservasi 91% dari target 526.532,97 m. Di samping itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan 124,95 km pembangunan jalan tol, di antaranya terdiri dari Jalan Tol Balikpapan – Samarinda, 6 ruas Tol DKI, Jalan Tol Serang – Panimbang, dan Jalan Tol Cibitung – Cilincing. Dengan berbagai pembangunan tersebut, dalam dua tahun RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Bina Marga telah membangun total 976 km jalan nasional baru dan 369 km jalan tol.



Gambar 2.1. Capaian Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2021

Konektivitas yang baik diharapkan dapat menopang perekonomian nasional, utamanya jalur utama logistik dan meningkatkan aksesibilitas daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya ini difokuskan melalui pembangunan jaringan jalan nasional, pembangunan jalan tol, interkoneksi bandara, hingga optimalisasi peti kemas. Pada tahun 2020-2024 pembangunan jalan nasional baru diupayakan untuk meningkatkan konektivitas daerah 3T. Penguatan konektivitas transportasi udara diupayakan melalui program pembangunan bandara baru dalam rangka percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, konektivitas laut diarahkan melalui meningkatkan produktivitas peti kemas melalui *Integrated Port Network* (IPN). Selanjutnya, pengembangan jaringan kereta api diarahkan melalui peningkatan angkutan penumpang antarkota khususnya kota-kota besar, pengembangan angkutan perkotaan pada jaringan yang berada di kawasan metropolitan, serta pengembangan angkutan logistik. Di samping itu, dilakukan juga pengembangan transportasi multimoda dan perkotaan, penyediaan dana *Public Service Obligation* (PSO), dan pemberian subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial. Implementasi peningkatan konektivitas didorong melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan memanfaatkan pendanaan kreatif (*creative financing*), baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun alternatif pendanaan lainnya.

Pembangunan konektivitas diarahkan melalui penyediaan layanan keperintisan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di daerah 3T. Untuk mendukung kelancaran distribusi sektor angkutan jalan, layanan perintis angkutan jalan ditingkatkan dari 101 rute pada tahun 2005 menjadi 310 rute pada tahun 2019 dan ditargetkan mencapai 340 rute pada tahun 2024. Penguatan sektor penyebrangan dilakukan dengan mendorong peningkatan layanan keperintisan angkutan penyebrangan dari 65 rute pada tahun 2005 menjadi 213 rute pada tahun 2019 dan diperkirakan mencapai 335 rute pada tahun 2024. Penyelenggaraan subsidi angkutan udara perintis ditingkatkan dari tahun 2019 sebanyak 190 rute pada tahun 2019 menjadi 116 rute pada tahun 2024. Pada tahun 2021, sebanyak 73 trayek perintis dioperasikan, jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 113 trayek pada tahun 2024. Untuk mengurangi kesenjangan harga di wilayah 3T Pemerintah menyelenggarakan program tol laut yang disinergikan dengan program jembatan udara. Peta Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam upaya penurunan disparitas harga pada Gambar 2.2. Pada tahun 2021 penyediaan subsidi keperintisan berkontribusi mendukung kelancaran distribusi logistik dan menopang pemulihan ekonomi melalui pemberian layanan angkutan keperintisan di kawasan pariwisata prioritas.



Penurunan Harga Bahan Pokok Subsidi di Tol Laut dan Jembatan Udara (Kemendag, 2018)

KEP. NATUNA Beras Tol Laut: Rp. 12.000/Kg Non Tol Laut: Rp. 13.000/Kg 7,69%	P. MOROTAI Beras Tol Laut: Rp. 10.600/Kg Non Tol Laut: Rp. 11.400/Kg 7,02%	BIAK NUMFOR Beras Tol Laut: Rp. 12.000/Kg Non Tol Laut: Rp. 13.000/Kg 7,69%
Gula Tol Laut: Rp. 12.500/Kg Non Tol Laut: Rp. 13.000/Kg 3,85%	Gula Tol Laut: Rp. 11.400/Kg Non Tol Laut: Rp. 12.000/Kg 5%	Gula Tol Laut: Rp. 18.000/Kg Non Tol Laut: Rp. 20.000/Kg 10%
Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 14.000/Lt Non Tol Laut: Rp. 16.000/Lt 12,5%	Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 14.500/Lt Non Tol Laut: Rp. 16.000/Lt 9,38%	Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 15.000/Lt Non Tol Laut: Rp. 16.000/Lt 6,25%
BEOGA Beras Tol Laut: Rp. 19.000/Kg Non Tol Laut: Rp. 50.000/Kg 62%	WAMENAJAYAWIJAYA Beras Tol Laut: Rp. 17.600/Kg Non Tol Laut: Rp. 25.000/Kg 30%	
Gula Tol Laut: Rp. 23.000/Kg Non Tol Laut: Rp. 46.150/Kg 50%	Gula Tol Laut: Rp. 20.000/Kg Non Tol Laut: Rp. 24.000/Kg 17%	
Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 18.000/Lt Non Tol Laut: Rp. 50.000/Lt 64%	Minyak Goreng Tol Laut: Rp. 22.500/Lt Non Tol Laut: Rp. 56.600/Lt 60%	

Sumber: Kemendagri

Gambar 2.2. Program Tol Laut dan Jembatan Udara dalam Upaya Penurunan Disparitas Harga

Untuk membiayai berbagai proyek/kegiatan prioritas untuk menekan disparitas harga antarwilayah di Indonesia, Pemerintah telah memiliki instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Proyek. Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan bermanfaat secara nyata kepada masyarakat, antara lain infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan *double track* KA selatan Jawa; pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi (pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura – Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan); serta pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.

2.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021 kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Program Kartu Prakerja dilanjutkan dengan desain “semi-bantuan sosial” bagi 5.932.867 orang penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Bantuan tersebut disalurkan untuk pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan untuk membantu biaya hidup dan mencari pekerjaan. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan pemberian Bantuan Subsidi Upah/gaji (BSU) bagi sekitar 7.399.139 pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun atau sebesar 85,43% dari total anggaran BSU. Pemerintah memberikan perlindungan

bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan yang layak dengan menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta memberikan kemudahan dengan membayarkan sebagian iuran peserta Program JKP sebesar 0,22% dari hasil rekomposisi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) untuk mengurangi beban pembayaran iuran dari pemberi kerja/pengusaha.

Pemerintah mendorong penetapan upah minimum disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan aturan turunannya yaitu PP No. 36/2021 tentang Pengupahan bertujuan untuk mengembalikan fungsi penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman, sehingga pekerja, baik pekerja formal maupun informal, dengan masa kerja satu tahun ke bawah bisa mendapatkan upah di atas batas minimum yang ditetapkan. Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. B-M/383/HI.01.00/XI/2021 telah menghimbau semua provinsi untuk menetapkan nilai upah minimum tahun 2022 pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam UUCK dan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. Himbauan tersebut berkontribusi pada penerapan upah minimum di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, sistem penetapan upah di perusahaan dilakukan melalui struktur dan skala upah atau kesepakatan bilateral antara pengusaha dan buruh/pekerja. Penetapan kenaikan upah minimum ini memberikan kejelasan bagi pengusaha/pemberi kerja dalam merencanakan investasi tahunannya. Selanjutnya, upah minimum yang kenaikannya terkendali dapat membantu pengendalian inflasi dan mendorong produktivitas perusahaan/pemberi kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

2.2. Program Kerja TPPIP Tahun 2021

2.2.1. Keterjangkauan Harga

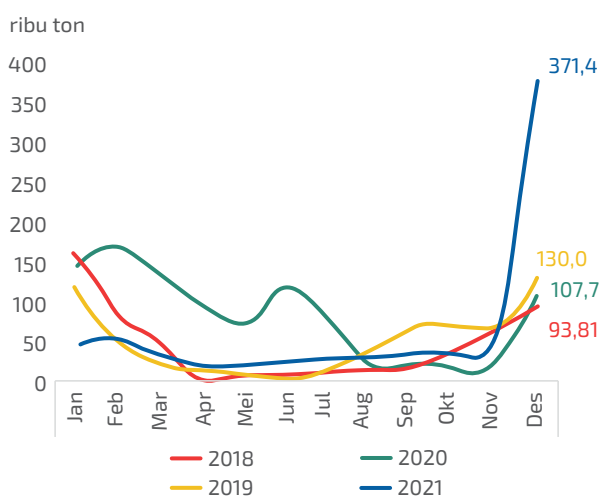
2.2.1.1. Pelaksanaan Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), Bantuan Beras masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM), dan Penyiapan Pasokan Jagung

Pelaksanaan KPSH sepanjang tahun 2021 telah mendukung upaya meningkatkan keterjangkauan harga. Program KPSH selain bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras tingkat konsumen, juga memiliki tujuan lainnya antara lain (i) menjadi salah satu bentuk intervensi Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan beras setiap saat pada harga maksimal sesuai

Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing wilayah; (ii) menjadi *outlet* dalam pengelolaan CBP sehingga tetap terjaga pada kuantitas yang ditugaskan (1 - 1,5 juta ton) dan kualitas dengan adanya perputaran stok, dan (iii) memberi peluang bagi tugas Pemerintah untuk memberikan jaminan harga dan pasar hasil panen petani melalui penyerapan gabah dan beras oleh Perum BULOG.

Pemanfaatan beras dalam program KPSH Beras Medium adalah salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimiliki Pemerintah dan dikelola oleh Perum BULOG. KPSH Beras Medium dilakukan dengan menggunakan CBP yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 127/M-DAG/PER/12/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga dan Surat Menteri Perdagangan RI Nomor 13/M-DAG/SD/1/2021 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Berdasarkan surat Menteri Perdagangan tersebut, Perum BULOG diberikan amanat untuk terus melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium secara masif di seluruh Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Perum BULOG sudah menyalurkan CBP untuk pelaksanaan KPSH sebanyak 767.838.842 ton (*unaudited*).

KPSH berperan penting menjaga stabilitas harga beras eceran sebagaimana terlihat pada pencapaian inflasi beras yang stabil. Dalam tiga tahun terakhir, sejak 2019 hingga 2021, andil beras terhadap inflasi relatif kecil berkisar antara minus 0,06 sampai dengan 0,04 persen, dengan varian pada tahun 2021 yang paling kecil. Sebaran realisasi bulanan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berkisar antara 4 ribu – 161 ribu ton per bulan, dengan realisasi yang tinggi umumnya pada awal tahun dan akhir tahun kemudian kembali rendah pada saat panen Maret - Juni. Sementara pada tahun 2021, realisasi penyaluran KPSH bulanan berkisar antara 16 ribu sampai dengan 371 ribu ton.



Sumber: BULOG

Grafik 2.1. Sebaran Penyaluran KPSH Bulanan Tahun 2018-2021

Di samping KPSH, Perum BULOG juga mendapatkan penugasan untuk menyalurkan program Bantuan Beras masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) tahun 2021 sebagai salah satu upaya Pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

Program BB-PPKM ini dilakukan secara masif dan di waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia. Program BB-PPKM tahun 2021 merupakan instruksi langsung dari Presiden melalui Kementerian Sosial yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran bagi 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama masa PPKM 2021 dengan memberikan bantuan beras sebanyak 10 kg per KPM. Rincian atas 28,8 juta KPM terdiri dari 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH); 10 juta KPM program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non PKH dengan total penyediaan beras untuk program BB-PPKM 2021 adalah sebanyak 288 ribu ton dengan kualitas medium dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum BULOG dan telah tersebar di gudang-gudang Perum BULOG seluruh Indonesia.

Bantuan beras BB-PPKM membantu konsumen dan petani. Bantuan beras BB-PPKM 2021 bukan hanya merupakan bagian dari tugas publik Pemerintah yang membantu meringankan KPM BB-PPKM 2021 sebagai kelompok masyarakat berpendapatan rendah (sesuai amanah pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016) dan meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, namun juga secara simultan membantu petani padi Indonesia untuk mendapatkan jaminan pasar dan harga beras. Stok yang tersimpan di gudang-gudang BULOG adalah hasil penyerapan gabah beras petani Indonesia yang dirawat dan disebar ke seluruh Indonesia untuk memudahkan akses pangan setiap masyarakat Indonesia melalui Pemerintah setempat, dan mendekati lokasi penyaluran.

Untuk mendukung keterjangkauan harga pakan ternak, Perum BULOG juga mendapatkan penugasan penyiapan pasokan jagung. Menindaklanjuti arahan Presiden kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dalam acara diskusi dengan peternak di Istana Negara tanggal 15 September 2021 dan hasil Rakortas tanggal 22 September 2021 terkait dengan pengadaan jagung untuk pemenuhan kebutuhan pakan unggas, maka diberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melakukan penyiapan pasokan dan penyaluran jagung sebanyak 30 ribu ton. Jumlah tersebut disalurkan kepada Koperasi Peternak Sasaran (KPS) yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah (yang anggotanya tersebar sampai dengan DI Yogyakarta,

Banten, dan Jawa Barat), dan Lampung. Harga jual jagung kepada peternak mandiri adalah Rp 4.500/kg dengan Kadar Air pada kisaran 15% sesuai Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan di Tingkat Konsumen.

Pengadaan jagung untuk pakan ternak bertujuan menjaga ketersediaan jagung di tingkat peternak serta menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam ras di tingkat konsumen. Hal ini sebagaimana tertuang dalam penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG sesuai dengan Pasal 2 Perpres 48 Tahun 2016. Pengadaan jagung dilakukan melalui skema mobilisasi jagung dari daerah sentra produksi (lokal) dengan bantuan Asosiasi Pajale untuk memenuhi kebutuhan para peternak mandiri di wilayah sasaran. Adapun kriteria dan daftar Koperasi Peternak Sasaran yang berhak menerima jagung bersubsidi melalui penugasan Perum BULOG tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI melalui Surat Nomor B-30002/TU.020/F2.5/09/2021

2.2.1.2. Upaya Menjaga Volatilitas Nilai Tukar Untuk Stabilisasi Inflasi Barang Impor

Kebijakan stabilisasi nilai tukar terus diperkuat sehingga berhasil menurunkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. Dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia, fluktuasi nilai tukar Rupiah tetap terjaga sehingga kondusif bagi upaya pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini ditempuh melalui strategi *triple intervention*, baik di pasar *spot*, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Kebijakan stabilisasi nilai tukar dimaksud juga didukung dengan cadangan devisa yang memadai sebagai *first line of defense*. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama internasional, baik bilateral maupun multilateral, untuk memperkuat *second-line of defense*. Kebijakan stabilisasi Bank Indonesia didukung pula oleh komunikasi intensif dengan para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Stabilitas dan penguatan nilai tukar Rupiah didukung oleh sejumlah faktor, yaitu inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, tingginya perbedaan suku bunga domestik dan luar negeri, cadangan devisa yang meningkat, dan menurunnya premi risiko sejalan dengan berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik. Secara tahunan, nilai tukar Rupiah tercatat apresiasi sebesar 1,64%¹ (yoy) terhadap *dollar* Amerika Serikat.

1 Realisasi perbandingan rerata kurs bulanan 2021 dibandingkan dengan rerata kurs bulanan tahun 2020.

2.2.2. Ketersediaan Pasokan

2.2.2.1. Peningkatan Ketersediaan Pasokan Melalui Program Food Estate

Pengembangan kawasan *food estate* merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mengembangkan kawasan *food estate* di berbagai daerah diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pangan di masa mendatang karena pengelolaan pangan dan pertanian di kawasan *food estate* tidak lagi ditempuh dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (*economics of scale*) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Pengembangan kawasan *food estate* dijalankan dengan: (1) Mengembangkan usaha pertanian skala besar berbasis klaster; (2) Melaksanakan proses budi daya pertanian multikomoditas yang terintegrasi; (3) Membangun mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi; (4) Membangun proses hilirisasi produksi pertanian; dan (5) Menumbuhkan dan mengembangkan korporasi petani.

Food estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi dalam negeri. Sesuai amanat Perpres Nomor 122 Tahun 2020, pengembangan *food estate* (KSPP) dilakukan dengan terintegrasi, modern, dan berkelanjutan melalui tiga strategi pengembangan. Strategi pengembangan yang pertama diarahkan melalui usaha tani terpadu hulu-hilir, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan lahan pertanian *existing*, dan efisiensi *supply chain* (intensifikasi, optimasi lahan, diversifikasi produk, pertanian konservasi, modernisasi irigasi, pertanian digital/presisi, sistem logistik, Sistem Resi Gudang (SRG), pengolahan primer sesuai kaidah keamanan pangan). Strategi pengembangan kedua dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan petani, perlindungan pemberdayaan petani dan regenerasi petani (*people centered development*), skema korporasi petani, terintegrasi dengan permodalan, asuransi pertanian dan mampu menarik sumber daya manusia (SDM) muda untuk berkiprah di sektor pertanian. Adapun strategi pengembangan yang ketiga ialah dengan menggerakkan investasi masyarakat dan swasta. Dengan strategi ini, pengembangan infrastruktur dasar didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pengembangan selanjutnya menggunakan skema investasi masyarakat/swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor.

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis hortikultura pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki peran strategis dalam meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani hortikultura. Keberhasilan pengembangan kawasan *food estate* berbasis hortikultura diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien. Beberapa komoditas hortikultura yang dikembangkan di kawasan *Food Estate* Sumatera Utara merupakan komoditas *volatile food* yang sering menyumbang inflasi, yaitu aneka cabai, bawang merah, bawang putih, dan sayuran lainnya sesuai dengan pola tanamnya.

Pengembangan *Food Estate* Sumatera Utara tahap awal (2020-2021) memiliki target 1.000 ha dengan rincian pengembangan areal seluas 215 ha dari APBN Kementan dan 785 ha oleh swasta (investor). Pada tahun 2021, kegiatan difokuskan pada pendampingan dan pengawalan kegiatan di kawasan seluas 215 ha tersebut, termasuk dengan melakukan penguatan kapasitas SDM petani melalui bimbingan teknis. Di samping itu, dilakukan pula persiapan pengembangan kawasan yang dikelola swasta seluas 785 Ha maupun kerja sama dengan *offtaker*. Selain itu, penguatan prasarana dan sarana pertanian telah diberikan kepada petani untuk mendukung kegiatan budidaya, seperti traktor roda empat, traktor roda dua, dan *cultivator*. Secara kelembagaan, pengelolaan *food estate* di Kabupaten Humbang Hasundutan akan dilakukan oleh suatu badan otorita yang pembentukannya hingga saat ini masih dalam proses, di bawah koordinasi langsung Bupati Humbang Hasundutan serta Kemenko Maritim dan Investasi sebagai penanggung jawab kegiatan pengembangan *food estate* Humbang Hasundutan.

Pada tahun 2021, areal seluas 215 ha telah memasuki musim tanam I dan musim tanam II. Beberapa lokasi lahan telah terdapat pertanaman baik swadaya petani maupun kemitraan dengan *offtaker*. Adapun komoditas yang ditanam antara lain bawang merah, bawang putih, kentang granola, kentang industri, cabai rawit, cabai merah besar, kol, tomat, stroberi, kacang, jagung dan padi gogo. Program kemitraan dengan *offtaker* yang telah dilakukan pada areal 215 ha, antara lain: PT. Parna Raya telah melakukan kerjasama dengan 5 kelompok tani seluas 25 ha yang terdiri dari pengembangan bawang merah, bawang putih dan jagung; PT Ewindo telah melakukan kerjasama dengan 6 kelompok tani untuk pengembangan bawang merah biji/ TSS seluas 5 Ha. Selanjutnya, pada area 785 ha sebagian besar lahan masih dalam proses

pembukaan lahan dan pengolahan lahan. Terdapat lahan seluas 20 ha yang telah ditanami tanaman leguminose (orok-orok), serta terdapat demplot penanaman jagung seluas 1,4 ha.

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis hortikultura juga dilakukan di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Pengembangan *Food Estate* Temanggung memiliki target seluas 339 hektar meliputi 5 kecamatan yaitu Bansari, Ngadirejo, Kledung, Bulu dan Parakan. Pemilihan komoditas yang dikembangkan diarahkan kepada komoditas yang dibutuhkan oleh pasar melalui kemitraan dengan *offtaker* berdasarkan tingkat kesesuaian agroklimat, kapasitas petani dan petugas daerah. Adapun komoditas hortikultura prioritas yang dikembangkan di lokasi *Food Estate* Temanggung adalah bawang merah, bawang putih, aneka cabai dan kentang. Beberapa capaian kegiatan *Food Estate* Temanggung diantaranya adalah terlaksananya penandatanganan PKS (perjanjian kerja sama) antara 29 poktan (kelompok tani)/gapoktan (gabungan kelompok tani) dengan 5 *offtaker* di Kabupaten Temanggung; terlaksananya pertanaman bawang merah, bawang putih, aneka cabai, dan kentang seluas 339 ha; dan terlaksananya *kick-off* oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2021.

Adapun lokasi pengembangan *Food Estate* Wonosobo seluas 339,96 hektar meliputi 5 kecamatan yaitu Kalikajar, Kertek, Watumalang, Garung dan Kejajar. Seperti halnya FE Temanggung, komoditas yang dikembangkan pada FE Wonosobo juga berdasarkan kesesuaian agroklimat, permintaan pasar dan kapasitas petani. Komoditas hortikultura prioritas yang dikembangkan di lokasi FE Wonosobo adalah bawang putih, cabai, kentang dan bawang merah. Beberapa capaian kegiatan *Food Estate* Wonosobo antara lain: terlaksananya penandatanganan PKS antara 25 poktan dengan 5 *offtaker* dan tertanamnya target pengembangan FE Wonosobo seluas 339,96 hektar secara bertahap serta terlaksananya *kick off* oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Desember 2021.

2.2.2.2. Peningkatan Produksi Pangan Antarwaktu dan Perluasan Area Tanam

Cabai dan bawang merah merupakan komoditas strategis yang ketersediaan pasokannya perlu dijaga tetap stabil sepanjang tahun. Upaya untuk menjaga stabilitas pasokan pada tahun 2021 dilakukan melalui penguatan produksi melalui beberapa program kerja yang telah dilakukan yaitu percepatan pengembangan kawasan dengan dana APBN yaitu bawang merah seluas 3.211 ha dan cabai seluas 4.540 ha serta menyampaikan prognosa hasil produksi berdasarkan *Early Warning System* (EWS).

Pemerintah terus mendukung upaya peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas barang merah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengembangan kawasan bawang merah sesuai target *output* nasional yakni seluas 3.211 ha. Tujuan dari pengembangan kawasan bawang merah adalah meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Fasilitas saprodi yang diterima penerima manfaat/petani berupa plastik UV (Ultra Violet), POC (Pupuk Organik Cair), PHC (Pupuk Hayati Cair), NPK (Nitrogen Fosfor Kalium), dan mulsa. Fasilitas bantuan benih untuk kegiatan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan melalui Direktorat Perbenihan berupa benih biji atau *True Shallot Seed* (TSS) dan benih umbi. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah masih dihadapkan pada kendala di lapangan seperti cuaca ekstrim, serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penguasaan teknologi dalam penerapan budidaya menggunakan benih biji atau *True Shallot Seed* (TSS) masih terbatas.

Demikian pula dengan komoditas aneka cabai yang mendapat dukungan dari Pemerintah agar ketersediannya dapat terjaga sepanjang tahun. Pengembangan kawasan cabai pada tahun 2021 sesuai target *output* yaitu seluas 4.540 hektar. Adapun tujuan pengembangan kawasan cabai adalah menjaga ketersediaan cabai merata sepanjang tahun terutama pada daerah-daerah minus. Fasilitas sarana produksi yang diterima petani berupa benih bermutu, mulsa, POC, dan pupuk NPK. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan cabai tersebut, masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti cuaca ekstrim, banjir, serangan OPT dan penerapan teknologi budidaya yang efisien dan ramah lingkungan. Di samping itu, skala usaha yang kecil dan tersebar menyulitkan dalam pengumpulan dan distribusi hasil produksi, sementara umur simpan cabai pendek karena sifatnya yang mudah rusak. Kegiatan pengembangan kawasan bawang merah dan cabai juga didukung dengan kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani/poktan/gapoktan dan petugas pendamping untuk peningkatan kapasitas melakukan budidaya yang baik.

2.2.2.3. Perencanaan dan Realisasi Impor Pangan Tepat Waktu

Pemerintah terus melakukan koordinasi secara berkala dengan memperhatikan stok dan kebutuhan dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan. Pertimbangan stok dan kebutuhan di dalam negeri menjadi dasar dalam menentukan perencanaan impor dan realisasi pangan. Untuk menjaga stabilitas harga pangan selama

tahun 2021 telah dilakukan langkah-langkah strategis agar realisasi impor pangan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan sehingga pasokan dan stabilitas harga tercapai.

Untuk menghindari kelangkaan akibat pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan relaksasi pelaksanaan impor hortikultura khususnya bawang putih dan bawang bombai. Kebijakan ini melanjutkan kebijakan tahun 2020 terkait relaksasi terhadap izin impor Produk Hortikultura yang belum dapat diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, khususnya bawang putih dan bawang bombai. Kebijakan ini bersifat sementara dan dilakukan dalam rangka mendorong percepatan pemasukan bawang putih dan bawang bombai untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harganya. Pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan realisasi impor untuk komoditas yang belum dapat diproduksi di dalam negeri guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga sepanjang tahun.

Selain produk hortikultura, importasi pangan juga dilakukan untuk komoditas pangan lain yang masih membutuhkan pasokan dari luar negeri seperti gula konsumsi dan daging ruminansia. Rakortas Pangan pada 2021 juga menetapkan pemenuhan gula konsumsi melalui impor untuk menjaga pasokan dan menghindari kelangkaan di masa pandemi. Pemerintah juga menerbitkan persetujuan impor daging kerbau dengan penugasan BUMN untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang belum dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri. Impor daging pada tahun 2021 tercatat sebanyak 284.277 ton. Angka tersebut terdiri dari impor sapi bakalan sebanyak 383.665 ekor, daging kerbau India 79.996 ton, daging sapi 114.846 ton, dan daging sapi Brasil 15.890 ton. Importasi ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan daging nasional sebanyak 669.731 ton yang belum dapat dipenuhi oleh produksi nasional 2021 sebanyak 423.443 ton.

2.2.2.4. Peningkatan Pasokan Daging Ayam

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dari peternakan dilakukan khususnya dengan menjaga ketersediaan pasokan daging dan telur ayam. Program kerja terkait penguatan ketersediaan pasokan daging ayam dilakukan dengan kewajiban pemilikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) atau *cold storage* sehingga diharapkan pasar akan bergeser dari penjualan *livebird* menjadi *carcass* untuk memperpendek rantai pasok. Target penguasaan RPHU dan pemotongan *livebird* disertai rantai dingin pada tahun 2021 adalah sebesar 30% dari produksi *livebird* yang dikelola *internal company* dan kemitraan.

2.2.2.5. Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) selama tahun 2021 melanjutkan tahun sebelumnya yaitu menugaskan Perum BULOG untuk menjaga level stok CBP pada angka 1-1,5 juta ton setara beras. Pemanfaatan CBP ditujukan kekurangan pangan/rawan pangan; bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat; bencana wabah penyakit; stabilisasi harga/pengendalian lonjakan harga beras; program penyaluran kepada golongan masyarakat tertentu dan/atau masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka ketahanan pangan; kegiatan pelepasan stok CBP; dan bantuan internasional dan kerjasama internasional; serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan pemerintah (diringkas dari berbagai aturan terkait CBP). Aturan rinci terkait pemanfaatan masing-masing diatur dalam peraturan Menteri terkait.

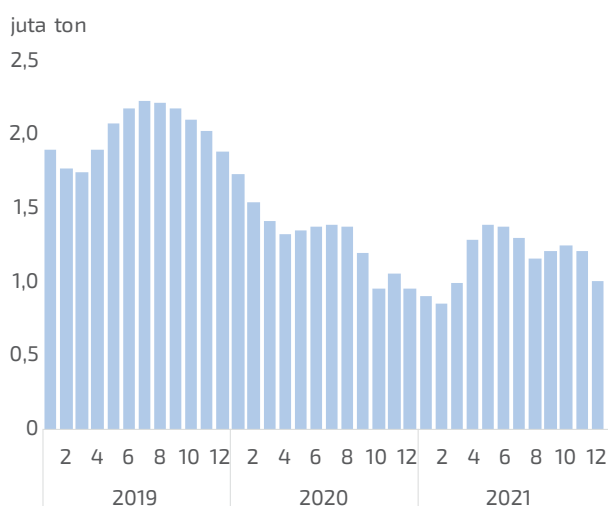
Dari sisi penganggaran, telah disediakan sejumlah dana CBP dengan skema pembayarannya dilakukan melalui mekanisme penggantian atas jumlah stok yang disalurkan. Penggantian akan diberikan kepada perum BULOG setelah dilakukan review oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan anggaran yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan penugasan pemerintah dalam menjaga stok CBP, di sisi hulu BULOG melakukan penyediaan beras yang mengutamakan hasil penyerapan gabah/beras melalui saluran pembelian langsung ke petani oleh Satuan Kerja Pengadaan Dalam Negeri (SATKERADN) dan Mitra Pangan Pengadaan (MPP). Dalam rangka optimalisasi pengadaan gabah/beras tahun 2021, khususnya untuk pengadaan gabah/beras PSO dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Jangka Panjang Bertarget (PJPB) dan pengadaan reguler yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 tahun 2020 tentang Ketentuan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.

Di sisi hilir, kebijakan yang harus ditempuh dalam memperkuat pengelolaan CBP adalah mengatur turnover beras. Pengaturan *turnover* beras ini dilakukan dengan menyediakan *outlet* penyaluran rutin agar beras yang dikelola bisa terus *fresh* dan yang utama dapat menjadi jaminan pembelian beras petani. Sampai saat ini stabilisasi harga melalui program KPSH dilaksanakan sepanjang tahun, namun penyaluran tersebut masih sangat bergantung pada kondisi dan permintaan pasar. Upaya lain yang telah ditempuh dalam rangka optimalisasi pengelolaan stok CBP pada tahun 2021 yaitu menyalurkan

program Bantun Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) sebanyak 288.000 ton. Namun demikian, penyaluran BB-PPKM pun belum optimal dalam mendorong *turnover* stok CBP karena bersifat *temporary* yaitu hanya diberikan 10 kg untuk 1 (satu) bulan alokasi per KPM.

Memperhatikan hal tersebut, diperlukan adanya konsistensi penugasan pengelolaan beras di tingkat hilir (konsumen) karena akan berdampak langsung pada aktifitas penyerapan di tingkat hulu (produsen). Tanpa penugasan hilir maka upaya pembelian komoditas di sisi hulu akan menjadi beban biaya di sisi operator stabilitas pangan pokok yakni BULOG. Selain itu, akan muncul kebutuhan biaya lain untuk menjaga kualitas dan potensi pelepasan/disposal ketika stok mengalami turun mutu namun masih belum mendapat kepastian kegiatan penyalurannya.

Jumlah stok CBP yang dikelola pada akhir tahun 2021 mencapai sebesar 1.019.811 ton yang tersimpan secara fisik sebanyak 807.919 ton (*unaudited*). Angka tersebut berada pada range pengelolaan CBP 1-1,5 juta ton sesuai ketetapan hasil Rakortas tingkat Menteri Bidang Perekonomian. Posisi terendah terjadi pada bulan Februari di angka 850 ribu ton, sedangkan posisi stok tertinggi pada Mei 2021 sebesar 1,39 juta ton. Selama Januari- Maret 2021, jumlah CBP dilaporkan berada di bawah 1 juta ton, selanjutnya meningkat pada bulan April menjadi 1,29 ton kemudian mengalami fluktuasi hingga posisi akhir bulan Desember 2021 sebesar 1 juta ton.



Sumber: Bulog

Grafik 2.2. Perkembangan CBP Tahun 2019-2021

2.2.2.6. Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Komoditas Selain Beras

Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pascapanen sebagai salah satu memperkuat pasokan pangan. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan CBP dari sisi hulu dan hilir, Pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 sebesar Rp2 triliun rupiah. Selama tahun 2021, nilai proyek infrastruktur pascapanen yang sudah dikeluarkan dalam lelang sebesar Rp1,37 triliun atau 69% dari total keseluruhan dana PMN TA 2016. Adapun penggunaan PMN tersebut dialokasikan untuk pembangunan *Modern Rice Milling Plant* (MRMP) sebanyak 13 unit, *Rice To Rice* (RTR) sebanyak 7 unit, *Corn Drying Centre* (CDC) sebanyak 6 unit, Gudang Kedelai (GK) sebanyak 2 unit, Gudang Komoditas Pangan (GKP) sebanyak 20 unit, dan Gudang Modern (GM) sebanyak 4 unit. Sampai dengan tahun 2021, rata-rata progres pekerjaan dari 6 proyek pembangunan infrastruktur pascapanen mencapai 78% dengan rincian penyelesaian proyek sebagai berikut MRMP 10 unit (76,9%), RTR 7 unit (100%), CDC 3 unit (50%), GK 2 unit (100%), GKP 19 unit (95%), dan GM-DC 3 unit (75%).

2.2.2.7. Penggunaan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Menjaga Kepastian Harga Jual dan Akses Pembiayaan Petani

Potensi SRG untuk mendukung kemajuan sektor pertanian cukup luas mengingat SRG dapat digunakan sebagai agunan kredit, mendukung stabilisasi harga pasar, dan menjadi sumber data dan informasi. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011, telah menghasilkan SRG sebagai instrumen baru dalam sistem pembiayaan perdagangan di Indonesia. SRG dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memfasilitasi pemberian kredit hanya dengan menggunakan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang, tanpa memerlukan agunan tambahan lainnya. Hal ini membuka opsi bagi para pelaku usaha pemilik komoditas, khususnya petani dan usaha kecil dan menengah untuk melakukan tunda-jual di saat harga jual komoditas dinilai terlalu rendah. Dengan demikian, SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, penerapan sistem informasi pada SRG dapat menjadi sumber data dan informasi bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian harga dan pemantauan persediaan nasional.

Jumlah gudang SRG terus meningkat dengan cakupan kabupaten/kota di Indonesia yang luas pula. Pada tahun 2021, jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG meningkat sebesar 32% dibandingkan tahun 2020, dari yang semula sebanyak 121 gudang menjadi 160 gudang. Gudang ini meliputi gudang *flat*, gudang beku (*coldstorage*) maupun gudang *Controlled Atmosphere Storage* (CAS), baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMN maupun swasta. Gudang-gudang tersebut terdapat di 97 kabupaten/kota yang tersebar pada 26 provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

Di samping itu, transaksi penerbitan Resi Gudang juga terus meningkat. Secara nasional, nilai transaksi penerbitan Resi Gudang pada tahun 2021 tercatat telah mencapai Rp. 515,8 miliar atau tumbuh sebesar 170%

dari tahun 2020. Pencapaian ini didorong oleh adanya penerbitan 623 Resi Gudang untuk 12 komoditas meliputi Gabah, Beras, Jagung, Rumput Laut, Lada, Kopi, Ayam Karkas Beku, Ikan, Kedelai, Gambir, Timah dan Bawang Merah dengan total volume penerbitan Resi Gudang mencapai 13.783,9 ton.

Peningkatan pemanfaatan Resi Gudang juga terlihat dari nilai pembiayaannya yang meningkat. Nilai pembiayaan Resi Gudang pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 356,1 miliar yang terdiri dari Rp. 86,5 miliar disalurkan oleh lembaga perbankan (Bank BJB, Bank Jateng, Bank BRI, Bank Kalsel, Bank Sumselbabel) dan Rp. 269,7 miliar disalurkan oleh lembaga keuangan non-bank (PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Kliring Berjangka Indonesia). Dibandingkan dengan tahun 2020, nilai pembiayaan pada tahun 2021 meningkat sebesar 203%, yang didorong besar pada pembiayaan dari komoditas kopi dan timah.

Tabel 2.1. Transaksi Resi Gudang per-Komoditi Tahun 2021

Komoditi	Jumlah Resi	Volume (ton)	Nilai (Rp/IDR)	Pembiayaan (Rp)
Gabah	249	4,381	29.026.919.906	14.168.425.000
Beras	41	2,484	23.183.550.000	13.213.827.900
Jagung	6	160	533.520.000	-
Kopi	50	860	53.086.314.600	34.243.580.000
Rumput Laut	15	1,207	25.384.200.000	10.741.210.000
Timah	45	226	55.788.217.626	39.523.603.016
Ayam Karkas Beku	8	29	814.200.300	208.200.000
Ikan	8	192	3.396.282.300	2.207.573.490
Kedelai	5	66	849.940.000	276.000.000
Gambir	1	1	47.000.000	32.000.000
Bawang Merah	2	32	352.000.000	150.000.000
Jumlah/Total	623	13.784	515.768.828.832	356.147.637.067

Sumber: Kemendag

2.2.2.8. Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Alsintan untuk Budidaya dan Penanganan Pascapanen

Upaya menjaga ketersediaan pasokan diantaranya dilakukan melalui optimalisasi sarana produksi untuk memperkuat produksi domestik dan mengurangi beban biaya usaha tani. Untuk itu, Kementerian Pertanian telah menerapkan mekanisasi penggunaan alat dan mesin pertanian yang berhubungan langsung dengan budidaya produksi pertanian (*on farm*), maupun pascapanen (*off farm*). Adapun bantuan sarana produksi mencakup benih, pupuk, dan alsintan yang didukung oleh pembangunan Unit Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah sentra produksi oleh Pemerintah Daerah. Realiasi modernisasi pertanian 2019 melalui mekanisasi dengan bantuan Alsintan Pra Panen pada tahun 2021 tercatat sebanyak 16.392 unit dan pasca panen sebanyak 3.313 unit (data s.d. Semester I Tahun 2021).

2.2.2.9. Penguatan Industri Pengolahan Produk Hortikultura

Komoditas hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan berperan penting dalam menjaga keseimbangan pangan nasional. Oleh karena itu, komoditas hortikultura harus tersedia setiap saat dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Sifat dan karakteristik produk hortikultura secara umum adalah tidak dapat disimpan lama dan mudah rusak (*perishable*), *bulky* sehingga perlu tempat lapang, melimpah pada suatu musim dan langka pada musim yang lain, nilai ekonomis tergantung tingkat kesegarannya, dan fluktuasi harganya yang tajam. Sifat dan karakteristik ini akan memengaruhi kebijakan penyediaan konsumsi masyarakat terhadap produk hortikultura, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam terhadap produk hortikultura agar pengembangan hortikultura dapat berhasil dengan baik. Penanganan pascapanen dan pengolahan terhadap komoditas hortikultura sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk terutama pada saat harga murah dan panen raya.

Pengembangan produk hortikultura yang bermutu dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional membutuhkan penerapan budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan penanganan pascapanen yang baik (*Good Handling Practices/GHP*). Kegiatan pascapanen produk hortikultura merupakan kegiatan dalam usaha tani yang perlu mendapat perhatian karena menyangkut kehilangan hasil, baik dalam hal bobot maupun mutu. Data FAO tahun 1979

menunjukkan bila penanganan saat panen kurang tepat maka tingkat kerusakan dapat mencapai 30-50%. Sebaliknya, apabila ditangani secara baik dan benar, perlakuan pascapanen dapat memperpanjang kesegaran, mencegah menurunnya mutu hasil panen, menekan tingkat kehilangan hasil, memperpanjang umur simpan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Penanganan pascapanen hortikultura merupakan salah satu mata rantai dalam pencapaian standar mutu produk hortikultura. Aneka ragam produk hortikultura sebelum dipasarkan ke berbagai pasar atau dijual langsung kepada konsumen, perlu dilakukan penyiapan yang pada umumnya dilakukan di bangsal pascapanen (*packing house*). Tahapan kegiatan pascapanen untuk setiap jenis komoditas hortikultura memerlukan penanganan yang berbeda sesuai karakter masing-masing. Penanganan pascapanen tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang baik.

Pengembangan hortikultura diarahkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, memenuhi kebutuhan bahan baku industri, substitusi impor, dan mengisi peluang pasar ekspor. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut meliputi *on-farm*, *off-farm*, pengembangan kawasan baru, infrastruktur, kelembagaan dan kebijakan Pemerintah. Tren konsumsi produk hortikultura saat ini tidak hanya dibutuhkan dalam bentuk segar, tapi juga dalam bentuk olahan baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha *food corner*, maupun industri makanan. Teknologi pengolahan hortikultura lainnya juga semakin berkembang menjadi jenis bentuk olahan buah, aneka sayuran serta tanaman obat, antara lain puree, sari buah, selai buah, dodol buah/sayuran, produk instan dan lain-lain. Prospek pengembangan hortikultura olahan lainnya sangat terbuka mengingat ketersediaan bahan baku yang melimpah di sentra produksi, terutama saat musim panen raya.

Pengembangan pengolahan hortikultura disinergikan dengan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi hortikultura. Untuk mendukung kemajuan usaha pengolahan hortikultura di sentra-sentra kawasan produksi hortikultura, maka Direktorat Jenderal Hortikultura melalui tugas dan fungsi yang baru sesuai Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 memfasilitasi sarana prasarana pengolahan bagi pelaku-pelaku usaha hortikultura di Indonesia. Pemberian bantuan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi olahan produk hortikultura, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

2.2.2.10. Peningkatan Pemanfaatan TI yang Terintegrasi untuk Meningkatkan Produksi dan Produktivitas

Penguatan pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan ekosistem pertanian terus dilakukan oleh Bank Indonesia pada klaster UMKM pangan binaan.

Pada 2021, implementasi *pilot project* dan replikasi digitalisasi UMKM pertanian sisi hulu terus berlanjut untuk mendorong peningkatan produktivitas, terutama untuk penguatan produksi/pasokan. Penerapan penggunaan alat berbasis *Internet of Things* (IoT) untuk pertanian, seperti sensor cuaca dan/atau sensor tanah di sisi hulu terus didorong, sehingga dapat mendukung penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP) pada lahan pertanian. Keberlanjutan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hulu oleh Bank Indonesia yang menjadi target program kerja pada tahun 2021 tercermin dari peningkatan jumlah UMKM pangan sisi hulu yang telah terdigitalisasi, yaitu menjadi sebanyak 18 UMKM, dari tahun sebelumnya yang sebanyak 12 UMKM. Komoditas yang diproduksi oleh UMKM pangan yang telah terdigitalisasi tersebut mencakup komoditas padi, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Adapun sebaran wilayah UMKM pangan dimaksud mencakup Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

2.2.3. Kelancaran Distribusi

2.2.3.1. Penguatan Kerjasama Perdagangan Antardaerah

Di tengah pandemi COVID-19 selama 2021 telah dilaksanakan penguatan kerja sama antardaerah dalam rangka saling melengkapi kebutuhan komoditas pangan masing-masing daerah. Penguatan kerjasama perdagangan antardaerah dilakukan dengan penguatan asesmen *pre-matchmaking* dalam pemilihan kandidat pelaku usaha pelaksana KAD, termasuk mendorong peran BUMD pangan dalam KAD. Selama tahun 2021, Departemen Regional, Bank Indonesia DR telah memfasilitasi 15 TPID dari 10 kantor perwakilan dalam negeri (KPwDN) untuk melakukan *matchmaking* KAD. Di samping itu, dilakukan pula upaya penguatan *business model* sebagaimana KAD yang dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta. Penguatan KAD juga dilakukan melalui perluasan jenis komoditas dan nilai transaksi yang didukung dengan data/informasi, misalnya peta surplus defisit pangan yang akurat. Bank Indonesia

juga mendukung penguatan mekanisme perumusan harga yang mempertimbangkan aspek ketersediaan komoditas, kapasitas dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, dilakukan pula penguatan kapasitas dan kualitas komoditas KAD melalui dukungan teknologi, misalnya dengan implementasi *digital farming*.

2.2.3.2. Penguatan Program Tol Laut untuk Efisiensi Distribusi Pangan

Penguatan program tol laut dilakukan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dengan meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan).

Pemerintah terus melanjutkan pemanfaatan program tol laut sebagai salah satu program kerja TPIP dalam upaya efisiensi distribusi pangan. Program Tol Laut ini juga diharapkan dapat memperlancar distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga dapat menekan gejolak harga dan disparitas harga antardaerah. Pada 2021, tol laut telah melayani hingga 32 trayek yang menyinggahi 114 pelabuhan. Secara khusus, tol laut tersebut melayani provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sejak diluncurkan, pemanfaatan program tol laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan.

Peningkatan dan perkembangan tersebut terlihat baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal serta jumlah muatan sejak tahun 2015 hingga 2021. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2021 mengalami perkembangan terlihat dari jumlah pelabuhan yang disinggahi dari sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) pelabuhan singgah pada 2015 menjadi sebanyak 104 (seratus empat) pelabuhan pada tahun 2021 yang melayani 32 (tiga puluh dua) trayek dengan mengoperasikan 32 (tiga puluh dua) kapal.

Selain dari segi trayek dan jumlah pelabuhan yang disinggahi tersebut, peningkatan juga terus terjadi pada kapasitas daya angkut muatan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut terus mengalami peningkatan kapasitas volume muatan yang pada 2016 baru mencapai 4.070 Teus. Pada tahun 2021 kapasitas volume muatan tersebut meningkat

menjadi sebanyak 18.010 Teus pada muatan berangkat, dan sebanyak 5.774 Teus pada muatan balik, sehingga total muatan tercatat sebesar 23.992 Teus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Tol Laut sudah mengalami peningkatan dan perkembangan dari tahun 2015 hingga 2021, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitasnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 program Tol Laut akan melayani 33 trayek dengan 32 kapal dan 121 pelabuhan singgah untuk mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bakpokting) serta barang lainnya.

2.2.3.3. Optimalisasi Pemanfaatan Pasar Induk Beras Melalui Kajian Bersama Lintas K/L

Pasar Induk Beras (PIB) didirikan dengan tujuan mengendalikan harga di tingkat daerah serta membuka mekanisme pembentukan harga keseimbangan baru. Memerhatikan kondisi lalu lintas pergerakan beras selama ini, salah satu faktor penyebab tingginya biaya transportasi adalah karena adanya pergerakan beras yang tidak efisien. Hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pendirian PIB di wilayah Parepare Propinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari pembangunan PIB Parepare diantaranya untuk menjadi agregator pertumbuhan ekonomi sekaligus pemanfaatan dan peluang usaha melalui penyerapan gabah/ beras petani dengan kualitas jenis yang bervariasi, serta untuk menjadi acuan data stok dan harga pangan untuk perumusan kebijakan pangan daerah dan nasional. Selain itu, dapat digunakan sebagai instrumen Pemerintah untuk pengendalian inflasi daerah khususnya harga pangan, serta menjaga keseimbangan pasokan produsen dan kebutuhan konsumen dengan menyederhanakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas pangan, distribusi, dan meningkatkan kerjasama antardaerah.

PIB juga diharapkan dapat menjadi pusat perdagangan dan ekonomi wilayah dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, serta menjadi sentra perdagangan terintegrasi dengan kebijakan Pemprov. PIB diharapkan juga menjadi satu pintu distribusi langsung perdagangan antarpulau/antardaerah khususnya Indonesia Timur maupun ekspor. Namun demikian, dalam perjalanannya pengelolaan PIB masih belum mendapat respon yang cukup baik dari para pelaku pasar beras, sehingga menyebabkan pemanfaatan PIB Parepare belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2021, dipandang perlu untuk melakukan kajian yang komprehensif terkait pengelolaan PIB yang ideal dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektoral baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, maupun pihak swasta pelaku pasar beras. Namun demikian, kajian ini tidak dapat dijalankan karena adanya relokasi anggaran. Terbitnya Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional mengubah beberapa pemanfaatan dana kajian terkait pengelolaan pangan termasuk infrastrukturnya. Sebagai BUMN yang dikuasakan oleh Menteri BUMN kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan penugasan kebijakan pangan nasional BUMN, Perum BULOG membutuhkan kajian dalam upaya memberikan usulan kepada Badan Pangan Nasional terkait peran Perum BULOG dalam pengelolaan pangan nasional. Sesuai kondisi tersebut, maka kajian terkait pengelolaan PIB tidak dapat dilakukan karena adanya relokasi penggunaan anggaran untuk kegiatan kajian BPN dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya.

2.2.3.4. Fasilitasi Distribusi Pangan Antar Provinsi/ Wilayah dari Wilayah Surplus ke Wilayah Defisit

Upaya untuk menekan volatilitas inflasi pangan dilakukan di antaranya dengan mendorong distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Salah satu upaya Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun konsumen, ialah melalui fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi). Sasaran dari penggunaan dana fasilitasi distribusi pangan adalah menekan tingginya disparitas harga dengan cara membantu pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen, yang mengalami penurunan harga pangan, ke wilayah konsumen, yang mengalami kenaikan harga signifikan.

Fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit untuk menekan fluktuasi harga atau untuk memperkuat pasokan bahan pangan tersebut dilakukan dengan berbagai saluran distribusi. Saluran distribusi pangan tersebut ialah melalui Pasar Mitra Tani/ Toko Tani Indonesia Centre/ Toko Mitra Tani/ Toko Tani Indonesia, atau melalui pelaku pangan lainnya. Pada tahun 2021, telah tersalurkan bahan pangan antar provinsi/ wilayah sebanyak 1.943,62 ton dengan biaya fasilitasi distribusi pangan sebesar Rp 2,27 miliar dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Rincian Fasilitas Distribusi Pangan 2021

Komoditas	Daerah Asal	Daerah Tujuan	Berat (Ton)	Biaya (Rp Juta)
Beras, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, gula	Jawa Timur	Maluku	62,7	68,24
Beras	Lampung	DKI Jakarta	20	24
Beras	DKI Jakarta	Kepulauan Riau	20	46
Jagung	NTB	Blitar dan Kendal, Jawa Timur	-	-
Jagung	Sulawesi Utara	Blitar, Jawa Timur	1.512,11	958,27
Daging ayam ras (beku)	Mojokerto, Jawa Timur	Tarakan, Kalimantan Utara	30	160,64
Telur ayam ras	Enrekang, Sulawesi Selatan	Samarinda, Kalimantan Timur	45	199,69
Telur ayam ras	Enrekang, Sulawesi Selatan	Ambon, Tual dan Kepulauan Aru; Maluku	7	56
Telur ayam ras	Blitar, Jawa Timur	Ambon, Maluku	10	51,09
Telur ayam ras	Blitar, Jawa Timur	Pangkalanbun, Kalimantan Tengah	58,3	340,86
Bawang merah	Bima, NTB	Maluku	2	12,87
Cabai rawit merah	Enrekang, Sulawesi Selatan	Maluku	41,5	199,79

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Kementan

Pasar Mitra Tani/Toko Tani Indonesia Center (PMT/TTIC) dan Toko Mitra Tani/Toko Tani Indonesia (TMT/TTI) berperan penting dalam mendukung fasilitas distribusi bahan pangan. Strategi fasilitas distribusi pangan yang dilakukan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan ialah dengan memanfaatkan PMT/TTIC dan TMT/TTI yang mendapatkan penggantian biaya distribusi transportasi dan kemasan. Dengan fasilitas distribusi pangan ini, masyarakat dapat memperoleh harga yang terjangkau khususnya sepuluh komoditas pangan pokok dan strategis (beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, gula dan bahan pangan lainnya). Target penyaluran komoditas pangan pokok/strategis dengan kegiatan fasilitas distribusi pangan melalui PMT/TTIC dan TMT/TTI baik di Pusat dan Daerah pada tahun 2021 tercatat sebesar 13.435 ton dengan alokasi anggaran Rp 14,46 miliar. Realisasi anggaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 13,75 miliar (95,07%) dengan penyaluran bahan pangan 14.791 ton (110,09%).

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, mendukung upaya menjaga kelancaran distribusi pangan melalui bantuan penyaluran bahan pangan melalui berbagai saluran distribusi. Dukungan kelancaran distribusi tersebut merupakan pelayanan masyarakat melalui penjualan bahan pangan pokok/strategis melalui Pasar Mitra Tani (PMT)/Toko Tani Indonesia Centre (TTIC)/Toko Mitra Tani (TMT)/Toko Tani Indonesia (TTI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyaluran komoditas bahan pangan ke masyarakat dilakukan secara penjualan langsung (*offline*), *semi online*, maupun *full online*. Perubahan teknologi digital saat ini juga menuntut pelaku perdagangan pangan, termasuk PMT/TTIC dan TMT/TTI semakin adaptif menyesuaikan perkembangan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Seiring dengan perubahan tersebut saat ini PMT/TTIC sudah melakukan penjualan secara *online* melalui *marketplace* seperti *PasTANI*, *Go-Food*, *GoMart*, *GrabMart*, *Mitra Bukalapak*, dan *Digiretail Mandiri*. Sepanjang tahun 2021, omzet penjualan baik *offline* dan

online dari seluruh PMT/TTIC Pusat dan Provinsi mencapai Rp 91.107.360.347, dengan total volume penjualan 10 komoditas pangan pokok/strategis sebanyak 4.834,44 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 295,84 ton bahan pangan dengan total omset Rp 6,01 miliar, telah didistribusikan

secara online melalui 6 marketplace dengan total jumlah transaksi sebanyak 51.856 kali. Orderan tertinggi secara beturut-turut adalah GoFood 39.851 order, GrabMart 6.430 order, GoMart 2.521 order, Mitra Bukalapak 2.158 order, PasTANI 867 order, dan Digiretail 29 order.



Sumber: Kementan

Gambar 2.3. Realisasi Penyaluran Bahan Pangan Kegiatan FDP Melalui PMT/TTIC/TMT/TTI Tahun 2021



Sumber: Kementan

Gambar 2.4. Kinerja Pemasaran Online PMT/TTIC Tahun 2021

2.2.3.5. Pembangunan Ekosistem Pertanian Berbasis TI

Upaya digitalisasi sisi hilir UMKM pangan binaan Bank Indonesia terus berlanjut guna meningkatkan efisiensi rantai pasokan, terutama untuk mendukung kelancaran distribusi dan memperluas akses petani pada masyarakat. Sejalan dengan upaya digitalisasi sisi hulu, implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir juga terus dilakukan, yaitu dengan melakukan fasilitasi antara UMKM klaster pangan binaan dan *platform* pertanian *digital*. Fasilitasi kerja sama pemasaran produk pertanian dimaksud telah terlaksana dengan baik dan umumnya menggunakan metode *purchase order*. Keberlanjutan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir yang menjadi target program kerja pada 2021 tercermin dari peningkatan jumlah UMKM pangan menjadi sebanyak 8 UMKM klaster pangan, dari tahun sebelumnya yang sebanyak 3 UMKM. Adapun cakupan komoditas yang ditransaksikan dan wilayah asal UMKM pangan dimaksud mencakup komoditas bawang merah (Jawa Barat dan Bengkulu), cabai (Kepulauan Riau), ikan (Banten), daging sapi (Jawa Timur), padi (Jawa Timur) dan pangan olahan lainnya yaitu pisang (Lampung).

2.2.4. Komunikasi Efektif

2.2.4.1. Kebijakan untuk Mengelola Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi inflasi terus terjangkau dalam kisaran sasarannya didukung kebijakan komunikasi efektif oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Untuk meminimalisasi dampak ketidakpastian ekonomi global dan domestik, khususnya di masa penyebaran COVID-19 varian Delta, Pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat intensitas komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri, secara terbuka baik melalui konferensi pers maupun berbagai media komunikasi lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga transparansi kebijakan dan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi agar sesuai dengan target, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dan Bank Indonesia guna mempertahankan stabilitas perekonomian di masa krisis. Strategi tersebut berhasil menjaga ekspektasi inflasi tetap rendah dan terkendali. Ekspektasi inflasi 2021 berdasarkan *Consensus Forecast*, yang merupakan ekspektasi inflasi dari sejumlah ahli ekonomi dari berbagai *investment house* terkemuka, tercatat sebesar 1,6% (*average yoy*).

2.2.4.2. Penentuan dan Penetapan Sasaran Inflasi 2022-2024

Penetapan sasaran inflasi merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka menengah untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat selama tiga tahun ke depan. Sasaran inflasi diharapkan dapat berperan dalam membentuk jangkar ekspektasi baru yang mencerminkan tingkat inflasi yang sesuai dengan konteks perekonomian, terutama dalam masa pemulihan ekonomi. Dalam penyusunan sasaran inflasi tersebut, beberapa faktor telah menjadi pertimbangan seperti kondisi perekonomian maupun domestik, tingkat inflasi mitra dagang, *measurement bias* pada inflasi, harga komoditas internasional, nilai tukar rupiah, faktor fundamental penawaran dan permintaan domestik, karakteristik inflasi domestik dan faktor-faktor lainnya yang memengaruhi, serta arah kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah. Di samping itu, angka sasaran inflasi juga mempertimbangkan kondisi inflasi masa pemulihan ekonomi serta ruang insentif bagi dunia usaha untuk kembali tumbuh dan berkembang di tengah terobosan agenda reformasi struktural dalam rangka penyehatan ekonomi secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Penetapan sasaran inflasi tersebut juga mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menciptakan bauran kebijakan jangka menengah dengan menyepakati rentang sasaran yang diperkirakan akan semakin memperkuat strategi pengendalian inflasi nasional.

Sasaran inflasi 2022-2024 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan sasaran inflasi tersebut resmi berlaku dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.010/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Proses penentuan sasaran inflasi tersebut didasarkan pada UU Bank Indonesia dan UU Keuangan Negara. Sementara mekanisme penetapan didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah (diwakili Menteri Keuangan) dan Bank Indonesia tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia tanggal 1 Juli 2004. Angka sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 ditetapkan masing-masing sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$, $3,0\% \pm 1,0\%$, dan $2,5\% \pm 1,0\%$, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dalam *High Level Meeting* TPIP tanggal 11 Februari 2021.

2.2.4.3. Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi 2022-2024

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 disusun sebagai panduan dalam mengawal pencapaian sasaran inflasi nasional yang telah ditetapkan untuk periode 2022-2024 tersebut. Mempertimbangkan berbagai tantangan pengendalian inflasi, diperlukan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga pencapaian inflasi dalam level yang rendah dan stabil sesuai sasaran inflasi 2022-2024. Mempertimbangkan bahwa kewenangan dalam pengendalian inflasi nasional berada di beberapa instansi baik pusat dan daerah, maka diperlukan adanya acuan tunggal sebagai peta jalan (*roadmap*) dalam rangka harmonisasi kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran inflasi nasional. Dengan kata lain, peta jalan atau *roadmap* pengendalian inflasi merupakan rencana-rencana aksi elemen TPIP secara terpadu dalam rangka menjaga inflasi agar terkendali sesuai sasarannya. Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Nomor 500/5713/Bangda Tanggal 13 Desember Tahun 2021 hal Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong seluruh TPID dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pengendalian stabilisasi inflasi di daerah melalui strategi 4K. Kebijakan-kebijakan seluruh unit yang terkait dengan pengendalian inflasi nasional diharmonisasikan dalam peta jalan dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang masih dihadapi serta target ke depan dalam koridor 4K. Sebagaimana Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021, Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 berupaya membuahkan hasil yang positif dengan disertai langkah-langkah nyata, koordinatif dan berkesinambungan. Batasan-batasan, kewenangan serta tanggung jawab yang dimiliki instansi yang terlibat tentunya perlu diakomodasi dan diberi ruang yang cukup untuk komunikasi dan harmonisasi.

Roadmap Pengendalian inflasi disusun dan disepakati bersama sebagai langkah konkrit dalam upaya pencapaian target inflasi. Dokumen ini disusun oleh seluruh anggota TPIP yang juga dikoordinasikan dengan peta pengendalian inflasi di tingkat daerah yang juga telah disusun oleh TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dan Daerah yang dihadiri oleh Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan tujuan untuk melakukan

sosialisasi penyusunan program/kegiatan *roadmap* pengendalian inflasi. Formulasi *roadmap* ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi nasional dengan mekanisme evaluasi periodik tahunan sebagai penilaian efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Penyusunan dokumen ini juga telah disinergikan dengan dokumen-dokumen lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mempertimbangkan Nota Keuangan dan APBN. Percepatan Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi juga didorong oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 500/1622/Bangda Tanggal 8 Maret 2022 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota selaku Ketua TPID Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan demikian, jumlah daerah yang telah menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 adalah sebanyak 34 Provinsi dan 361 Kabupaten/kota.

2.2.4.4. Penguatan dan Penyelenggaraan Koordinasi (Rakornas dan Rakorpusda)

Penguatan dan penyelenggaraan koordinasi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi semakin penting pada tahun 2021. Penguatan dan penyelenggaraan koordinasi pusat dan daerah menjadi semakin penting mengingat tantangan pengendalian inflasi di masa pandemi yang semakin meningkat dengan munculnya varian Delta. Koordinasi pusat dan daerah menjadi salah satu hal strategis dalam sinergi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta mendorong pemulihan ekonomi. Koordinasi di antaranya dilakukan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi (Rakorpusda).

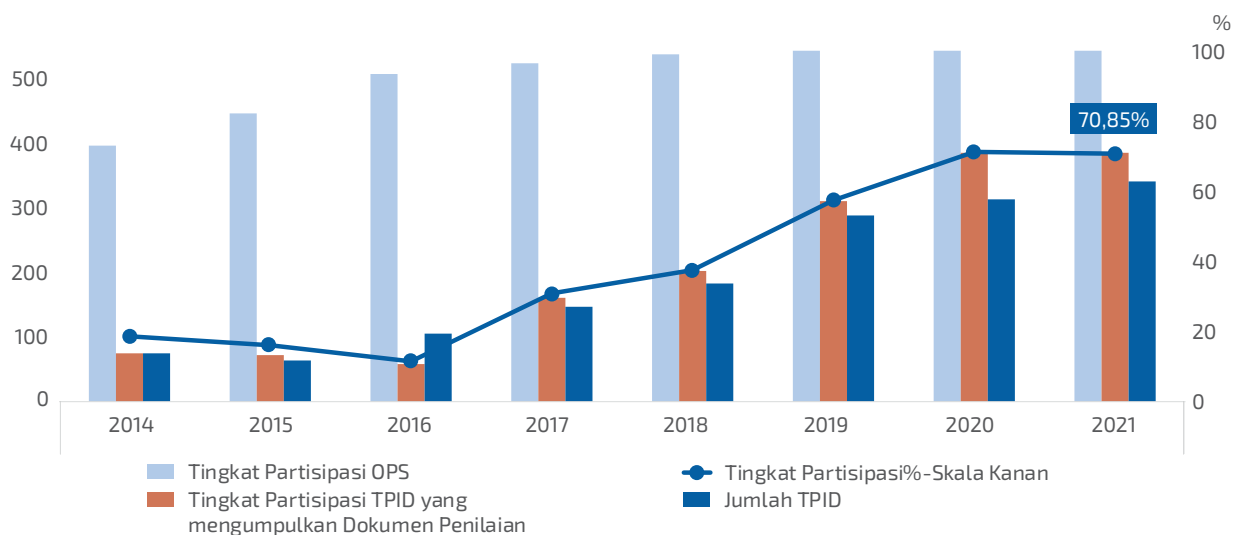
Arah dan strategi pengendalian inflasi Indonesia secara rutin dirumuskan dalam forum koordinasi *high level* Rakornas Pengendalian Inflasi. Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan forum koordinasi tertinggi untuk merumuskan arah dan strategi pengendalian inflasi, yang dihadiri oleh Presiden RI, Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, sejumlah Menteri dan pimpinan Kementerian/Lembaga anggota TPIP, Ketua OJK, perwakilan pejabat Eselon 1 K/L anggota TPIP, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selaku Ketua TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Rakornas tahun 2021 yang mengusung tema "Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan" diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu kombinasi pertemuan langsung secara terbatas dan secara daring, di Istana Negara, Jakarta pada 25 Agustus 2021.

Pada kesempatan Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut, Presiden RI memberikan tiga arahan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah. **Kedua,** melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Hal ini antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas. **Ketiga,** meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk *platform* digital, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian selaku Ketua TPIP memandu jalannya sesi dialog antara Presiden dengan Kepala Daerah.

Pada sesi dialog, Presiden menekankan bahwa pandemi menjadi kesempatan untuk mendorong digitalisasi UMKM. Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Presiden, TPID telah diarahkan untuk turut melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara realtime, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal, sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Di samping arahan dan dialog Presiden dengan kepala daerah, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi juga diumumkan pemenang TPID Award. Pemenang TPID Award sendiri merupakan hasil dari rangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Daerah dan Sekretariat TPIP yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 152 tahun 2021 tentang Penetapan Nominasi dan Penerima Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021. TPID yang menjadi pemenang dan nominasi tersebut juga diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat insentif tambahan. Insentif tersebut dimaksudkan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Kemenko Perekonomian

Grafik 2.3. Tingkat Partisipasi TPID dalam TPID Award 2021

Tabel 2.3. Pemenang TPID Award 2021

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/ Kota	TPID Berprestasi Kab/ Kota
1	Sumatera	Sumatera Utara	Kota Pekanbaru	Kab. Tanah Datar
2	Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Kab. Banyuwangi	Kab. Blitar
3	Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Samarinda	Kab. Bone Bolango
4	Sulawesi	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kab. Kutai Barat
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Papua	Kota Jayapura	Kab. Maluku Tenggara

Sumber: Kemenko Perekonomian

Tabel 2.4. Nominasi TPID Award 2021

No.	Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/ Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
1	Sumatera	Sumatera Barat	Kota Palembang	Kota Tebing Tinggi
		Bengkulu	Kota Dumai	Kab. Musi Rawas
2	Jawa-Bali	Jawa Barat	Kota Malang	Kab. Badung
		Jawa Timur	Kota Bandung	Kab. Bangli
3	Kalimantan	Kalimantan Utara	Kab. Tabalong	Kab. Kapuas Hulu
		Kalimantan Timur	Kota Tarakan	Kab. Landak
4	Sulawesi	Sulawesi Tengah	Kota Makassar	Kab. Minahasa
		Sulawesi Utara	Kota Palopo	Kab. Bolaang Mongondow Utara
5	Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Nusa Tenggara Timur	Kab. Merauke	Kab. Lombok Barat
		Maluku Utara	Kota Mataram	Kab. Keerom

Sumber: Kemenko Perekonomian

Tindak lanjut arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi tersebut diturunkan pada Rakorpusda yang bersifat lebih teknis dan diikuti oleh TPID dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Rakorpusda TPID dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 28 Oktober 2021 melalui Surat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 005/4817/Bangda Tanggal 26 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekda Kabupaten/kota. Rakorpusda TPID merupakan forum diskusi antar pemangku kepentingan terkait sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah dalam upaya pengendalian inflasi yang rendah dan stabil. Rakorpusda juga menjadi wadah dalam menerjemahkan arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi

untuk dapat diimplementasikan pada level daerah. Pada Rakorpusda tahun 2021, ditekankan kembali peran TPID antara lain (i) TPID berperan dalam merumuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pengendalian inflasi, (ii) Memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diambil terkait dengan pengendalian inflasi di daerah, Menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, (iv) TPID berperan dalam mengantisipasi gejolak harga pangan pada saat hari raya besar, dan (v) Melakukan analisis perekonomian daerah dan mengantisipasi faktor yang dapat mengganggu kestabilan harga dan keterjangkauan barang dan jasa. Strategi sebagai tindak lanjut yang harus dilakukan Pemerintah Daerah melalui TPID adalah:

- a. Pemerintah Daerah melakukan proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan terkait pengendalian inflasi ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 260);
- b. Pemerintah Daerah melakukan penyusunan *roadmap* inflasi yang selanjutnya akan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 dilaksanakan untuk Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital Untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju sehingga terjaganya inflasi dalam rentang sasaran $3,0 \pm 1\%$.
- c. Melaksanakan perluasan kerjasama perdagangan antar daerah termasuk kerjasama dengan BUMN dan pihak swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Antar Daerah. Adapun tujuan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah adalah mendorong daya saing, meningkatkan investasi, pemenuhan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan kewilayahan, mempererat hubungan antar daerah dan penguatan NKRI.

2.2.4.5. Perbaikan Kualitas Data

2.2.4.5.1. Sinkronisasi Data Pangan

Upaya pengendalian inflasi di bidang pangan pada tahun 2021 difokuskan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, serta mendorong keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan ketersediaan dan harga pangan diperlukan dukungan data pangan. Pada tahun 2021, target penguatan data pangan diarahkan melalui pembuatan model *platform* pangan dan pertanian yang memuat informasi pertanian (petani, cuaca, *input*) dengan ujicoba di beberapa lokasi sentra pangan, serta penyusunan model data spasial terkait data lahan. Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan Survei Pertanian Terintegrasi atau *Agricultural Integrated Survey* (SITASI/AGRIS).

Pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan baik jika tersedia data berkualitas yang mampu menggambarkan kondisi pangan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selain data yang berkualitas, diperlukan satu data yang dapat menjadi acuan bersama sesuai Perpres 39/2019

tentang Satu Data Indonesia. Untuk mewujudkan satu data pangan tersebut, telah dilakukan sinkronisasi data secara periodik antara Kementerian Pertanian serta Dinas di tingkat provinsi dan kabupaten selaku produsen data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina Data. Salah satu *output* dari sinkronisasi tersebut adalah data produksi di seluruh wilayah Indonesia yang dapat digunakan untuk memantau ketersediaan pangan di setiap wilayah sehingga dapat disusun skenario distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Upaya peningkatan kualitas data juga dilakukan melalui verifikasi data secara langsung ke lapangan.

2.2.4.5.2. Implementasi Metode Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung

Implementasi metode KSA untuk komoditas jagung merupakan upaya perluasan penyediaan data penanaman menggunakan metode KSA oleh Badan Pusat Statistik di luar komoditas beras yang saat ini sudah berjalan. Data yang dihasilkan dari metode KSA ini akan menjadi acuan untuk menghitung luas tanam, luas panen, dan produksi ke depan. Program kerja implementasi metode KSA ini masih dalam proses dan belum dapat dipublikasikan pada 2021 akibat kendala di lapangan terkait pembatasan mobilitas untuk penanggulangan penyebaran COVID-19, dan juga terdapat kesulitan identifikasi lahan baku jagung yang kerap kali sulit dibedakan dengan padi. Namun demikian, program ini akan terus dilanjutkan pada 2022. BPS dan Kementan akan tetap melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya implementasi metode KSA jagung di lapangan.

2.2.4.5.3. Perluasan Data Pasokan PIHPS

Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional sebagai referensi informasi harga pangan strategis yang dapat diandalkan oleh pelaku ekonomi, pemangku kebijakan, media masa, dan masyarakat luas terus dilakukan. Data harga pangan dalam PIHPS Nasional yang mencakup beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng selama ini telah digunakan sebagai referensi harga untuk kepentingan penentuan kebijakan terkait pangan di berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Penguatan terintegrasi pada tahun 2021 terus dilakukan pada harga level konsumen di pasar tradisional (harian), pasar modern (mingguan), pedagang besar (mingguan), dan produsen (bulanan). Pada 2021, telah dilakukan

penambahan cakupan kota agar data harga PIHPS sejalan dengan survei SBH 2018 oleh BPS. Selain itu, target tahun 2021 juga mencakup penyediaan data pasokan pangan strategis melalui pelaksanaan survei data pasokan oleh seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia yang sudah mulai dikembangkan sejak Juli 2020. Pada tahun 2021, hasil survei data pasokan dimaksud telah dilakukan uji konsistensi dan validitas data pasokan, serta telah dipublikasikan secara terbatas sejak akhir 2021. Ke depan, Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah untuk menjaga kualitas data PIHPS, baik di sisi pelaksanaan survei, ketepatan waktu, maupun cakupan data. Penyempurnaan kualitas data PIHPS antara lain dilakukan melalui penguatan *quality assurance* proses bisnis survei serta perbaikan berkesinambungan terkait sistem informasi dan aplikasi.

2.2.4.5.4. Penyediaan dan Publikasi Data Inflasi Pangan dan Bahan Makanan Tingkat Daerah

Pengadaan data inflasi pangan bergejolak (VF) diupayakan melalui koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan BPS. Inflasi pangan bergejolak menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pemerintah

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan 2020-2024. Mempertimbangkan data inflasi VF yang ada saat ini hanya tersedia untuk tingkat nasional, maka diperlukan publikasi data tersebut secara spasial sebagai barometer keberhasilan dari strategi kebijakan yang dilakukan khususnya dalam mengendalikan inflasi VF. Pada tahun 2021, Kementerian PPN/Bappenas sebagai pembina Badan Pusat Statistik (BPS) berupaya menginisiasi koordinasi dengan BPS melalui *Focus Group Discussion* (FGD) secara intensif untuk dapat menyediakan dan mempublikasikan data inflasi VF di kota sampel IHK. Namun demikian, rencana kerja terkait hal ini tidak dapat diimplementasikan pada tahun 2021 mengingat adanya *refocusing* anggaran K/L yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Sementara itu, pembahasan data inflasi VF di tingkat daerah memerlukan kajian mendalam secara spesifik terutama pada saat memilah dan menyepakati komoditas daerah yang dikategorikan sebagai komponen inflasi VF. Selain itu, BPS juga akan melakukan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2022 dengan penambahan basket komoditas sampel daerah survei dari semula 90 menjadi 150 kabupaten/kota, sehingga pembahasan publikasi data inflasi VF akan lebih tepat setelah SBH 2022 selesai dilakukan dan dipublikasikan di tingkat nasional.



Gambar 2.5. Perkembangan PIHPS Nasional

Ketersediaan data harga pangan strategis terkini menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan data harga pangan strategis ialah melalui pengelolaan database Panel Harga Pangan yang terdiri dari panel harga pangan tingkat produsen dan konsumen di 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021, pemantauan harga pangan pokok strategis di produsen meliputi komoditas gabah (Gabah Kering Panen, Gabah Kering Giling), beras di penggilingan (medium dan premium), jagung, kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi hidup, daging ayam ras hidup, telur ayam ras. Sedangkan di tingkat konsumen, data harga pangan tersebut meliputi komoditas beras (premium, medium, termurah), cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.

Di samping ketersediaan data harga pangan strategis, pengambilan berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan juga membutuhkan ketersediaan data pasokan pangan yang akurat dan tepat waktu. Kondisi ketersediaan pangan antardaerah di wilayah Indonesia berbeda-beda disebabkan oleh kondisi geografis yang terdiri dari daratan, pegunungan, dan kepulauan. Untuk mengetahui ketersediaan atau stok pangan di suatu daerah, maka diperlukan sistem informasi stok pangan yang cepat, tepat, dan akurat. Salah satu pendekatan untuk memperoleh dan memonitor data stok pangan tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis (Simonstok). Simonstok dibangun oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian pada tahun 2020. Simonstok ini merupakan instrumen untuk mengetahui kondisi stok pangan baik nasional maupun daerah di 34 provinsi secara mingguan yang disandingkan dengan kebutuhan pangan. Dengan demikian, status ketahanan stok pangan dapat diketahui apakah berstatus surplus atau defisit.

Kegiatan monitoring stok pangan ini dirancang menggunakan metodologi untuk menentukan titik sampel masing-masing komoditas. Pengumpulan data dilakukan setiap minggu dengan melibatkan petugas data atau *enumerator* pada dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten/kota dari sampel yang ditentukan di berbagai simpul distribusi komoditas pangan tersebut. Sasaran kegiatan Simonstok dilakukan pada 10 komoditas pangan strategis, yaitu beras (penggilingan dan pedagang), jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, daging sapi, dan gula pasir. Hasil monitoring stok pangan menampilkan data dan informasi stok dan ketahanan stok serta neraca pangan mingguan baik nasional maupun daerah (34 provinsi) telah

dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan di pusat dan daerah dalam peningkatan akses pangan pada daerah defisit pangan. Informasi stok pangan ini dapat diakses melalui website <https://logistikpangan.id>.

2.2.4.5.5. Pengesahan Juklak, Sosialisasi, dan Capacity Building Pelaksanaan Dynamic Tagging Pengendalian Inflasi

Pemerintah meningkatkan evaluasi efektifitas kegiatan pengendalian inflasi melalui Dynamic Tagging Pengendalian Inflasi. Dalam rangka optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta mengawal pencapaian sasaran inflasi nasional melalui implementasi program/kegiatan terkait pengendalian inflasi nasional, pada tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas telah menetapkan Keputusan Menteri No. 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri tersebut pada tahun 2020 secara operasional diturunkan ke dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) *Dynamic Tagging* Pengendalian Inflasi, dengan tujuan supaya *output* dan rincian *output* kegiatan K/L yang mendukung pencapaian sasaran inflasi dapat diidentifikasi dan dievaluasi efektifitasnya. Sistem *Dynamic Tagging* merupakan mekanisme penandaan yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas di dalam aplikasi perencanaan KRISNA supaya *output* dari kegiatan K/L yang mendukung kebijakan pengendalian inflasi dapat dimonitor dan dievaluasi pencapaiannya. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai anggota TPIN dalam mengawal pencapaian sasaran dan strategi pengendalian inflasi. Pada Maret 2021, Juklak *Dynamic Tagging* Pengendalian Inflasi telah disahkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas. Selanjutnya, telah dilakukan penandaan/tagging anggaran program/kegiatan pengendalian inflasi dalam Renja KL tahun 2022 di aplikasi KRISNA. Hasil monitoring dan evaluasi *Tagging* Pengendalian Inflasi dalam Rencana Kerja (Renja) K/L tahun 2022 menunjukkan beberapa poin penting, yaitu:

- a. Program/Kegiatan K/L yang mendukung strategi pengendalian inflasi (4K) Tahun 2022 dan tertagging dalam system mencakup: Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

- b. Program/kegiatan K/L yang mendukung pengendalian inflasi juga mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional (PN) yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yaitu: PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- c. *Major Project* terkait pengendalian inflasi (4K) Tahun 2022, antara lain: Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; Pengelolaan Terpadu UMKM; *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan); Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan; Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng; Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional; Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; Jalan Trans Papua Merauke – Sorong; Jembatan Udara 37 Rute di Papua; Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas.
- d. *Tagging* anggaran Pengendalian Inflasi dalam Renja K/L Tahun 2022 sebesar Rp60,45 triliun, dimana K/L dengan porsi anggaran terbesar yaitu: Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan
- e. Kegiatan K/L TA 2022 yang mendukung pengendalian inflasi telah sejalan dengan beberapa program kerja Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 (tabel 2.5.).

Tabel 2.5. Keterkaitan Program/Kegiatan KL Dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024			Kegiatan K/L TA 2022 yang mendukung	Keterangan
4K	Program Strategis	Proker		
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi harga	Optimalisasi KPSH beras	Penyelenggaraan Program Sembako	Kementerian Sosial
		Kebijakan harga komoditas yang diatur Pemerintah	Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Ketersediaan Pasokan	Produksi Domestik	Kampung hortikultura (bawang merah, aneka cabai)	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Bawang Merah, Aneka Cabai, Bawang Putih)	Kementerian Pertanian
		Peningkatan produksi protein hewani	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak (Ternak ruminansia perah dan potong, ternak unggas)	Kementerian Pertanian
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Penguatan CPP (Beras, Jagung)	"1. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan (Kawasan Padi, Jagung, Padi Kaya Gizi/ Biofortikasi, Padi Organik) 2. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (Lumbung pangan masyarakat)"	"1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Pertanian"

Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024			Kegiatan K/L TA 2022 yang mendukung	Keterangan
4K	Program Strategis	Proker		
	Mekanisme Ekspor-Impor	Penguatan realisasi impor bahan pangan untuk mendukung ketersediaan pasokan	Pengelolaan impor	Kementerian Perdagangan
Kelancaran Distribusi	Penguatan KAD	Fasilitasi distribusi pangan mll TTIC, TTI, PMT	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Sistem Logistik Pangan Nasional)	Kementerian Pertanian
	Meningkatkan infrastruktur perdagangan	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah (subsidi rute AU, penyelenggaraan AL, panjang jalan mantap)	1. Pelayanan Transportasi Udara (Angkutan udara perintis, Angkutan BBM angkutan udara perintis, subsidi operasi angkutan udara kargo (<i>Major Project</i>)) 2. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Diantaranya pada kawasan: Trans Papua-Merauke-Sorong pada 18 pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (<i>Major Project</i>) 3. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat (Pembangunan:Terminal Barang International, Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan, Dermaga) 4. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Subsidi, peningkatan jalur KA) 5. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Peningkatan dan reaktivasi jalur KA)	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Perhubungan
		Penguatan implementasi digitalisasi UMKM sisi hilir (<i>E-commerce</i>)	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro (Usaha Mikro yang difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran melalui <i>E-Commerce/Online</i>)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Komunikasi Efektif	Koordinasi Pusat dan Daerah	Peningkatan kehandalan TPID	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitasi Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah)	Kementerian Dalam Negeri

Bab 3

Prakiraan Inflasi 2022

Inflasi tahun 2022 diperkirakan meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun masih terjaga dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1,0\%$. Proyeksi inflasi yang lebih tinggi tersebut diperkirakan terjadi pada seluruh kelompok disagregasinya, baik kelompok inti, Volatile Food (VF), maupun Administered Prices (AP). Prakiraan tersebut dipengaruhi oleh (i) akselerasi pemulihan ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat yang didukung meluasnya vaksinasi COVID-19, (ii) meningkatnya tekanan eksternal akibat gangguan pasokan global dan eskalasi tensi geopolitik, (iii) ekspektasi inflasi yang meningkat seiring perbaikan

perekonomian domestik, serta (iv) penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diimplementasikan mulai bulan April 2022. Selain itu, proyeksi inflasi ke depan juga diperkirakan akan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah lainnya, khususnya terkait rencana reformasi subsidi energi dan insiatif green economy. Di tengah berbagai potensi kenaikan inflasi tersebut, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas inflasi nasional

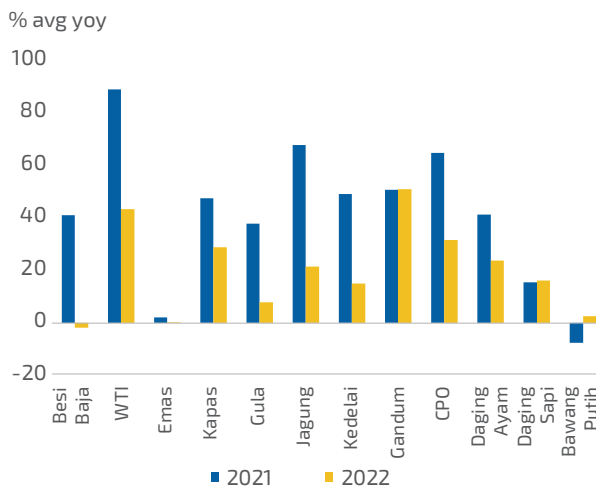


Pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi.

Berlanjutnya pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di beberapa negara sejak akhir tahun 2020, diperkirakan akan berdampak positif terhadap laju perekonomian global di tahun 2022. Berbagai lembaga keuangan internasional memproyeksikan kenaikan pertumbuhan ekonomi 2022 yang cukup tinggi. Perbaikan kondisi perekonomian tersebut, disertai dengan meningkatnya tensi geopolitik, diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan terhadap komoditas global, baik pangan maupun nonpangan, sehingga berimplikasi pada harga jual yang tetap tinggi. Dari sisi domestik, peningkatan aktivitas ekonomi juga diperkirakan akan berimplikasi pada membaiknya permintaan domestik. Sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah diproyeksikan akan tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya. Ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2021, namun masih terjaga dalam rentang sasarannya. Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diimplementasikan mulai bulan April 2022 juga diperkirakan mendorong inflasi. Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi inflasi 2022 diperkirakan masih tetap terjangkau dalam kisaran sasaran sebesar $3,0\% \pm 1\%$.

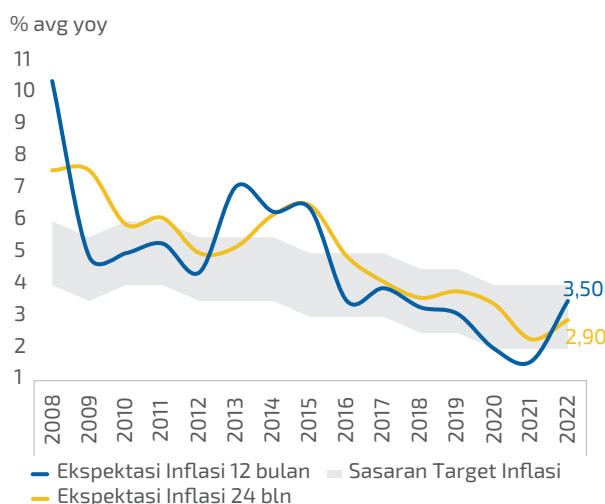
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Global dan Domestik

Indikator	Satuan	2021	2022*
Harga Minyak Dunia (Brent)	USD/brl	71	↑
IHIM	%Avg yoy	39,65	↓
IHIM Pangan	%Avg yoy	29,55	↓
IHIM Oil	%Avg yoy	88,93	↓
IHIM Others	%Avg yoy	42,08	↓
Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	14.340	↑
Produk Domestik Bruto	%yoy	3,62	↑
Ekspektasi Inflasi	%Avg yoy	1,6	↑



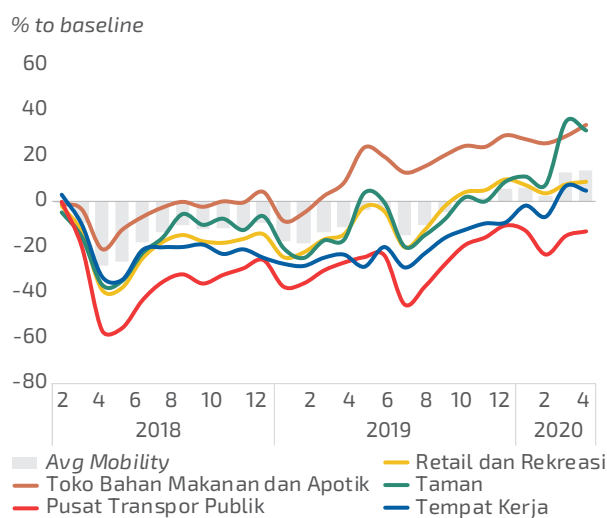
Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg (future per akhir April 2022). World Bank per akhir April 2022. diolah

Grafik 3.1. Proyeksi Harga Komoditas Global



Sumber: Consensus Forecast (Mei 2022)

Grafik 3.2. Ekspektasi Inflasi



Sumber: Google Mobility Trend

Grafik 3.3. Perkembangan Mobilitas Masyarakat

Pemulihan kondisi perekonomian, baik global maupun domestik, di tengah meningkatnya tekanan eksternal menjadi faktor determinan utama dalam pencapaian inflasi inti tahun 2022. Capaian inflasi inti diperkirakan lebih tinggi pada tahun 2022, didorong oleh perkiraan meningkatnya tekanan seluruh determinannya. Dari sisi eksternal, harga komoditas impor diperkirakan masih tinggi seiring proses pemulihan ekonomi global, walau pertumbuhan harganya diperkirakan termoderasi, di tengah gangguan pasokan global dan meningkatnya tensi geopolitik. Dari sisi domestik, pemulihan ekonomi diharapkan terjadi secara gradual sepanjang tahun 2022, didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat seiring berlanjutnya program vaksinasi massal untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Pemerintah secara konsisten memberikan berbagai stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain meneruskan diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa jenis mobil, pelonggaran uang muka untuk kredit sektor properti, dan relaksasi aturan kredit untuk UMKM maupun sektor pariwisata. Secara umum, proses pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut pada tahun 2022. Pergerakan nilai tukar Rupiah diproyeksikan stabil dan terjaga sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, *second round effect* dari inflasi kelompok VF dan AP diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksinya yang juga lebih tinggi. Adapun perkembangan ekspektasi inflasi diperkirakan meningkat namun masih tetap terjangkau dalam kisaran sasarannya. Lebih lanjut, penerapan UU HPP yang diimplementasikan mulai bulan April 2022 juga diperkirakan semakin mendorong inflasi inti.

Tekanan inflasi VF diperkirakan meningkat seiring dengan permintaan yang mulai pulih secara bertahap, tingginya harga pangan global, di tengah faktor cuaca yang relatif kondusif. Permintaan domestik yang sempat menurun di awal tahun 2022 pasca HBKN Nataru, diperkirakan akan terus membaik dan pulih pada semester II 2022, khususnya dari sektor horeca. Implementasi UU HPP terhadap beberapa komoditas VF juga diperkirakan menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan inflasi VF. Adapun kondisi cuaca sepanjang tahun diperkirakan kondusif mendukung produksi pangan. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terbaru, curah hujan terpantau berada di kriteria menengah-tinggi. Indeks ENSO bulan Desember 2021 sebesar -1,0 menunjukkan La Nina lemah-moderat yang diperkirakan dapat berlanjut hingga pertengahan tahun 2022. Sementara itu, prospek produksi tahunan diperkirakan tetap meningkat didukung upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan area tanam, di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang

diprakirakan akan ditransmisikan ke harga jual domestik. Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah melalui TPIP terus memperkuat sinergi dengan menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam meminimalisir dampak terganggunya produksi dan distribusi selama periode pemulihan ekonomi dengan tetap berpedoman pada kerangka 4K.

Perbaikan mobilitas, peningkatan daya beli masyarakat, dan adanya penyesuaian beberapa komoditas yang harganya diatur Pemerintah diperkirakan mendorong meningkatnya proyeksi inflasi AP. Inflasi AP tahun 2022 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh perbaikan mobilitas masyarakat, dampak penyesuaian beberapa komoditas energi nonsubsidi, serta penerapan UU HPP pada sejumlah komoditas AP. Selain itu, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2022 dengan rerata tertimbang sebesar 12% juga akan memberikan tekanan pada inflasi aneka rokok. Tarif cukai tersebut masih lebih rendah dibandingkan kenaikan pada 2021 yang sebesar 12,5%, namun transmisi pada harga jualnya diproyeksikan akan lebih tinggi seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat. Pada komoditas aneka angkutan, inflasi angkutan udara (AU) diperkirakan meningkat sejalan dengan perbaikan mobilitas dan upaya maskapai mengurangi kerugian selama masa pandemi. Sementara itu, aneka angkutan lain seperti angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan transportasi *online* juga meningkat sejalan dengan perbaikan mobilitas. Tekanan inflasi AP juga diperkirakan berasal dari penyesuaian tarif administrasi lainnya, seperti tarif jalan tol.

Secara spasial, proyeksi inflasi yang meningkat juga diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Inflasi IHK tahun 2022 diperkirakan meningkat di seluruh wilayah dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$. Inflasi inti diperkirakan meningkat terbatas didukung proyeksi perbaikan ekonomi serta penerapan UU HPP di tengah pasokan yang relatif terjaga. Inflasi *volatile food* diperkirakan meningkat seiring dengan mulai pulihnya permintaan domestik, khususnya dari sektor horeca. Selain itu, produksi pangan yang masih terdampak beberapa faktor fundamental seperti cuaca dan pola tanam diperkirakan masih akan memberi tekanan pada inflasi VF di berbagai daerah sentra produksi, khususnya wilayah Jawa. Inflasi AP juga diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat yang mendorong penyesuaian tarif aneka angkutan, terutama angkutan udara khususnya di wilayah luar Jawa. Selain itu, kenaikan inflasi AP juga diperkirakan sebagai dampak dari penyesuaian harga beberapa komoditas energi nonsubsidi

dan transmisi cukai rokok. Ke depan, koordinasi yang kuat dalam TPID perlu terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat meminimalisir tekanan inflasi di berbagai daerah, terutama yang berasal dari komoditas bahan pangan strategis.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui kebijakan perbaikan struktural yang menyeluruh¹. Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2022 yang mencapai Rp76,9 triliun, diarahkan untuk (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap *input* produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi; (3) diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) perbaikan iklim usaha dan daya saing; serta (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan (pengembangan *food estate*).

High Level Meeting (HLM) TPIP tanggal 9 Maret 2022 telah menetapkan lima langkah strategis untuk menjaga inflasi tahun 2022. Langkah strategis ditujukan untuk secara konsisten menjaga inflasi tahun 2022 dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$ dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Kedua, memitigasi dampak *upside risks*, antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Ketiga, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0-5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antardaerah. Keempat, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Kelima, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema: "Digitalisasi UMKM Pangan untuk Akses dan Stabilisasi Harga". Selain itu, HLM TPIP juga menyepakati untuk terus memastikan berjalannya implementasi kebijakan dan program kerja pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi tahun 2022–2024.

1 Siaran Pers Menko Perekonomian tanggal 30 November 2021 terkait Strategi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional dalam Agenda Pembangunan Nasional



Bab IV

Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2022

High Level Meeting (HLM) TPIP pada 9 Maret 2022 telah menyepakati lima langkah strategis untuk mendukung upaya menjaga inflasi 2022 agar tetap berada dalam kisaran sasarannya sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$. Lima langkah strategis tersebut terutama difokuskan pada upaya untuk memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak upside risks, menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 3,0-5,0%, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan, serta memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi. HLM TPIP juga telah menyetujui program strategis pengendalian inflasi TPIP tahun 2022 melalui strategi 4K yang meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Berbagai kebijakan Pemerintah juga diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi tersebut.

4.1. Arah Kebijakan Pengendalian Inflasi Tahun 2022

4.1.1. Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2022 akan terus diperkuat untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Arah dan penahapan kebijakan moneter akan dilakukan secara *pre-emptive*, *ahead of the curve*, dan *front-loading* untuk tetap menjaga stabilitas dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter dan konsolidasi kebijakan fiskal global dan kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR), dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan suku bunga rendah akan tetap dipertahankan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. Fokus kebijakan suku bunga lebih diarahkan pada penguatan efektivitas transmisinya pada penurunan suku bunga kredit perbankan melalui kebijakan transparansi suku bunga serta pendalaman pasar uang untuk menurunkan perbedaan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah-panjang dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang masih tinggi. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan likuiditas yang cukup besar di perbankan. Kebijakan normalisasi likuiditas dilakukan dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, didukung masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK). Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah secara bertahap.

Respons kebijakan terhadap dampak normalisasi kebijakan moneter *the Fed* dan sejumlah negara maju lainnya ditekankan pada kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas eksternal dengan tetap memelihara stabilitas moneter dan sistem keuangan serta proses pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan ruang untuk penyesuaian nilai tukar Rupiah dan imbal hasil SBN yang konsisten dengan perubahan nilai tukar global dan imbal hasil *US Treasury*. Penyesuaian dilakukan secara terukur dan dalam batas-batas yang normal untuk menjaga daya tarik imbal hasil aset SBN yang memadai dengan *interest rate differential* yang kompetitif. Bila diperlukan, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dilakukan melalui *triple intervention*, di pasar *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder,

untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan stabilitas pasar SBN dalam mengelola penyesuaian sesuai perkembangan global. Strategi operasi moneter juga akan diperkuat untuk mendukung efektivitas *stance* kebijakan moneter.

Kebijakan komunikasi yang efektif oleh Bank Indonesia secara konsisten akan terus dilakukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Setiap pengambilan *stance* kebijakan akan senantiasa dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan, baik melalui rilis hasil Rapat Dewan Gubernur maupun berbagai media lainnya seperti elektronik, cetak, dan media sosial. Untuk memastikan tetap terjangkarnya ekspektasi inflasi dalam kisaran sasarannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, termasuk meningkatkan transparansi dan intensitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan baik yang berada di dalam dan luar negeri.

Koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam koridor forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), terdiri dari TPIP, TPID Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota, yang selama ini telah berjalan dengan baik akan semakin ditingkatkan. Perkuatan koordinasi kebijakan tersebut dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas inflasi di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.

4.1.2. Kebijakan Fiskal

Pemerintah telah menyusun strategi kebijakan fiskal dengan mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022 untuk mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Kebijakan fiskal melalui instrumen APBN akan berperan sebagai *shock absorber* dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilnya inflasi di masa pemulihan ekonomi di tengah tekanan harga komoditas global. Salah satu pokok kebijakan fiskal yaitu program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan. Oleh karena itu, upaya pengendalian inflasi diharapkan dapat mendukung terjaganya akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam APBN 2022 disiapkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM dalam jangka panjang. Beberapa kebijakan yang akan dilakukan mencakup upaya melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan melakukan sinergi dengan berbagai data terkait, mendukung Reformasi Perlinsos secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, meningkatkan kualitas implementasi program Perlinsos dan pengembangan skema Perlinsos adaptif, serta melanjutkan Program Perlinsos melalui Bantuan Sosial dan Subsidi. Pada tahun 2022, Pemerintah juga akan terus melanjutkan reformasi Program Perlinsos secara bertahap dan terukur melalui upaya sinergi, integrasi, transformasi, dan perluasan program Perlinsos yang sudah ada, serta pengembangan program Perlinsos lainnya.

Pemberian bantuan sosial dan subsidi akan semakin diarahkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga. Subsidi diarahkan untuk lebih tepat sasaran, terintegrasi dan mendukung UMKM, petani serta layanan transportasi publik. Subsidi di bidang energi ini antara lain melanjutkan pemberian subsidi tetap solar Rp500/liter, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis DTKS secara bertahap, serta mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. Pelaksanaan transformasi subsidi energi ini dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan data penerima berbasis DTKS serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Pembangunan di bidang ketahanan pangan diarahkan untuk peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan, peningkatan produktivitas dan pendapatan petani serta nelayan, serta peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Salah satu program strategis Pemerintah yaitu Program Kawasan Sentra Produksi Pangan (*food estate*) dengan menggunakan pendekatan pasar (*market driven*) dan rantai nilai (*value chain*), serta pelibatan berbagai *stakeholder* terkait. Arah kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan tahun 2022 meliputi antara lain (1) peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; (2) peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap *input* produksi, penyediaan sarpras pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi

dan penggunaan teknologi; (3) peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi; (4) perbaikan iklim usaha dan daya saing; (5) penguatan sistem pangan berkelanjutan.

Kebijakan subsidi tahun 2022 juga diarahkan untuk lebih tepat sasaran guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain berupa (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar; (2) verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) melalui sistem e-RDKK secara berkala didukung oleh SDM penyuluh yang kompeten dan infrastruktur yang memadai; (3) menetapkan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk dan memperluas mekanisme penyesuaian subsidi pupuk melalui Kartu Tani untuk wilayah Jawa, Madura, Sumatera, dan Bali secara bertahap; (4) mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT. KAI dan PT. PELNI) dan penyediaan informasi publik (LKBN Antara); (5) memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga KUR sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha dan menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk mendukung penyediaan rumah MBR; dan (6) insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DP) sebagai stimulus perpajakan yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha. Selain itu, Pemerintah secara bertahap akan mengupayakan pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik golongan rumah tangga menjadi subsidi berbasis penerima manfaat (*targeted subsidy*) berdasarkan DTKS.

4.1.3. Kebijakan Pangan

Kebijakan Pangan tahun 2022 semakin diperkuat, terutama dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (*National Food Agency*). Pembentukan Badan Pangan Nasional didasarkan pada Perpres Nomor 66 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2021. Lebih lanjut, pembentukan Badan Pangan Nasional ini juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas utamanya untuk melaksanakan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Badan Pangan Nasional (*National Food Agency*) yang embrionya ialah Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian, memiliki tugas pemerintahan yang cukup luas di bidang pangan yang meliputi komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia (hewan pemamah biak seperti lembu, biri-biri, dan domba), daging unggas, dan cabai. Beberapa ketentuan dan kebijakan terkait pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain terkait (1) perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, serta perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan yang didelegasikan oleh Menteri Perdagangan; (2) perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan serta perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga yang didelegasikan oleh Menteri Pertanian; dan (3) memutuskan penugasan Perum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional yang penguasaannya diberikan oleh Menteri BUMN.

4.1.4. Kebijakan Energi

Menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional akan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah, meskipun tekanan ketidakpastian global semakin tereskalasi sejak awal tahun 2022. Salah satu komoditas strategis dalam konsumsi rumah tangga adalah komoditas energi dan memiliki peran penting dalam produksi dan distribusi sehingga peran kebijakan harga energi domestik menjadi krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya tahan produsen terutama di masa pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah menerapkan kebijakan yang secara konsisten terus mendorong pemulihan ekonomi, baik dari sisi produsen maupun konsumen sehingga implementasi kebijakan energi domestik akan terus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Kenaikan harga komoditas yang berlanjut sejak akhir tahun 2021 terus memberikan tekanan pada harga komoditas global, termasuk pada komoditas energi. Harga minyak yang terus meningkat terutama yang didorong oleh adanya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina mendorong pergerakan harga minyak mentah hingga berada di atas US\$100 per barel pada Maret 2022. Hal ini berdampak pada melonjaknya harga keekonomian komoditas energi domestik, terutama pada barang-barang nonsubsidi. Namun demikian, dukungan APBN mampu menahan kenaikan harga pada beberapa komoditas energi yang sangat krusial bagi masyarakat secara umum, seperti

pada bahan bakar rumah tangga LPG tabung 3kg, tarif listrik, dan beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih mendapatkan subsidi dan/atau kompensasi Pemerintah.

Arah kebijakan energi domestik ke depan memiliki tantangan yang besar. Di tengah tren peningkatan harga komoditas, daya beli masyarakat secara umum harus terus dijaga. Akses masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan terhadap komoditas energi harus tetap terjangkau. Postur APBN tahun 2022 telah dirancang untuk terus membantu untuk menopang daya beli masyarakat. Di sisi lain, reformasi APBN harus tetap dapat berkelanjutan di tengah upaya konsolidasi fiskal setelah masa pandemi. Instrumen APBN akan terus mengambil peran untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat dalam rangka menjaga daya beli di tengah proses pemulihan ekonomi yang masih terus berlangsung.

4.1.5. Kebijakan Konektivitas

Pada tahun 2022, penguatan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan kelancaran distribusi dan mendukung perbaikan pada pertumbuhan ekonomi pascapandemi COVID-19. Program prioritas peningkatan konektivitas wilayah dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana prioritas dalam RPJMN 2020-2024, meliputi: (i) konektivitas transportasi jalan; (ii) konektivitas transportasi kereta api; (iii) konektivitas transportasi laut; (iv) konektivitas transportasi udara; dan (v) konektivitas transportasi darat. Selanjutnya, kebijakan peningkatan aksesibilitas difokuskan untuk (i) mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan koridor utama, jalan akses ke kawasan-kawasan prioritas dan penghubung simpul transportasi, pembangunan dan pengembangan bandara, pelabuhan, dan infrastruktur angkutan umum massal perkotaan, serta memastikan kemanfaatan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan wilayah/kawasan pada *hinterland*, termasuk daerah yang mendapatkan penugasan; dan (ii) memastikan tersedianya layanan infrastruktur konektivitas seperti layanan angkutan perintis darat, laut, dan udara; subsidi toll laut; dan angkutan laut perintis, angkutan darat, angkutan kereta api, kargo dan angkutan udara, dan (iii) penyediaan dana *Public Service Obligation* (PSO) dan pemberian subsidi perintis terutama pada lintas-lintas layanan angkutan yang belum dapat diusahakan secara komersial serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis dengan berbagai pendanaan kreatif (*creative financing*), baik melalui skema penugasan ke BUMN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun alternatif pendanaan lainnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur termasuk konektivitas juga diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kebijakan ini antara lain dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan dunia usaha serta pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi terutama teknologi informasi dan komunikasi serta pangan. Anggaran infrastruktur tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp384,8 triliun, terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp170,4 triliun, TKDD sebesar Rp119,2 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp95,2 triliun. Peningkatan produktivitas melalui pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 205 km, pembangunan jembatan baru sebesar 8.244 m, pembangunan jalur kereta api sepanjang 6.624 km, pembangunan 6 bandara baru, dan dukungan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS). Selain itu, anggaran infrastruktur juga diprioritaskan untuk mendukung penyediaan infrastruktur pangan dan energi yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan antara lain dengan pembangunan jaringan gas sebanyak 10.000 dan pembangunan jaringan irigasi sepanjang 105.000 ha.

4.1.6. Kebijakan Ketenagakerjaan

Upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program peningkatan keahlian tenaga kerja dan penguatan sistem perlindungan sosial pekerja. Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema “semi-bantuan sosial” pada Semester I dan dilanjutkan dengan melaksanakan skema konsep asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada Semester II. Pada Februari 2022 Pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan juga mulai menjalankan Program JKP. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan UUCK dan amanat UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai sarana perlindungan pendapatan bagi pekerja yang memasuki usia pensiun (56 tahun). Tekanan politik membuat Permenaker No. 2/2022 perlu direvisi untuk mempermudah mekanisme penarikannya. Pada tahun 2022 Pemerintah akan menjalankan proses penetapan upah minimum sesuai dengan ketentuan dalam UUCK dan PP No. 36/2021.

4.2. Program Kerja TPIP Tahun 2022

4.2.1. Keterjangkauan Harga

4.2.1.1. Stabilisasi Harga

Regulasi terkait pangan strategis, yakni mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 24 Tahun 2020, Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Permendag No 57 Tahun 2017) dan Harga Acuan Penjualan di Produsen dan Pembelian di Konsumen (HAP) dalam Permendag No.7 Tahun 2020 perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan biaya usaha tani terkini, perkembangan harga pangan baik di tingkat produsen dan konsumen, serta dampak terhadap inflasi. Hasil *review* terhadap Permendag No. 24 Tahun 2020 menunjukkan bahwa aturan terkait HPP Gabah Kering Panen (GKP) masih relevan, namun perlu dikaji lebih lanjut untuk mengevaluasi efektifitas HPP Gabah Kering Giling (GKG) dan HPP beras di tingkat penggilingan. Pada tahun 2021, biaya usaha tani padi mengalami peningkatan, namun harga GKP selama 2021 selalu di atas HPP, menunjukkan bahwa pembentukan harga GKP telah mengakomodir peningkatan biaya *input*. Sementara itu, perkembangan harga GKG pada 2021 cenderung di bawah HPP, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk menetapkan tingkat HPP GKG baru serta menyusun ketentuan harga pembelian untuk gabah di luar kualitas. Selanjutnya, kebijakan HET beras dalam Permendag No. 57 Tahun 2017, dinilai perlu untuk dikaji ulang terutama terkait penetapan HET beras medium. Selama 2019–2021, pergerakan harga beras medium selalu berada di atas HET beras medium, sementara harga beras premium dapat terkontrol di bawah HET beras premium. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya harga beras medium adalah minimnya margin antara HET beras medium dengan HET beras premium. Namun demikian, dalam penetapan HET beras tersebut, perlu juga mempertimbangkan dampak HET baru terhadap inflasi dan angka kemiskinan.

Upaya peningkatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, termasuk saat HBKN pada 2022 akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan sebagai koordinator dengan didukung oleh Pemda (melalui Kementerian Dalam Negeri), serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Capaian upaya peningkatan stabilisasi harga oleh Kementerian Perdagangan akan diukur melalui

perhitungan koefisien variasi untuk masing-masing kelompok komoditas, yakni 2,9% untuk hasil pertanian, 23% untuk hortikultura, 4,9% untuk hasil industri, dan 5,9% untuk hasil peternakan serta perikanan. Sementara itu, sebagai komitmen untuk secara reguler melakukan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di lapangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) akan melakukan pengawasan sebanyak empat kali, termasuk saat HBKN.

Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras terus dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mencegah dan/atau menangani terjadinya gejolak harga beras. Upaya tersebut dilakukan yaitu dengan menggunakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum BULOG baik melalui pengadaan dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjaga stabilitas harga beras. Pelaksanaan KPSH dilakukan secara langsung oleh Perum Bulog di tingkat konsumen yakni di pasar rakyat, pasar induk, dan tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, maupun melalui distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai instruksi Menteri Perdagangan, KPSH pada tahun 2022 akan dilakukan sepanjang tahun untuk menjaga penyaluran beras dan kecukupan stok di kisaran 0,8 – 1,3 juta ton. Optimalisasi kegiatan KPSH dimaksud dilakukan melalui dua arah yaitu dari sisi penambahan pasokan ke pasar maupun pengurangan permintaan ke pasar. Penambahan pasokan ke pasar akan dimulai dengan menata kembali pasar-pasar target pelaksanaan KPSH yang memberikan pengaruh besar atas pergerakan harga beras dan komoditi lainnya, sedangkan pengurangan permintaan ke pasar dilakukan melalui KPSH yang dilakukan di jaringan distribusi yang mendekatkan dengan konsumen, misalnya Rumah Pangan Kita, Toko Tani Kita. Dari sisi produk, kemasan KPSH selanjutnya disalurkan dalam kemasan kecil yang memudahkan dan ringan untuk dibawa oleh konsumen terutama ibu rumah tangga. Selain itu, pengemasan beras KPSH dari kemasan 50 kg menjadi kemasan lebih kecil sekaligus mendukung proses pemeriksaan kualitas sebelum disalurkan sehingga kualitas KPSH dapat terjaga.

Perkembangan harga kedelai yang terus meningkat sejak awal tahun 2022 menjadi beban bagi pengrajin tahu dan tempe yang merupakan sumber protein pangan terjangkau murah yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk melakukan pengadaan dan penyaluran kedelai dengan bantuan selisih harga bagi pengrajin tahu

dan tempe. Sebanyak 200.000 ton kedelai (maksimal) akan disalurkan setiap bulan selama 4 bulan pada tahun 2022, dengan besaran selisih harga yang ditetapkan adalah Rp.1.000/kg, dan diberikan kepada pengrajin tahu dan tempe yang tergabung dalam Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Program ini direncanakan dimulai pada April 2022 sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2022.

Pemerintah pada tahun 2022 juga menugaskan BULOG melakukan pengadaan dan penyaluran jagung untuk tetap menjaga harga bagi petani sekaligus menyediakan jagung pada harga sesuai acuan kepada peternak mandiri. Hal ini mengingat harga jagung di tingkat petani selama awal tahun 2022 masih dalam level harga yang tinggi, sehingga meski menguntungkan bagi petani, di sisi lain juga meningkatkan beban biaya operasional bagi peternak mandiri. Selanjutnya, tingginya biaya operasional ini akan berdampak pada kenaikan harga daging ayam dan telur yang tidak menguntungkan konsumen, ataupun menimbulkan kerugian bagi peternak mandiri apabila harga daging ayam dan telur dimaksud tidak bisa bersaing dengan integrator besar. Dalam penugasan ini, Perum BULOG mengalokasikan sebanyak 50.000 ton jagung dengan menggunakan anggaran Cadangan Stabilisasi Harga Pangan kepada peternak mandiri di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga daging sapi, penugasan diberikan kepada Perum BULOG untuk menambah pasokan daging kerbau beku melalui importasi. Impor daging kerbau beku tersebut akan berasal dari India sebanyak 100.000 ton pada tahun 2022. Impor tersebut diharapkan mendatangkan daging kerbau beku pada Februari 2022 untuk memenuhi target pemenuhan dan penyediaan pasokan, serta upaya stabilisasi harga daging pada HBKN Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022.

Selama pandemi COVID-19, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat sehingga kebijakan penyesuaian harga energi dalam inflasi AP masih minim. Di tengah perkembangan harga komoditas global yang saat ini masih dalam tren meningkat, maka deviasi antara harga jual komoditas energi domestik dengan harga keekonomiannya semakin melebar. Di sisi lain, Pemerintah juga telah memiliki rencana untuk mulai melakukan reformasi fiskal dan transformasi subsidi. Sementara

itu, tekanan harga komoditas global juga berdampak pada terus meningkatnya harga avtur pesawat udara, yang dikhawatirkan berpotensi mendorong penyesuaian terhadap aturan tarif batas atas maupun batas bawah sehingga dapat mempengaruhi volatilitas inflasi. Oleh karena itu, kebijakan AP ke depan menjadi krusial, sehingga penetapannya perlu dikooordinasikan dengan memperhatikan *magnitude*, *timing*, dan *sequencing* agar inflasi IHK tetap dalam sasarannya.

Dalam rangka pengendalian inflasi khususnya dari tekanan harga barang impor, atau yang juga disebut dengan *imported inflation*, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga kestabilan nilai Rupiah. Upaya tersebut saat ini menjadi semakin penting, terutama di tengah adanya tekanan peningkatan harga komoditas global. Untuk itu, Bank Indonesia akan berupaya menjaga volatilitas Rupiah maksimal sebesar 15% pada tahun 2022. Langkah tersebut akan ditempuh antara lain melalui berbagai kebijakan, yaitu stabilisasi Rupiah, akselerasi pendalaman pasar keuangan, dan penguatan cadangan devisa termasuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui kerja sama keuangan internasional.

4.2.1.1. Mengelola Permintaan

Menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional tetap menjadi prioritas utama meskipun tekanan ketidakpastian global semakin tereskalasi sejak awal tahun 2022. Dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan optimal, Pemerintah terus berupaya untuk menjalankan kebijakan yang menimbulkan distorsi paling minimal pada perekonomian mengingat tekanan eksternal yang cukup besar pada perekonomian domestik. Di sisi lain, momentum pemulihan terus dijaga dengan dukungan kebijakan APBN sebagai instrumen fiskal. Di tengah kondisi ketidakpastian eksternal, terutama dampak dari kenaikan harga komoditas global secara umum memberikan tekanan yang cukup besar pada ekonomi domestik. Dengan tetap mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, kebijakan Pemerintah ke depan akan mempertimbangkan potensi tekanan inflasi sebagai dampak dari (a) meningkatnya permintaan seiring berlanjutnya akselerasi pemulihan ekonomi; (b) kebijakan moneter akomodatif selama masa pandemi termasuk dampak pembiayaan dari PEN; serta (c) konsolidasi fiskal pemerintah termasuk rencana transformasi subsidi energi dan perpajakan. Bauran kebijakan ke depan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung akselerasi pemulihan ekonomi lebih lanjut. Untuk itu, koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal perlu terus diperkuat, termasuk sinergi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendorong kredit dan pembiayaan.

4.2.2. Ketersediaan Pasokan

4.2.2.1. Memperkuat Produksi Domestik

Dalam rangka mengatasi tantangan struktural fluktuasi pasokan antarwaktu dan antarwilayah, TPIP dan TPID terus mengupayakan optimalisasi produktivitas pangan, khususnya melalui perluasan adopsi teknologi pertanian. Upaya dimaksud antara lain dilakukan oleh Bank Indonesia, melalui upaya perluasan implementasi adopsi teknologi pertanian. Mengacu pada hasil evaluasi kegiatan perluasan *pilot project* adopsi teknologi pertanian yang telah dilakukan pada tahun 2021, Bank Indonesia akan melakukan upaya penyempurnaan model bisnis pada tahun 2022 dan melanjutkan upaya perluasan implementasi adopsi teknologi pertanian dimaksud pada lima UMKM pangan.

Upaya mencapai ketahanan pangan domestik dalam jangka panjang secara konsisten terus dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian akan melanjutkan program kerja pengembangan lumbung pangan (*food estate*) di sejumlah wilayah untuk meningkatkan produksi beberapa komoditas pangan. Pada tahun 2022, Kementerian Pertanian direncanakan melakukan produksi komoditas kentang, bawang merah, dan bawang putih masing-masing sebesar 40 ribu ton, 39 ribu ton, dan 7 ribu ton. Selain itu, perluasan kawasan *food estate* juga terus dilakukan antara lain pada wilayah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Pada tahun 2022 pengembangan *food estate* untuk komoditas hortikultura salah satunya dilakukan di Kabupaten Temanggung seluas 400 ha. Pengembangan *food estate* di Temanggung menggunakan basis korporasi petani dilakukan melalui tahapan yang meliputi (a) koordinasi, sosialisasi dan advokasi, (b) pendampingan, (c) dukungan teknis, (d) menjalin jejaring kemitraan dengan *offtaker*, (e) dukungan pascapanen, pengolahan, pemasaran, (f) bimbingan teknis, (g) penerapan GAP dan GHP, dan (h) penumbuhan, penguatan dan pemantapan korporasi petani. Target *output* kegiatan berupa peningkatan produktivitas bawang merah, bawang putih dan cabai, masing-masing sebesar 7,36 ton/ha, 6,13 ton/ha, 7,89 ton/ha, dan 8,24 ton/ha.

Pengembangan *food estate* pada 2022 juga berlanjut di Kabupaten Wonosobo berupa pemantapan lahan eksisting tahun 2021 yaitu seluas 339,96 ha, dengan target berupa peningkatan produksi dan penambahan adopsi teknologi budidaya komoditas yang dikembangkan. Tahapan pengembangan di Wonosobo meliputi (a) penyusunan *site plan* dan penataan kawasan, (b) pengembangan prasarana tata air, (c) peningkatan prasarana transportasi, (d) pengembangan alsintan

dan unit pengelolaan pasca panen, (e) pengembangan prasarana pendukung lainnya, (f) perakitan paket teknologi dan persiapan produksi, (g) fasilitasi penyediaan sarana produksi, (h) pengembangan produksi pada skala kawasan, (i) pemantapan produksi dan diversifikasi produk, (j) pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, (k) pengembangan korporasi petani, (l) perancangan model dan penataan bisnis, (m) implementasi bisnis dan pengelolaan kawasan, dan (n) pemandirian korporasi petani secara berkelanjutan. Adapun target peningkatan produktivitas bawang putih, bawang merah, kentang, dan cabai masing-masing menjadi 6,7 ton/ha, 8,5 ton/ha, 16,5 ton/ha, dan 7 ton/ha. Selain itu, pada kawasan *food estate* di Kabupaten Wonosobo akan diupayakan peningkatan efisiensi produksi sebesar 0,5%, dukungan sarana prasarana sebesar 0,5%, produksi dan diversifikasi produk sebesar 0,5%, serta adopsi teknologi produksi sebesar 5,0%.

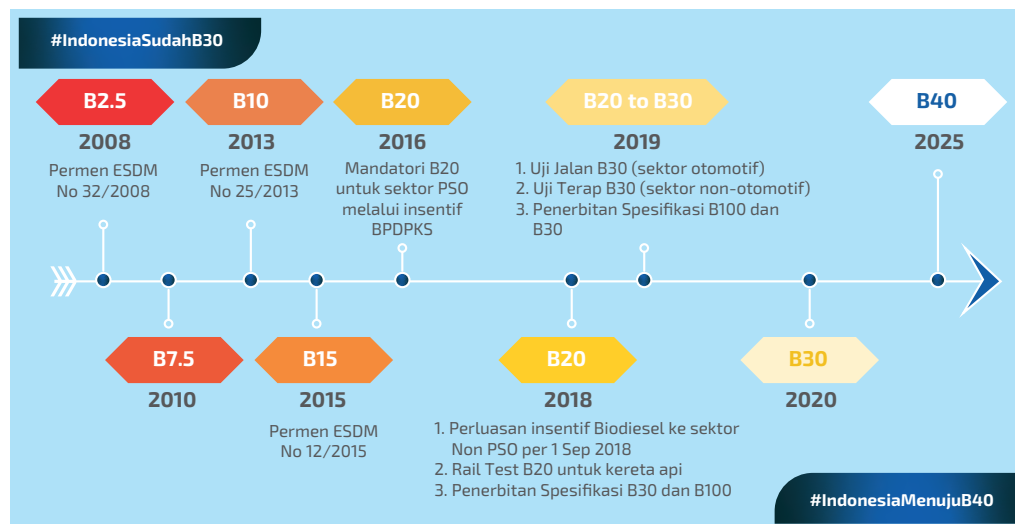
Pengembangan Kampung Hortikultura merupakan strategi membangun kawasan hortikultura yang lebih terkonsolidasi, memenuhi skala usaha ekonomi, memperkuat sistem ketahanan pangan dan memudahkan integrasi dukungan dari stakeholders terkait. Kementerian Pertanian mengembangkan Kampung Hortikultura, khususnya untuk komoditas bawang merah dan cabai dengan harapan dapat mendorong munculnya sentra-sentra produksi baru guna menopang ketersediaan di wilayah setempat maupun pasar sekitarnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap sentra-sentra tertentu. Dengan sistem klaster berbasis kampung, pengembangan kawasan akan lebih mudah dikoordinasikan antar sentra sehingga dapat mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga nasional. Pada tahun 2022, alokasi APBN untuk pengembangan kampung hortikultura oleh Kementerian Pertanian ditargetkan seluas 3.120 ha atau 312 kampung untuk komoditas bawang merah dan untuk komoditas cabai ditargetkan seluas 5.500 ha atau 484 kampung untuk komoditas cabai yang tersebar di 33 provinsi. Adapun jumlah target kampung hortikultura tersebut mengalami penurunan dibandingkan prakiraan awal seiring adanya penyesuaian alokasi anggaran.

Upaya peningkatan produksi domestik perlu terus didukung melalui penyediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian, termasuk penerapan praktik budidaya yang baik. Dalam hal ini, Kementerian PUPR pada tahun 2022 akan melaksanakan pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dengan target masing-masing sebesar 80.818 ha dan 137.556 ha. Sementara itu, Perum Bulog akan mendorong penyerapan pagu anggaran PMN untuk pembangunan sarana produksi dan infrastruktur dengan target sebesar 50%. Selanjutnya, dalam rangka penerapan praktik budidaya yang baik,

Kementerian Pertanian akan mengupayakan peningkatan jumlah kebun dan lahan usaha yang telah menerapkan GAP, GHP, dan GMP dengan target sebesar 5% pada tahun 2022.

Sejalan dengan rencana strategis, Kementerian Pertanian akan terus meningkatkan ketersediaan pangan. Untuk pangan asal ternak, akan diupayakan produksi protein hewani (kelompok daging) dengan target sebesar 4,59 juta ton yang diharapkan dapat mengurangi fluktuasi harga protein hewani khususnya daging sapi mengingat selama ini pemenuhan kebutuhan domestik Indonesia akan pakan protein hewani untuk kelompok daging khususnya daging sapi masih perlu didukung pasokan impor. Selain itu, Kementerian juga akan mendorong percepatan swasembada gula konsumsi sesuai target tahun 2023, mengingat produksi gula konsumsi dalam negeri saat ini masih belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik sehingga masih perlu didukung oleh impor. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian akan mengupayakan ekstensifikasi, yaitu penambahan luas wilayah lahan tebu yang ditargetkan sebesar 458.337 ha pada tahun 2022. Sementara itu, untuk meningkatkan ketersediaan pasokan domestik sekaligus memenuhi kebutuhan ekspor CPO, Kementerian Pertanian akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang mencakup peningkatan produksi, produktivitas, dan perluasan lahan kebun sawit. Pada tahun 2022 direncanakan dilakukan peningkatan produksi, peningkatan produktivitas, dan perluasan lahan kebun sawit sebesar 52,9 juta ton, 3,85 ton/ha, dan 15.459.163 ha. Selanjutnya, Kementerian Pertanian juga akan memastikan ketersediaan pasokan telur dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan untuk telur ayam ras. Untuk itu, akan diupayakan peningkatan produksi yang dijaga dalam tingkat yang rendah, yaitu sebesar 2,16% (yoy) setiap tahun. Melalui upaya ini, dapat memitigasi kenaikan harga maupun penurunan harga yang signifikan yang dapat merugikan konsumen ataupun produsen/peternak telur. Kegiatan modernisasi pengolahan dan penyimpanan produk pertanian juga akan dilakukan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mendukung upaya ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk hortikultura sebagai bagian dari upaya hilirisasi bahan baku industri. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian akan mengupayakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pascapanen komoditas hortikultura sebesar 5% pada tahun 2022.

Peningkatan pasokan juga diupayakan untuk komoditas bahan bakar, terutama dengan penguatan bahan bakar non-BBM. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan,



Gambar 4.1. Perkembangan Mandatori Biodiesel Indonesia

dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, Pemerintah terus berupaya menjaga konsistensi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor *fossil fuel* dengan tetap melanjutkan program Biodiesel. Sejak 2020, target yang ditetapkan hingga tahun 2022 adalah mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis Solar (Biosolar atau B30). Alokasi volume Biodiesel pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 10,15 juta kilo liter yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan prognosa kebutuhan (*demand*) atas Biosolar (B30). Untuk rencana penjualan B30 tahun 2022, proyeksi penjualan ditetapkan berdasarkan pengajuan Badan Usaha sebesar 36.522.816 kilo liter yang akan dilakukan PT. Pertamina (Persero) dan sub-holdingnya maupun Badan Usaha lainnya.

4.2.2.2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, Pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan pemenuhan cadangan pangan terutama selain komoditas beras. Untuk itu, Perum Bulog berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan merencanakan untuk melakukan pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui penyerapan dalam jumlah yang tepat, dimana target pada tahun 2022 minimal sebesar 1 juta ton setiap tahun. Untuk komoditas selain beras, Perum BULOG juga akan mengupayakan cadangan pangan lainnya, yaitu jagung dan kedelai. Adapun target minimal yang akan dicapai untuk kegiatan ini berupa kajian pembentukan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang disempurnakan dan/atau rekomendasi pembentukan CJP. Pada tahun 2022, Perum BULOG akan melakukan penghitungan jumlah CJP dan Cadangan

Kedelai Pemerintah (CKP) yang pengelolaannya akan memanfaatkan infrastruktur PMN dalam bentuk *Corn Drying Center* dan SILO Jagung serta gudang kedelai.

4.2.2.3. Pengelolaan Mekanisme Ekspor – Impor

Pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi negara asal impor dengan menjajaki kerja sama impor dengan sejumlah negara lain, terutama untuk komoditas pangan yang tidak dapat dipenuhi produksinya dari dalam negeri. Pada tahun 2022, Kementerian Perdagangan telah menetapkan target penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU) impor dengan Chile dan Meksiko. Selain itu, penguatan realisasi mekanisme impor juga akan didukung dengan perencanaan impor yang lebih baik ke depan. Penguatan rencana dan mekanisme impor dimaksud antara lain untuk komoditas gula, bombai, dan bawang putih agar pasokan dapat terjaga dan selanjutnya mengurangi gejolak harga.

4.2.2.4. Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan, penguatan kelembagaan petani perlu akan terus konsisten dilakukan guna mendukung kapabilitas dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Upaya penguatan kelembagaan petani oleh Kementerian Pertanian pada jangka menengah akan fokus pada petani komoditas pangan (hortikultura), perkebunan sawit, serta petani tebu. Pada tahun 2022, Kementerian Pertanian akan melakukan sejumlah upaya, yaitu korporatisasi pembentukan klaster petani (hortikultura) sebesar 65 klaster, fasilitasi kemitraan dan deregulasi kelapa sawit di 10 provinsi, serta mekanisme beli putus tebu dengan pabrik gula sebanyak 7 pabrik. Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui peningkatan indeks

akseptabilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan pertanian. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2021. Dalam program kerja ini, Kementerian Pertanian merencanakan untuk melakukan peningkatan indeks aksesibilitas pada tahun 2022 sebesar 67,13%.

Pemerintah akan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan mekanisme SRG sebagai instrumen pembiayaan perdagangan. Kegiatan dimaksud akan difokuskan pada beberapa faktor kunci keberhasilan pelaksanaan SRG yang meliputi sinergi kebijakan dan program kerja lintas Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyiapan dan peningkatan kapasitas Pengelola Gudang SRG agar mandiri dan profesional, membangun akses gudang SRG dengan pasar, serta mendorong penguatan kelembagaan petani, petambak/nelayan selaku pemanfaatan SRG. Transaksi SRG pada tahun 2022 diperkirakan meningkat antara lain didorong oleh pemberlakuan Skema Subsidi Resi Gudang dengan ketentuan baru yang telah disempurnakan, seperti mengkomodir subsidi margin pada pembiayaan berbasis syariah, peningkatan plafon hingga maksimal Rp.500 juta perdebitur, perpanjangan jangka waktu pembiayaan hingga maksimal 1 tahun dan perluasan cakupan penerima subsidi yang mencakup petani serta pelaku usaha kecil/menengah yang melakukan kemitraan dengan petani.

Upaya optimalisasi pemanfaatan SRG perlu didukung dengan upaya pembangunan akses gudang SRG dengan pasar, sehingga pelaksanaan SRG perlu bersinergi dengan pelaksanaan PLK. Transparansi mekanisme perdagangan di PLK dapat mendukung optimalisasi pembentukan harga jual komoditas sehingga dapat menjadi referensi harga bagi SRG, sementara kepastian kuantitas dan kualitas yang tercantum pada Resi Gudang akan menumbuhkan kepercayaan pelaku pasar di PLK. Selanjutnya, penerapan kedua instrumen ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan. Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan PLK oleh pelaku usaha, arah kebijakan PLK tahun 2022 akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, optimalisasi penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu, serta perluasan pasar melalui kerjasama dengan asosiasi komoditas/ritel, literasi PLK, serta identifikasi komoditas unggulan daerah yang bisa didorong pemasarannya melalui PLK. Upaya optimalisasi pemanfaatan SRG dan PLK tersebut ditargetkan dapat meningkatkan transaksi penerbitan Resi Gudang hingga tumbuh sebesar minimal 9% dari *baseline* tahun 2019, serta transaksi PLK sebesar 5% dari *baseline* tahun 2019 dengan mengecualikan GKR yang sudah tidak diwajibkan lagi untuk ditransaksikan melalui PLK.

Dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mempercepat upaya mewujudkan target kedaulatan pangan pada 2024, Pemerintah membentuk Holding BUMN Pangan. Gabungan BUMN di bidang pangan tersebut selanjutnya dikoordinasikan oleh PT. RNI sebagai induk. Melalui Holding BUMN klaster pangan, pemangku kepentingan seperti klaster pangan dapat meningkatkan skala usaha, akses pendanaan, dan profitabilitas, sekaligus menciptakan sinergi lintas BUMN, klaster, dan swasta dalam ekosistem pangan nasional. Di sisi masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, peternak, dan nelayan kecil, serta pemberdayaan dan peningkatan produktivitas UMKM yang selanjutnya dapat terwujud peningkatan produksi untuk mendorong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada 2022, optimalisasi Holding BUMN klasterpangan oleh Kementerian BUMN dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas tebu sebesar 76 ton/ha dan akusisi mitra warung pangan sebanyak 90 ribu mitra.

4.2.3. Kelancaran Distribusi

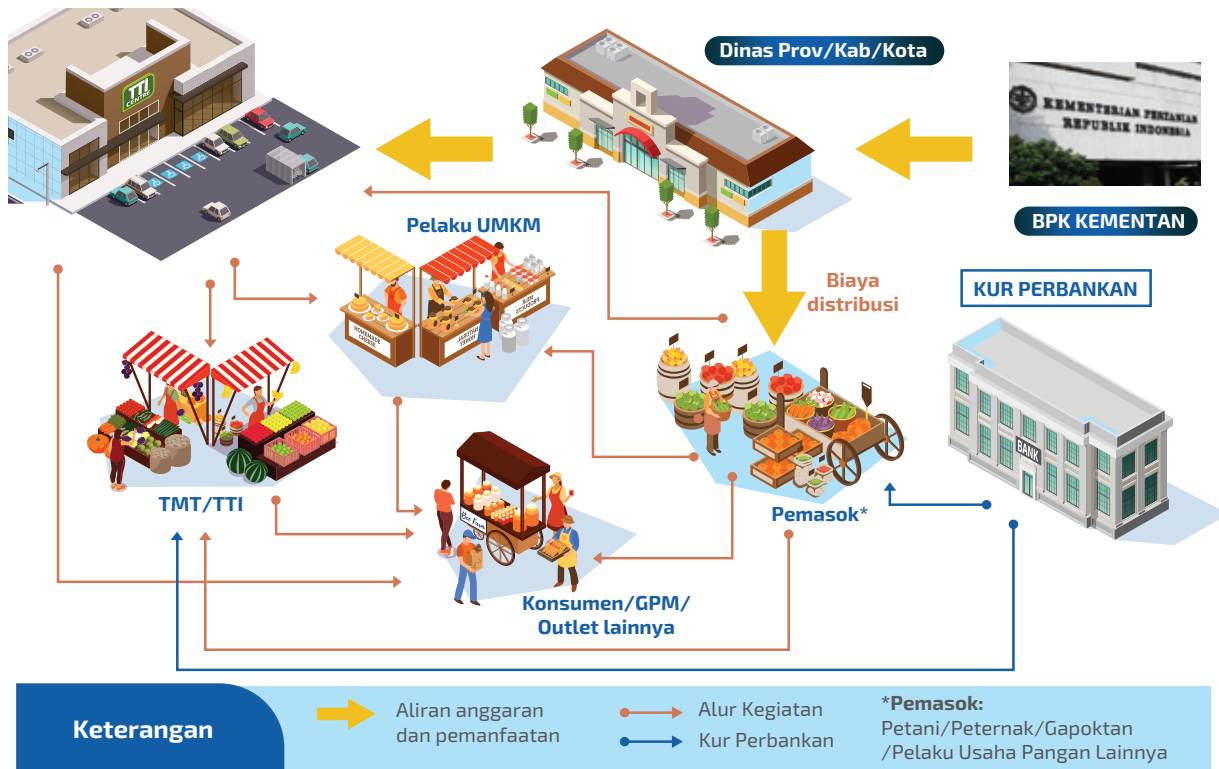
4.2.3.1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Kegiatan KAD akan terus dioptimalkan untuk mendukung upaya perbaikan volatilitas inflasi VF antardaerah. Melanjutkan keberhasilan upaya KAD yang telah dilakukan, Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia akan terus melakukan upaya penguatan dan perluasan KAD dengan target yang akan dicapai pada tahun 2022 berupa peningkatan jumlah KAD sebesar 10%, dan/atau penambahan jenis komoditas yang ditransaksikan, dan/atau penambahan volume transaksi KAD.

Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan memberikan biaya distribusi (transportasi dan/atau kemasan/packing) kepada pemasok ke PMT/TTIC/TMT/TTI dan/atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan masih berlanjut. Pada tahun 2022, kegiatan ini juga mencakup upaya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan tahun sebelumnya. Bantuan biaya distribusi pangan melalui FDP diberikan khususnya untuk bahan pangan pokok strategis, misalnya gabah atau beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir. Dalam hal ini, PMT/TTIC/TMT/TTI dan/atau pelaku UMKM Pangan memiliki peran sentral dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditas pangan

pokok strategis. Kegiatan PMT/TTIC/TMT/TTI dan/atau pelaku UMKM Pangan pada tahun 2022 ditargetkan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu sebanyak 34 provinsi dan 1 kegiatan di pusat, dengan peningkatan penjualan sekitar 500 ton dari tahun sebelumnya. Untuk itu, target volume pendistribusian/penyaluran bahan pangan melalui adalah sebesar 15.290 ton, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16,54 miliar yang akan diprioritaskan untuk penyaluran beras, bawang merah,

cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan telur ayam ras sesuai pelaksanaan kegiatan PUPM-TTI sebelumnya. Selain itu, dalam rangka pengamanan, penanganan, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, baik di produsen maupun konsumen, dana FDP juga akan digunakan untuk penyaluran/pendistribusian bahan pangan dari wilayah surplus atau yang memiliki harga rendah ke wilayah defisit atau yang memiliki harga tinggi.



Gambar 4.2. Kerangka Pikir Kegiatan FDP Melalui PMT/TTIC/TMT/TTI dan/atau Pelaku UMKM Pangan Tahun 2022



Gambar 4.3. Kegiatan FDP Antar Wilayah Tahun 2022

4.2.3.2. Peningkatan Infrastruktur Perdagangan

Peningkatan kuantitas dan kualitas konektivitas antar wilayah terus didorong untuk mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan).

Upaya dimaksud dilakukan untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah dengan mendukung kelancaran distribusi bahan pangan, terutama dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur darat, laut maupun udara. Dalam hal ini, akan dilakukan antara lain melalui akselerasi pembangunan di Kawasan Indonesia Timur (KIT) untuk mendukung penguatan koridor utama logistik nasional melalui pembangunan jalan perbatasan, jalan lintas pulau, serta jalan akses menuju pelabuhan dan bandara. Selain percepatan pembangunan, Pemerintah juga secara konsisten melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah 3TP. Secara keseluruhan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP tahun 2022 dilakukan melalui subsidi AU perintis kargo dan subsidi AU kargo; peningkatan jumlah rute/trayek AL perintis dan/atau penyelenggaraan tol laut dan/atau angkutan kapal ternak; dan peningkatan panjang jalan dan kemandirian jalan nasional. Untuk jalur udara, Kementerian Perhubungan akan mengupayakan kegiatan untuk 43 subsidi rute angkutan udara, yang terdiri dari 41 perintis kargo dan 2 subsidi kargo, sementara untuk jalur laut berencana untuk menyelenggarakan angkutan laut perintis sebanyak 117 trayek dan/atau tol laut sebanyak 34 trayek.

Dalam penyediaan jalan, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan program infrastruktur konektivitas yaitu jalan tol, jalan non-tol, dan jembatan yang masing-masing sepanjang 449 km, 354 km, dan 20.188 m. Target yang akan dicapai untuk kegiatan ini adalah penyediaan jalan mantap sebesar 93%. Untuk pembangunan jalan tol akan terdiri dari beberapa ruas, misalnya Trans Sumatera dan Semarang-Demak, sementara itu, untuk jalan non-tol akan dilaksanakan di beberapa ruas seperti Pantai Selatan Jawa (Pansela) Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Trans Papua, dan jalan perbatasan negara di Kalimantan Barat. Komitmen peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas juga diwujudkan melalui pengembangan aksesibilitas daerah 3TP. Infrastruktur jalan di kawasan strategis 3TP tidak hanya harus terhubung dan memiliki kemandirian yang memadai, namun juga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan logistik ekonomi, pertahanan, dan keamanan, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan disparitas harga bahan pangan pokok. Pada 2022, terdapat 18 Pulau 3TP, dimana sebanyak 11 pulau diprioritaskan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga sehingga diharapkan dapat mendukung upaya keterjangkauan harga, meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah, serta mendukung percepatan daerah tersebut. Secara umum, kegiatan tersebut akan berupa peningkatan infrastruktur di Pulau Simeulue (Provinsi Aceh), Pulau Nias (Provinsi Sumatera Utara), Pulau Mentawai (Provinsi Sumatera Barat), Pulau Enggano (Provinsi Bengkulu), Pulau Natuna (Provinsi Kepulauan Riau), Pulau Muna (Provinsi Sulawesi Tenggara), Pulau Aru (Provinsi Maluku), Pulau Babar (Provinsi Maluku), Pulau Seram (Provinsi Maluku), Pulau Morotai (Provinsi Maluku Utara), dan Pulau Biak (Provinsi Papua).



Gambar 4.4. Peta Sebaran 18 Pulau Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T)



Gambar 4.5. Peta Konektivitas

Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, memperlancar distribusi bahan pangan, dan memperluas akses petani kepada masyarakat. Hal ini terutama memanfaatkan peluang dari semakin berkembangnya teknologi dan tren digitalisasi, serta perilaku konsumen yang mulai banyak melakukan pembelian secara *online* melalui *e-commerce* khususnya pada era pandemi COVID-19. Program kerja ini dilakukan melalui (a) fasilitasi UMKM pangan binaan Bank Indonesia dengan *e-commerce* di level nasional maupun daerah dengan target sebesar 10% dari total jumlah UMKM pangan binaan dan mitra Bank Indonesia; dan (b) peningkatan volume transaksi PasTani oleh Kementerian Pertanian dengan target berupa peningkatan volume transaksi PasTani oleh Kementerian Pertanian sebesar 10%.

4.2.4. Komunikasi Efektif

4.2.4.1. Perbaikan Kualitas Data

Dalam rangka penyediaan data informasi yang berkualitas, terintegrasi dari pusat dan daerah, serta dipublikasikan secara berkala untuk mendukung asesmen, Kementerian Pertanian akan menyediakan data pasokan pangan strategis nasional dan daerah melalui panel harga pada aplikasi Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis Nasional (Simonstok). Aplikasi dimaksud bertujuan untuk mengetahui besaran stok pangan di masyarakat, serta neraca surplus dan defisit pangan setiap minggunya, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan intervensi pangan yang diperlukan. Pada tahun 2022, penyediaan data melalui aplikasi Simonstok akan difokuskan pada upaya

untuk menjaga kesinambungan ketersediaan data pasokan pangan strategis di 34 provinsi maupun data nasional. Selain itu, Badan Pangan Nasional akan terus melakukan penyempurnaan data base Panel Harga Pangan untuk menghasilkan data yang lebih valid dan *reliable* melalui peningkatan koordinasi dan pengawalan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Selain pengelolaan data panel produsen dan eceran, juga akan mulai dibangun panel grosir terutama untuk komoditas pangan yang menjadi bahan baku utama industri pangan atau pakan seperti kedelai dan jagung.

Peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS sebagai salah satu *leading indicator* pergerakan harga dan pasokan pangan nasional terus dilakukan secara konsisten oleh Bank Indonesia untuk mendukung kegiatan asesmen dan pengambilan kebijakan yang didasarkan pada ketersediaan data harga dan pasokan yang akurat. Hal ini mengingat peran penting dari data pasokan yang akurat dan tersedia secara *real time*, yang dapat digunakan sebagai *early warning system* bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan proyeksi kecukupan pasokan pangan ke depan, serta dalam mengambil respon kebijakan yang strategis dan antisipatif dalam meredam potensi gejolak harga pangan. Untuk itu, penguatan data harga PIHPS ke depan akan terus diperkuat, khususnya terkait aspek korelasinya dengan data inflasi BPS, agar dapat menjadi referensi harga yang lebih akurat. Pada tahun 2022, upaya peningkatan kualitas dan keakuratan data PIHPS oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penyediaan dan publikasi data pasokan komoditas pangan di seluruh provinsi. Sementara itu, akurasi data harga PIHPS dengan data inflasi BPS akan terus dijaga korelasinya minimal sebesar 0,8.

4.2.4.1. Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

Penyusunan Peta Jalan TPID sebagai tindak lanjut penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional akan dilakukan sebagai panduan dan rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja TPID. Peta Jalan TPID dimaksud akan mengacu pada upaya pengendalian inflasi di tingkat nasional, namun juga akan mempertimbangkan konteks dan permasalahan inflasi di masing-masing daerah. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan target penyusunan Peta Jalan TPID dapat dilakukan oleh seluruh (100%) TPID Provinsi.

Penguatan upaya pengendalian inflasi di daerah terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan peran dan kapabilitas daerah melalui forum TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan TPID untuk meningkatkan kehandalan TPID akan dilakukan melalui *capacity building* atau sosialisasi yang dikoordinasikan bersama oleh Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP. Materi yang disampaikan dalam *capacity building* di antaranya tata cara penyusunan program kerja, kerja sama antar daerah, mitigasi risiko, kelembagaan, program pusat terkait pengendalian inflasi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah untuk mendukung kestabilan harga di wilayahnya, serta review evaluasi kinerja TPID tahun sebelumnya maupun ruang untuk perbaikan ke depan.

Dalam *capacity building*, akan disosialisasikan kriteria evaluasi kinerja TPID terkini dan tata cara penyusunan serta pengumpulannya, mengingat terdapat potensi perubahan kriteria setiap tahun dan perpindahan keanggotaan TPID yang dinilai cepat, sehingga perlu pendalaman ulang terutama bagi anggota baru. Selain itu, dalam forum *capacity building* akan disampaikan kembali arahan Presiden untuk mendorong TPID menindaklanjuti arahan dimaksud melalui implementasi misalnya dalam bentuk kebijakan dan program.

4.2.4.1. Pengendalian Ekspektasi Inflasi

Upaya pengendalian ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif, kredibel dan berkesinambungan merupakan bagian dari pelaksanaan bauran kebijakan pengendalian inflasi nasional. Dalam kaitan ini, berbagai upaya komunikasi kebijakan akan dilakukan secara rutin dan terus diperkuat antara lain melalui publikasi *press release*, *press conference*, maupun upaya strategi komunikasi lainnya melalui berbagai media/jalur komunikasi. Melalui upaya ini, ekspektasi inflasi masyarakat diharapkan dapat terjaga di tengah tingginya dinamika perekonomian global maupun domestik, sebagaimana tercermin dari angka proyeksi inflasi oleh *Consensus Forecast* (CF) yang ditargetkan sebesar $3,0\% \pm 1\%$ pada tahun 2022.

